

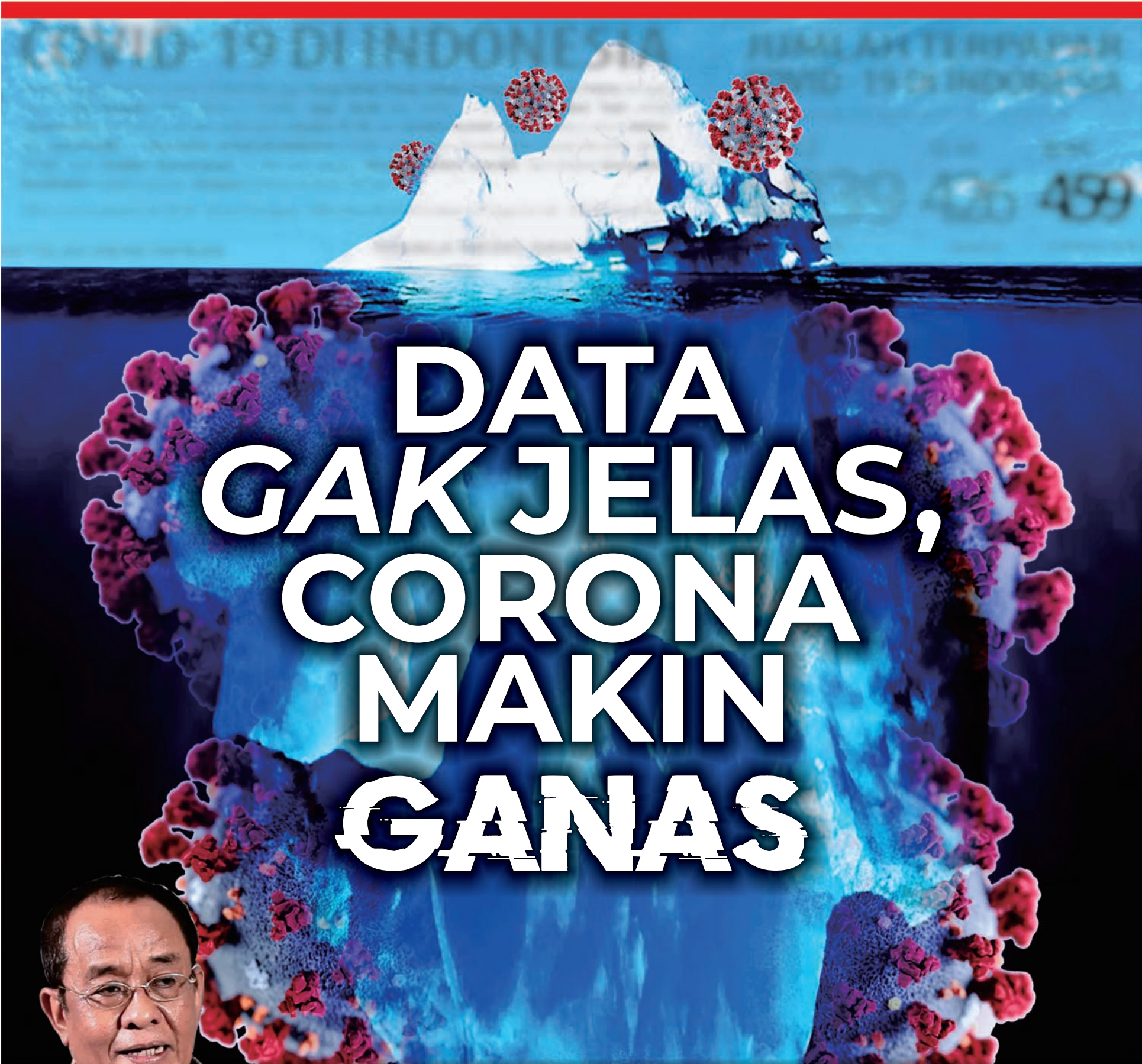
Harga
Jawa Rp. 8000,-
Luar Jawa Rp. 15.000,-

Edisi 264
23 Sya'ban - 7 Ramadhan 1441 H
17 - 30 April 2020

Media ^{t a b l o i d} **umat**

mediaumat.news

Memperjuangkan Kehidupan Islam



DATA GAK JELAS, CORONA MAKIN GANAS



■ WAWANCARA

Muhammad Said Didu,
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN
Rahasiakan Data,
Langkah Pertama yang Salah

■ KISAH

Reaksi Dunia Islam
atas Penghapusan
Khilafah

■ NASIONAL

Ismail Yusanto:
Penanganan Wabah
Corona Karut-Marut

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!

Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT berada di dunia ini. Semoga kesempatan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan terus meningkatkan amal shalih untuk kehidupan di akhirat kelak. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Pembaca yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda. Semoga Anda sehat semua dan tetap bisa mensyukuri nikmat Allah SWT, meski mungkin dalam kondisi yang serba terbatas. Tak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Insya Allah, selalu ada kebaikan bersama dengan kesempitan yang kita hadapi.

Tentu kita tidak menginginkan ada wabah menyerang negeri ini. Tapi, fakta sudah ada di depan mata kita. Wabah Covid-19 menyebar begitu luas di hampir di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Sudah jutaan orang terjangkiti virus ini, dan puluhan ribu orang lainnya tewas karenanya. Entah sampai kapan wabah ini lenyap dari muka bumi. Bila di sumber wabahnya, Wuhan, Cina, wabah sudah mulai hilang, di belahan dunia yang lain justru baru mulai. Amerika Serikat yang begitu digdaya, harus tersungkur karena corona.

Sementara di Indonesia, negara seperti kebingungan harus berbuat apa. Ada undang-undang tentang kekarantinaan, nyatanya tak digunakan secara maksimal. Sudah hampir 2 bulan sejak Presiden Jokowi mengumumkan adanya orang yang positif Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru diberlakukan. DKI Jakarta baru saja mendapat izin untuk melakukan PSBB ini dari Kementerian Kesehatan, padahal jauh hari sebelumnya DKI sudah mengusulkan adanya pembatasan wilayah.

Pemerintah pusat seperti ketakutan jika *lockdown* dilakukan karena ada beban yang ditanggung oleh

pemerintah pusat yakni menyediakan kebutuhan pokok bagi manusia dan hewan ternak. Makanya, dengan aturan PSBB, pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya urusan PSBB ini kepada daerah. Pemerintah pusat hanya menunggu. Ini sangat berbeda negara-negara lain yang terlihat rezimnya justru mengambil inisiatif di depan.

Pembaca yang dirahmati Allah, sejak awal rezim Jokowi seperti menyepikan apa yang terjadi di dunia terkait wabah Covid-19 ini. Rezim seolah menolak jika dikatakan Covid-19 sudah masuk ke Indonesia. Bahkan rezim menjadikan Covid-19 ini sebagai bahan lelucon politik. Misalnya, Covid tidak bisa masuk ke Indonesia karena birokrasi berbelit-belit, masyarakat kebal Corona karena suka makan nasi kucing, dsb.

Dampaknya, begitu Covid -19 betul-betul telah menyebar, pemerintah kelabakan. Ini semua terjadi karena tidak ada data yang jelas terkait wabah ini. Padahal, data yang akurat merupakan sumber bagi pengambilan kebijakan. Bila datanya salah, dapat dipastikan kebijakan yang diambil salah. Di sinilah data itu sangat diperlukan.

Perjalanan waktu membuka mata masyarakat betapa rezim kurang memperhatikan keselamatan rakyat. Mereka lebih memikirkan faktor ekonomi. Bagaimana mendapatkan uang dan investasi, hingga bagaimana membuat UU baru untuk menarik investasi.

Itulah yang kami kupas di Media Utama. Disambung lagi dengan kajian tentang Perppu No 1 Tahun 2020 yang lahir di tengah wabah Covid-19. Mengapa? Mengatasi masalah atau ada kepentingan lain? Ikuti kupasannya di Fokus.

Akhirnya, jaga terus kesehatan Anda. Selalu bermohon kepada Allah, agar wabah ini segera ditarik oleh Allah dari negeri ini dan negeri kaum Muslim lainnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

MEDIA PEMBACA

Memahami Berbagai Musibah

Akhir-akhir tahun ini banyak terjadi musibah menimpa umat manusia baik di luar negeri dan dalam negeri. Sekarang terjadi wabah Corona, banjir, kelaparan dan sebagainya, semua itu menimbulkan penderitaan bagi manusia.

Yang namanya musibah tentu tidak diharapkan terjadinya, dan semua manusia ingin dijauhkan dari musibah itu. Walau manusia berusaha untuk mengatasinya dengan berbagai cara dan usaha, ada kalanya tidak berdaya untuk menghadapinya dan mengatasinya karena di luar kemampuannya.

Kadang timbul pertanyaan dalam benak hati manusia apa makna atau arti dari musibah itu mengapa sering terjadi? Dan adakah hikmah yang di dapat atau di petik darinya? Jika dilihat dari makna Alquran maka di balik musibah pasti ada hikmahnya, karena segala sesuatu baik buruknya dari Allah sudah ada tertulis di lauhul mahfudz, maka percayalah semua yang terjadi kehendak Nya, berusahalah untuk mengatasinya dengan menjaga lingkungan sekitar dan kebersihan dalam segala hal. **Ibu Komala. Beleendah. +62 899-2540-xxx**

RUU Kontroversi

Di tengah wabah Covid-19 yang menjadi pandemi global, kita rasakan Indonesia sendiri tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan wabah ini. Inilah bukti bahwa manusia adalah makhluk yang lemah.

Walhasil tidak hanya manusia saja yang tumbang, namun ini juga berdampak pada perekonomian global yang sangat fluktuatif melemah. Bahkan di Indonesia, guncangan ekonomi ini tak hanya terlihat dari rupiah yang melemah tapi juga industri kecil yang menurun omsetnya.

Sebagian pihak mengklaim, Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) mampu menjadi solusi ekonomi yang melemah karena wabah.

Pernyataan bahwa Omnibus Law adalah solusi setelah pandemi tidak dapat dibenarkan. Pasalnya membuka kran investasi berarti membuka peluang ketergantungan negara kepada asing dampaknya negara kita rugi. Tidak hanya itu, bahkan ekonomi akan mudah goyah jika perekonomian asing bermasalah sebagaimana yang terjadi pada Cina dan menyebabkan penurunan ekonomi negara kita.

Omnibus law hanya akan memperlebar kran investasi sementara keuntungan investasi lebih banyak diterima oleh investor. Negara yang menerima investasi lebih banyak mengalami rugi. Jadi jelas Omnibus Law bukanlah solusi.

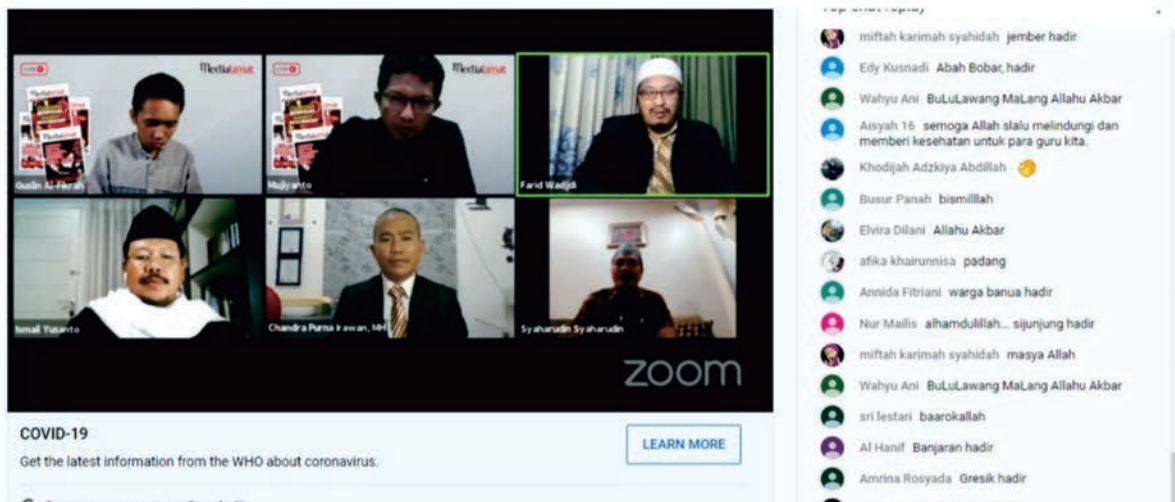
Bahkan, di tengah pandemi saat ini yang seharusnya semua pihak terutama penguasa fokus menanganinya, justru masih memaksakan untuk membahas RUU ini.

Intinya, penyebab RUU yang kontroversi terletak pada pembuatnya, yaitu manusia yang mereka terbatas akalnya, egois, dipenuhi hawa nafsu, dan kekurangan lainnya.

Jika dalam perekonomian hari ini yang menerapkan ekonomi kapitalis di mana negara banyak bertumpu pada pajak dan investasi asing baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun menciptakan lapangan kerja, Islam menetapkan hal yang jauh berbeda.

Dalam Islam pajak bukanlah sumber utama pemasukan negara. Pajak hanya akan ditarik oleh negara jika sumber utama berupa hasil pengelolaan SDA belum mencukupi kebutuhan negara. Penarikan pajak pun hanya bersifat temporal selama kas negara mengalami kekurangan. Penarikan pun tidak dipukul rata seluruh warga, melainkan hanya pada orang-orang yang mampu (kaya).

Islam memiliki dan mampu mengatasi segala permasalahan termasuk ekonomi ini. Tak perlu kita bingung mencari solusi karena sesungguhnya Allah telah memberikan solusi itu jauh-jauh hari. **Rini Sulistiawati. Bandung. +62 898-3321-xxx**



Tabloid Media Umat menggelar *Diskusi Media Umat: Karut-Marut Hadapi Wabah Corona*, Kamis (9/4/2020) malam di kanal Youtube *Media Umat*. Hadir sebagai pembicara: Ustadz Muhammad Ismail Yusanto; Salamuddin Daeng (Pengamat Kebijakan Ekonomi Publik); Ahmad Rusdan Handoyo Utomo (ahli *molecular medicine*); Syaharudin P Lani (Direktur Healthcare Professionals for Sharia/HelpSharia); Fahmi Amhar (ahli geospasial); dan Chandra Purna Irawan (Sekjen LBH Pelita Umat).[]

MediaUmat
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam

SMS/WA Berlangganan: 0857 1713 5759

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. **Penasihat Hukum:** Achmad Michdan, Ahmad Khozinudin. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Farid Wajidi. **Pemimpin Perusahaan:** Anwar Iman. **Redaktur Pelaksana:** Humaidi. **Redaksi:** Joko Prasetyo, Fatih Sholahuddin, Ghifari Ramadhan, Zulia Ilmawati, Kholda Naajiyah. **Desain dan Pracetak:** Senyum Adv. **Keuangan:** Ibnu Soetrisno. **Marketing:** Muhammad Ihsan. **Sirkulasi:** Yudi. **Iklan:** Haris. **Alamat Redaksi dan Iklan:** Menara 88 Casablanca, Tower A.10E. Jl. Raya Casablanca No.88, Jakarta Selatan. 12870. **Email:** pembaca.tabloidmu@gmail.com. **Email Iklan:** iklan.tabloidmu@gmail.com. **Email Marketing:** marketing.tabloidmu@gmail.com **Hunting Pemasaran:** 085711044000, SMS: 089650202478. **Hunting Iklan:** 085717135759. **Rekening:** Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SMS/WA Media Pembaca/Komentar untuk MU: 089634912651. Sertakan Nama dan Asal daerah.

Negara Jarkoni-Ngajar Ora Dilakoni

Kasus penanganan Covid-19 di negeri ini memang sangat memprihatinkan. Rakyat dibiarkan berjibaku sendiri melawan wabah. Rakyat diminta melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) namun tidak ada jaminan untuk kebutuhan pokok rakyat sehari-hari selama masa PSBB. Padahal rakyat di negeri ini sudah sangat patuh ketika harus membayar pajak, harus ikut BPJS, harus hidup hemat dan sederhana.

Tapi kenapa penguasa negeri ini masih membolehkan TKA masuk? Bahkan mau membebaskan para tahanan koruptor dengan alasan yang tidak masuk akal.

Terjadi kontra instruksi antara kepala daerah dengan pusat dalam penanganan wabah. Sangat disayangkan negeri kita yang katanya zamrud khatulistiwa karena memiliki kekayaan alam yang berlimpah tidak berani melakukan hal yang seharusnya untuk melindungi rakyatnya.

Sudah banyak dokter ahli yang meninggal karena covid 19, padahal untuk mencetak 1 dokter ahli butuh puluhan tahun. Kenapa negara kita tidak belajar dari negara-negara lain yang sudah berhasil dalam menekan angka korban?

Sebagai seorang Muslim dalam menghadapi wabah ini kita memang harus bersabar, namun negara juga harus bertanggung jawab dalam mengurus wabah ini agar tidak memakan korban lebih banyak.

Sebagai rakyat kita sudah nurut untuk tidak keluar kota. Dan negara juga harus menutup semua pintu masuk orang asing agar tidak menyebarkan virus juga.

Sebagai rakyat kita sudah menaati semua peraturan tapi kenapa negara malah tidak memihak rakyat?

Padahal Rasulullah telah mencontohkan bagaimana solusi Islam ketika ada wabah, Rasul juga sudah mencontohkan bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin suatu negeri. Bukankah Rasul SAW adalah uswatun hasanah?

Kenapa kita tidak kembali kepada apa yang sudah beliau contohkan? **Ummu Muhammad- Situbondo 089503609xxx**

Napi Dibebaskan di Tengah Wabah

Kemenkumham telah bebaskan 30.432 napi demi cegah corona. Hingga saat ini yang keluar dan bebas 30.432. Melalui asimilasi 22.412 dan integrasi 8.020 narapidana dan anak.

Program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi.

Seharusnya napi dibiarkan di dalam penjara, bukankah itu lebih aman terisolasi daripada dikeluarkan akan terinfeksi virus corona. Kalau pun akan dikeluarkan seharusnya, ustadz Abu Bakar Basyir yang memang rentang juga dikeluarkan bukan hanya napi dan koruptor.

Ini adalah ketidakadilan rezim saat ini. Tidak bisa membedakan mana benar dan mana salah, mana bahaya dan yang mana tidak. Asal menguntungkan pihaknya, maka pakai cara dan alasan yang tidak tepat. Sifat kapitalis yang menghitung untung tanpa memikirkan bahaya terhadap napi dan masyarakat. Jika napi diurus aqidah dan keimanannya masih bisa kita anggap napi insyaf, namun kalau mereka tidak insyaf, maka keluar penjara akan bertambah canggih tingkat kejahatannya. Ini menjadikan masyarakat resah dengan napi yang bebas.

Maka hanya hukum Islam saja yang bisa membuat efek jera terhadap para napi. Namun hanya bisa diterapkan dalam naungan khilafah sesuai aturan Alquran dan as sunnah. **Putri. Palembang.+6289515927xxx**



Pandemi Covid-19 sangat mengkhawatirkan Barat akan menggoyahkan dominasi kapitalisme secara global. Henry Kissinger, politisi senior Amerika yang berpengalaman, menegaskan akan terjadi perubahan tatanan dunia akibat wabah ini. Kissinger mengingatkan Amerika harus menjaga agar nilai-nilai kapitalisme dan karakternya tetap bisa dipertahankan dunia. Mantan menteri luar negeri Amerika ini pun mewanti-wanti agar Barat serius menangani bakal meluasnya anti kapitalisme di dunia. Peradaban kapitalisme sebenarnya sejak lama diprediksi banyak pihak akan tumbang. Bahkan presiden di masa-masa awal Amerika sudah mengingatkan hal ini. John Adams (presiden ke-2 Amerika) menyatakan: *Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide.* (Ingatlah, demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri; demokrasi pasti akan bunuh diri).

Dalam bukunya *Dark Ages America: The Final Phase of Empire* (2006). Moris Berman menyebutkan Imperium Amerika segera akan rubuh. Ia menggambarkan Amerika sebagai sebuah kultur dan emosional yang rusak oleh peperangan, menderita karena kematian spiritual, dan dengan intensif mengeskpor nilai-nilai palsu ke seluruh dunia dengan menggunakan senjata. Republik yang berubah menjadi imperium itu berada di dalam zaman kegelapan baru dan menuju rubuh sebagaimana dialami Kekaisaran Romawi.

Hanya saja Amerika sebagai panglima kapitalisme global akan berusaha keras untuk mempertahankan dominasinya. Sampai pada titik hidup dan mati, Amerika akan melakukan apapun untuk menyelamatkan kapitalisme, meskipun sebenarnya mereka tidak yakin.

Lantas faktor apa yang menyebabkan jatuh bangunnya peradaban dunia. Faktor yang paling mendasar adalah sejauh mana rakyat dan elite politik, negara itu memegang teguh ideologinya.

Uni Soviet runtuh karena rakyat dan para politisinya tidak lagi melihat komunisme sesuatu yang mereka harus pertahankan. Mereka mulai melirik kepada kapitalisme. Sama halnya dengan keruntuhan khilafah, terjadi saat umat Islam saat itu, tidak lagi berpegang teguh pada ideologi Islam. Mereka mulai terpicat dengan ide-ide liberal yang saat itu, memang sedang mengalami masa kebangkitan (Renaissance). Sebaik apapun ideologi Islam, kalau pemeluknya tidak lagi terikat padanya, maka peradaban Islam akan runtuh. Demikian pula kapitalisme, kalau rakyatnya tidak lagi mendukung, maka dipastikan peradaban Barat akan hancur.

Faktor lain adalah kemampuan negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar rakyatnya. Seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan vital manusia seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Termasuk memberikan kesempatan luas untuk rakyat meraih kebutuhan sekunder mereka. Wabah Corona ini membawa Amerika pada titik kritis ini. Kalau Amerika gagal, dipastikan peradaban ini akan mengalami goncangan keras.

Di samping itu kekuatan negara ideologis tergantung kepada kemampuannya untuk memimpin dunia dengan ideologinya. Amerika selama ini 'berhasil' memimpin dunia, karena bisa memaksakan kapitalisme kepada dunia. Amerika membangun imperium kapitalisme dengan organ-organ yang diklaim milik dunia seperti PBB, IMF, Bank Dunia. Mereka pun membuat aturan-aturan kapitalisme atas nama masyarakat internasional. Karena itu, kalau dunia, pada akhirnya menolak dominasi kapitalisme ini, maka umur peradaban kapitalisme tidak akan lama.

Faktor yang tak kalah penting adalah munculnya negara baru dengan ideologi baru yang menawarkan perubahan. Secara historis, keruntuhan khilafah sebagai negara adi daya tidak bisa dilepaskan dengan kemunculan negara-negara bangsa di Barat yang saat itu mengalami masa keemasannya. Negara-negara ini kemudian bersatu melemahkan khilafah. Ini pulalah yang sekarang ini sangat ditakutkan Amerika dan sekutunya, akan kebangkitan negara khilafah.

Sebab dengan adanya negara khilafah, syariah Islam akan dengan nyata dan gamblang tampak keunggulannya, karena diterapkan secara langsung. Negara adi daya baru ini, yang didasarkan pada ideologi Islam, akan menjadi mercusuar baru dunia. Karena mampu secara manusiawi memecahkan persoalan-persoalan manusia. Khilafah pun akan dengan jelas bisa menunjukkan bagaimana sistem politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan yang didasarkan pada Islam, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dunia saat ini. Saat itulah, peradaban kapitalisme, akan ditinggalkan dunia, bahkan bisa jadi ditinggalkan oleh rakyatnya sendiri. Itulah saat cahaya Islam memasuki benua Amerika dan Eropa, bukan sekedar agama ritual, tapi sebuah peradaban yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Itulah saat janji Allah dan Rasul-Nya bahwa Islam akan meliputi dunia dari ujung yang satu ke ujung lain, akan tampak jelas. Rasulullah SAW bersabda: *"Sungguh perkara ini akan sampai ke seluruh dunia sebagaimana malam dan siang. Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun baik di kota maupun di desa kecuali Allah akan memasukkan agama ini dengan kemuliaan yang dimuliakan atau kehinaan yang dihinakan: kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam dan kehinaan yang dengannya Allah menghina-dinakan kekufuran."* (HR Ahmad no: 16344 dan al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra). Allahu Akbar! **farid wadjdi**

Redaksi menunggu opini dan pertanyaan Anda terkait perkembangan peristiwa terbaru di sekitar kita. Kirimkan komentar Anda via HP yang tercantum atau ke pembaca.tabloidmu@gmail.com



Data Gak Jelas, Corona Makin Ganas

Hingga tulisan ini dibuat, belum ada tanda-tanda wabah corona mulai meninggalkan negeri ini. Justru muncul kekhawatiran akan terjadi ledakan jumlah korban Covid-19, mengingat banyak orang kurang begitu percaya dengan data-data yang dipublikasikan oleh pemerintah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri mengisyaratkan adanya ketidaksinkronan antara data pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada dua data. Data itu dua-duanya ada di tangan lembaga yang menangani musibah ini. Mereka tak berani mempublikasikan data dari daerah. Hanya data resmi pemerintah pusat saja yang dipakai.

Pasti masyarakat bertanya-tanya, ada apa? Tapi kalau mengikuti proses bagaimana pemerintah mengambil kebijakan dalam penanganan Covid-19 ini, sebenarnya sudah bisa dibaca. Sejak awal pemerintah tidak mau mempublikasikan data semuanya. Ada data-data yang dirahasiakan. Tentu ada kepentingan di dalamnya. Bisa kepentingan korban sendiri, juga kepentingan yang lebih luas menyangkut ekonomi dsb.

Banyak pihak khawatir, data di lapangan jauh dari yang setiap hari disampaikan ke publik. Kasus di DKI Jakarta saja bisa menjadi acuan adanya kemungkinan itu. Maka tak heran, seorang dokter di Malaysia Musa Mohd Nordin menggegerkan dunia maya dengan pernyataannya. Konsultan Spesialis Pediatri dan Pengobatan di Rumah Sakit KPJ Damansara itu menyatakan bahwa Indonesia adalah bom waktu bagi wabah virus corona (Covid-19).

"Saya khawatir dengan Indonesia. Indonesia adalah bom waktu. Kami tidak mengerti lagi," katanya kepada Astro AWANI, kanal berita Malaysia. Ia menyarankan kepada Dewan Keamanan Nasional (MKN) Malaysia "agar kita menjaga perbatasan kita atau itu akan menjadi cluster baru dari COVID-19."

Kekhawatiran itu cukup berasal. Selama ini pemerintah seperti tergopoh-gopoh ketika menghadapi pandemi ini. Kaget, ternyata rumah sakit-rumah sakit tidak memiliki Alat Perlindungan Diri (APD). Kaget, ternyata masker tidak ada di pasaran. Bahkan tim medis sendiri sampai kesulitan mendapatkan baran tersebut. Kalau ada, harganya selangit.

Ada yang bilang, memang pemerintah tak punya data pasti sebab kapasitas tes bagi orang yang diduga terjangkiti Covid-19 masih sangat minim. Sangat mungkin, korban sudah tewas terlebih dahulu sebelum tes dilakukan. Di sisi lain, mungkin banyak orang yang tidak memiliki akses ke rumah sakit. Yang paling berbahaya jika datanya ada tapi sengaja tidak dipublikasikan karena alasan bisa membuat masyarakat panik dan mengganggu stabilitas ekonomi dan investasi.

Padahal semua orang tahu, akurasi data adalah kunci bagi pengambilan kebijakan. Masukan data yang salah pasti akan menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Karenanya, masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri mendesak pemerintah agar transparan dalam menyampaikan data Covid-19 ini. Presiden Jokowi akhirnya meminta seluruh sektor memberikan dan membuka data Covid-19 ini dengan jelas.

Sekarang, tinggal menunggu realisasinya. Apakah itu benar-benar terwujud atau sekadar bunga-bunga di tengah keprihatinan? **emje**



Gak Jelas!

Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait dengan data Covid-19 yang menjadi sorotan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mereka semua berpandangan sama, pemerintah Jokowi tidak transparan.

Ia meminta agar seluruh data terkait pandemi Covid-19 di Indonesia dapat terpadu dan terbuka sehingga semua orang dapat mengakses data tersebut. "Berkaitan dengan data dan informasi, saya minta data dan informasi terintegrasi semua kementerian masuk ke Gugus Tugas," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Senin (13/4).

Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam "video conference" terbatas dengan tema "Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

"Sehingga semua informasi ada baik mengenai jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) di daerah, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semua menjadi jelas dan terdata dengan baik," ungkap Presiden.

Jokowi meminta data itu

diperbaharui setiap hari dan lebih terpadu. "Harusnya ini setiap hari bisa 'diupdate' dan bisa lebih terpadu. Sekali lagi data terpadu ini menyangkut PDP, ODP, positif, kemudian yang sembuh, yang meninggal, jumlah yang di-PCR berapa ada semua dan terbuka semua sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," tegas Presiden.

Terbongkar

Transparansi data ini mengemuka belakangan setelah ada pengakuan yang menggegar dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Dalam diskusi virtual Ahad (5/4) ia membenarkan jika data kasus positif virus Corona penyebab Covid-19 yang selama ini disajikan pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah.

Ia berdalih asupan data dari Kementerian Kesehatan juga terbatas. Namun, Gugus Tugas tetap mengacu pada data Kementerian Kesehatan. "Kami dapat *feeding* data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka," katanya.

Agus menjelaskan, BNPB kini membangun aplikasi Lawan Covid-19 yang nantinya digunakan untuk menampung data terkait kasus positif. Harapannya, bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di la-

pangan.

"Kami kerahkan banyak tenaga baik dari BNPB, BPBD, termasuk militer dan polisi untuk *entry* data di seluruh Indonesia dan nanti *connect* ke aplikasi," ujarnya.

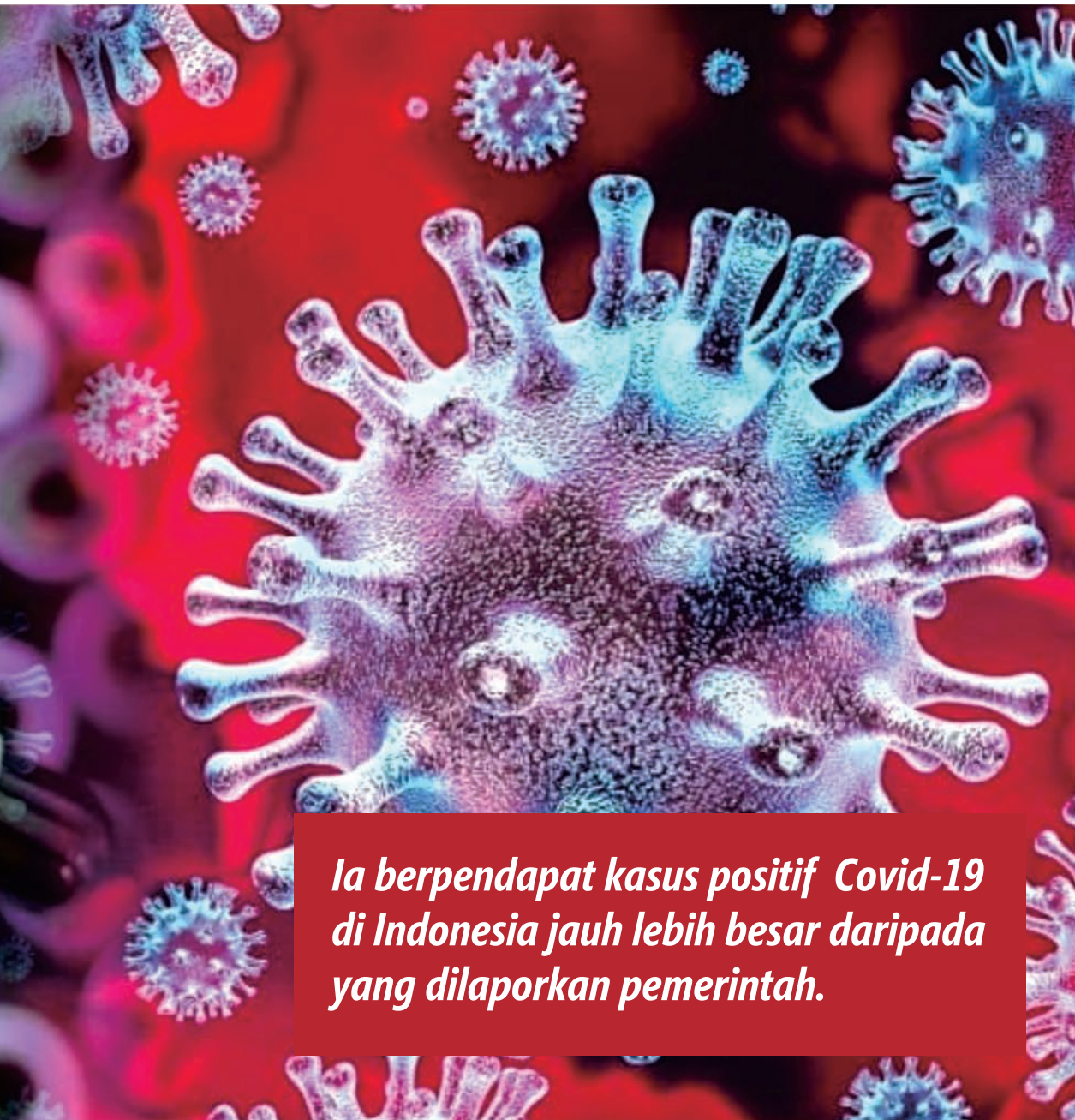
Agus mengamini pula jika data antara pemerintah pusat dan daerah terkait Covid-19 tidak sinkron. Tapi ia mengaku tidak tahu pangkal masalahnya.

Ia mengungkapkan, BNPB bekerja di belakang layar mencatat semua laporan terkait kasus penyakit Covid-19 itu dari seluruh daerah. Namun pihaknya tidak bisa memublikasikannya karena bukan juru bicara pemerintah.

"Kami punya data dua-duanya. BNPB kumpulkan data dari daerah dan Kemenkes, kami sandingkan. Tapi karena jubirnya Pak Yuri, jadi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kami publikasikan," kata Agus.

Ketidaksinkronan data ini mengemuka ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan fakta tentang pemulasaran dan pemakaman dengan menggunakan prosedur tetap (Protap) Covid-19 di Jakarta selama Maret 2020. "Sejak tanggal 6 itu mulai ada kejadian pertama sampai dengan kemarin tanggal 29, itu ada 283 kasus," kata Anies (30/3).

Sementara data yang diumumkan pemerintah pusat, jumlah orang yang meninggal karena Covid-19 di DKI Jakarta



la berpendapat kasus positif Covid-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah.

hingga 29 Maret hanya 67 orang. Angka 283 ini kemudian banyak menjadi perbincangan di tingkat masyarakat maupun kalangan media.

Sebagai catatan, Protap Covid-19 terkait pemulasaraan dan pemakaman itu termasuk membungkus jenazah dengan plastik, dibawa dengan peti, dan harus dimakamkan kurang dari empat jam. Petugasnya juga menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD).

Dalam keterangannya, Anies menyebutkan kalimat kunci. Kalimat tersebut sebagai berikut: "Artinya, ini adalah mungkin mereka-mereka yang belum sempat dites, karena itu belum bisa disebut sebagai positif atau sudah dites tapi belum ada hasilnya, kemudian wafat."

Jika yang dimaksud Anies adalah *suspect* yang belum dites, maka angka 283 korban meninggal tersebut jadi masuk akal karena terdapat kemungkinan kasus negatif Covid-19 di dalam angka tersebut.

Apa yang dikemukakan Anies ini seolah menjawab pertanyaan publik sebelumnya tentang apakah data yang dikemukakan oleh pemerintah selama ini valid atau tidak.

Janggal

Penggagas gerakan Kawal Covid-19, Ainun Najib, mendesak pemerintah terbuka soal data kasus positif. Menurutnya, dengan

data yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

la berpendapat kasus positif Covid-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. la khawatir data yang ditutupi akan membuat masyarakat menjadi lengah.

Ainun menegaskan ada problem besar dari data nasional yang disampaikan oleh Kemenkes atau pemerintah pusat. Tingkat validitas data itu dipertanyakan. Sebab belakangan, per hari, konsisten terdapat 100 kasus baru positif terjangkit Covid-19. Padahal sudah ada 14 laboratorium untuk tes Covid-19 di berbagai daerah.

"Kenapa Kemenkes tidak menggunakan hasil tes dari laboratorium daerah maupun dari *rapid test* pemerintah daerah untuk menjadi angka resmi?" tanya Ainun seperti dikutip *tirto.id*.

la juga menegaskan, keterbukaan data terkait Covid-19 itu sangat penting. Salah satunya agar tidak ada tindakan yang salah untuk merespons atau mengendalikan virus tersebut. "Padahal tanpa kita transparan soal data. Kita mesti waspada atau tidak? Jangan-jangan masyarakat Indonesia malah *nyantai* karena sudah melandai tiap hari cuma 100," kata Ainun.

Tak terlalu aneh jika sejak awal dunia internasional meragukan data orang terpapar Covid-19 di Indonesia. Wakil Ketua Ba-

dan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, sebaran wabah virus ini mungkin sudah meluas di Tanah Air, namun pemerintah menyembunyikan sebagian data tersebut. Mereka yang dalam status orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) jumlahnya bisa lebih banyak daripada yang dirilis Pemerintah.

Menurutnya, Indonesia bisa menyaingi Iran dan Italia dalam jumlah korban yang terpapar virus Covid-19. "Australia menduga Indonesia melakukan *under-reporting* atas jumlah pasien terjangkit Covid 19. Apa yang dilaporkan lebih sedikit dari kenyataan. Australia pun menyetop penerbangan Bali-Australia dan melarang warganya berkunjung ke Bali. Pemerintah perlu menjelaskan hal ini kepada publik," tegas Hafisz dalam rilisnya, Selasa (7/4).

Desakan

Lembaga pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Human Rights Watch menilai pemerintah Indonesia gagal menyediakan akses dan transparansi informasi kepada publik mengenai pencegahan wabah Covid-19.

"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak atas informasi dan memberikan statistik yang akurat kepada publik," kata peneliti Human Rights Watch, Andreas Harsono, Sabtu (11/4) di

Jerit Tangis Tenaga Medis

Pengurus pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait penanganan pemerintah menghadapi wabah Corona, Sabtu (11/4).

Mereka meminta Presiden memperhatikan tenaga medis yang harus berjuang menangani pasien Covid-19 dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seadanya, bahkan di antaranya menggunakan plastik jas hujan.

"Haruskah mereka bertaruh nyawa dengan APD seadanya, mereka melawan musuh yang tidak kelihatan dengan balutan plastik yang sama dengan yang pernah Yang Mulia Bapak Presiden kenakan saat puluhan kamera mengabadikan Bapak di tengah rinai hujan. Ya, dengan memakai plastik jas hujan saja," tulis surat terbuka itu.

"Yang Mulia Bapak Presiden lupakan perkataan menterimu bahwa 'corona penyakit yang sembuh sendiri'. Lupakan ucapan menteri mu bahwa harga APD tinggi karena 'salahmu kok beli'. Lupakan janji menteri mu bahwa pada 31 Maret 2020 ada 4,7 juta masker produksi BUMN siap disebar ke seluruh negeri, yang belakangan diakui 'belum ada BUMN produksi APD'."

"Lakukanlah sebanyak-banyaknya tes antigen corona virus, temukan sebanyak-banyaknya rakyatmu yang terpapar virus corona, amankan, ambil dan lakukanlah layanan kesehatan yang sesuai standar. Siapkanlah sebanyak-banyaknya Rumah Sakit, sehingga tidak akan ada satu orang pun yang kesulitan mencari rumah sakit hingga terkapar tak terobati."

"Jangan ada di kemudian hari di kedukaan abad ini akan mencatat namamu sebagai pemimpin yang terlena dan tak berdaya menghadapi corona. Jangan ada cerita pada cucu cicitmu nanti, negara ini kalah di kala dipimpin kakek buyutnya yang tak siaga melawan corona," tutup surat itu. []
emje

Jakarta.

HRW berasal, *pertama*, pemerintah Indonesia mengakui tidak membuka semua data mengenai penyebaran virus Corona di Indonesia. *Kedua*, adanya pengakuan data tidak sinkron dari BNPB antara pemerintah pusat dan daerah. *Ketiga*, Gubernur DKI Jakarta mencurigai bahwa jumlah kasus terinfeksi Covid-19 ada banyak, namun tak terdeteksi karena rendahnya kapasitas pengujian.

Andreas menilai, jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia juga belum jelas. Sebab, pada 7 April lalu, pemerintah mengumumkan ada 2.491 kasus positif dengan 209 kematian dan melakukan pengujian terhadap 13.186 orang sejak 30 Desember 2019, termasuk para awak kapal pesiar World Dream dan Diamond Princess. Namun, pada 6 April, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI mencatat ada 639 orang dimakamkan dengan protokol Covid-19. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang diduga menderita Covid-19 meninggal tanpa diuji.

Sebelumnya, berbagai kalangan meminta pemerintah pusat transparan. Gubernur Anies sendiri mengatakan kepada Deddy Corbuzier di kanal YouTube. "Apa pelajaran penting dari negara yang mengalami (pandemi corona) ini? Nomor satu, transparan, ini bukan aib penyakit ini. Ini bukan karena kelakuan, tapi justru orang yang pergaulannya luas yang ramah itu dia yang banyak

kena," ujar Anies, Rabu (1/4).

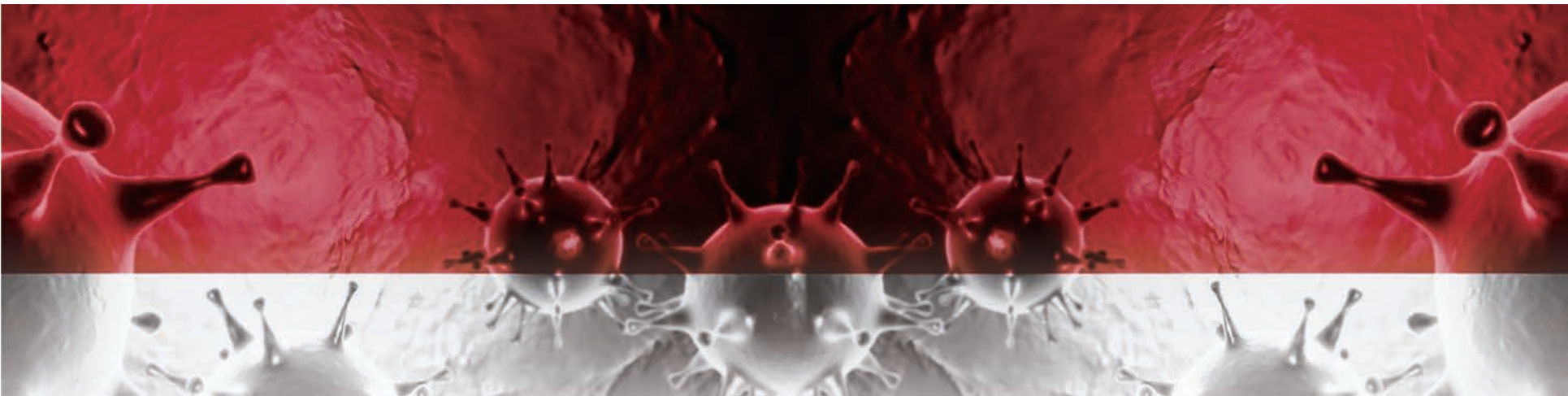
Menurutnya, dengan transparansi data pasien positif, hal itu akan dengan mudah memberikan informasi kepada orang-orang yang pernah berinteraksi. Dengan begitu, persebarannya dapat ditekan. "Jadi transparansi siapa positif segera dikabari supaya dia mengabarkan kepada mereka yang berinteraksi, kalau terlambat fatal. Transparansi," ucapnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pun meminta pemerintah pusat Presiden Joko Widodo membuka data zona merah virus Corona. "Tapi *kan* pemerintah tidak mau menjawab (zona merah) itu mana saja. Sedangkan bagi kami itu (penting) untuk menyusun kebijakan. Itu," ujar Sultan kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Yogyakarta, Senin (30/3) seperti dikutip *detikcom*.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun berteriak terkait data Covid-19 ini terutama dikaitkan jumlah tenaga kesehatan yang jadi *suspect* dan positif Covid-19. Sekretaris Satgas Covid-19 IDI, Dyah Agustina mendorong pemerintah untuk memberikan data tenaga kesehatan terkait.

"Itu yang kami minta adanya transparansi itu seperti itu. Jadi sampai saat ini itu kita merabara semua dan mencari data masing-masing," katanya.

Kapan kejelasan itu datang? []
emje



Mengapa Disembunyikan?

"Langkah pertama yang salah adalah ketika data dirahasiakan. Yang kedua adalah pemeriksaan tidak masif, akhirnya penyebaran pandemi ini semakin meluas."

Sejak awal 'ditemukan-nya' pasien positif Covid-19, pemerintah Indonesia sudah membata-asi diri untuk membu-ka data ke publik. Mengapa? Ka-re-na ini adalah 'instruksi' Presiden Jokowi.

"Sebetulnya kita inginnya menyampaikan, tapi kita juga ber-hitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh," begitu kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3).

Alasan lainnya, kata Jokowi, pemerintah juga tidak ingin mem-berikan dampak buruk kepada pasien. Oleh karena itu, mantan Wali kota Solo itu menyebut kalau Indonesia berbeda dengan nega-ra lain. "Setiap negara memiliki *policy* yang berbeda-beda tetapi yang jelas setiap ada kasus baru pasti tim reaksi cepat langsung memagari hal itu," kata Jokowi.

Inilah mengapa, menurut

pegiat media sosial M Said Didu, ada data yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. "Saya pikir anak buah Presiden masih berpegang pada arahan yang lama (untuk merahasiakan data)," katanya kepada *Media Umat*.

Selain itu, menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu, mungkin data yang dimiliki pe-merintah tidak sesuai karena tidak cukup alat untuk melakukan tes. Dan, ada beberapa orang yang mengalami gejala corona tetapi tidak punya akses ke rumah sakit. "Tiga hal itu menjadi faktor penye-babnya," jelasnya.

Padahal, kata Said, pembe-rantasan pandemi corona ini ha-nya bisa dilakukan dengan me-mutus siklus, karena sampai seka-rang belum ditemukan obatnya. Pemutusan siklus dapat dilakukan apabila *carier* (orang yang mem-bawa virus corona) diketahui se-hingga bisa diisolasi agar tidak menyebarkan ke orang lain.

"Langkah pertama yang sa-lah adalah ketika data dirahasia-kan. Yang kedua adalah pemerik-saan tidak masif, akhirnya penye-baran pandemi ini semakin me-luas," jelasnya.

Kemungkinan lain adalah menahan data sehingga data yang muncul ke publik tidak me-lonjak. Aparatur negara berusaha membuat atasan mereka senang karena agar dianggap proses pe-nanganan wabah ini berhasil.

Sikap asal bapak senang (ABS) di jajaran pemerintah ini diakui sendiri keberadaannya oleh Presiden Jokowi. "Seringkali birokrasi melaporkan bahwa pro-gram sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya "Program su-dah terlaksana Pak," ujar Jokowi sesaat setelah dilantik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019).

Investasi

Di sisi lain, rezim Jokowi tam-pak sekali berusaha agar wabah Covid-19 ini tidak membuat inves-tor asing takut menanamkan in-vestasinya di Indonesia dan yang sudah ada sebelumnya tidak lari dari Indonesia.

Inilah mengapa rezim Joko-wi merendahkan pemodelan yang dilakukan oleh para ahli dengan berbagai alasan. Para ahli memprediksi wabah Covid-19 ini akan meluas dengan jumlah kor-ban yang sangat banyak jika pe-merintah tak melakukan inter-vensi secara masif, termasuk mela-kukan karantina wilayah atau yang dikenal sebagai *lockdown*.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan —bukan Menteri Kesehatan— meremehkan prediksi para ahli. Ia mengklaim kondisi cuaca Indo-nesia cukup ampuh menekuk virus corona atau Covid-19. "Dari hasil *modelling*, cuaca Indonesia yang panas dan *humidity* tinggi

maka untuk Covid-19 itu *enggak* kuat," ucap Luhut dalam siaran *live* sekretariat kabinet, Kamis (2/4).

Makanya, ia menolak *lock-down* agar ekonomi tidak mati sama sekali. Lantas ia meng-usulkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo. Luhut mengklaim Jokowi mampu mencerat situasi nasional dengan jernih, sehingga tidak memutuskan *lockdown*. Sebelumnya, Luhut meyakinkan proyek-proyek investasi tetap berjalan meski penyebaran virus corona (Covid-19) masih terjadi.

Dari sini bisa dipahami keti-ka pemerintah pusat menolak rencana karantina wilayah yang pernah diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di saat awal pandemi. Anies yang memegang data wilayah lang-sung mengambil kebijakan meli-burkan sekolah dan mengimbau orang agar bekerja di rumah. Na-mun, langkah itu 'dijegal' pe-merintah pusat dengan dalih kewe-nangan. Akhirnya, baru belakang-an pemerintah pusat mengizin-kan DKI Jakarta melakukan Pem-batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di saat korban sudah ba-nyak berjatuhan.

Bahaya Salah Data

Ronald Coase mengatakan: "Jika Anda menyembunyikan data dalam waktu lama, ia akan meng-aku (terbukti) pada saatnya."

Pada ahli manajemen per-caya, data adalah landasan mem-buat kebijakan. Bila data yang digunakan salah, dapat dipastikan lahir kebijakan yang salah.

Fadli Zon, anggota DPR, pernah menyampaikan, sulit me-rumuskan kebijakan publik yang benar jika tak memegang data akurat dalam persoalan-persoal-an penting yang hendak dipecah-kan.

Sebuah artikel berjudul: "Delusi Statistik Covid-19 Indone-sia" yang dimuat di laman *pinter-politik.com* menyebut, bahaya

yang mungkin muncul karena 'permainan' data tersebut. Me-ngutip, Timur Kuran dan Cass Sunstein dalam publikasinya ber-judul "*Availability Cascades and Risk Regulations*", ketidakterbu-kaan data atau tidak transparan-nya kebijakan pemerintah mem-buat rakyatnya rentan mengalami mispersepsi dan di saat yang sama meningkatkan risiko konflik sosial.

Implikasi dari ketidakter-bukaan pemerintah yang disebut-kan oleh Kuran dan Sunstein, me-nurut tulisan itu, tampaknya telah terjadi di Indonesia menyusul dengan merebaknya pandemi Covid-19. Implikasi pertama telah terjadi bahkan ketika pemerintah justru mengeluarkan kebijakan insentif pariwisata di saat Covid-19 telah terkonfirmasi di Indone-sia, yang membuat masyarakat tidak memiliki kesadaran dan antisipasi lebih dan berakibat mis-persepsi akut di waktu-waktu berikutnya.

Ketika pemerintah Indone-sia menginisiasi *social distancing* serta imbauan aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah bagi seluruh masyarakat Indone-sia. Kombinasi menyepikan pandemi oleh pemerintah di awal penyebaran serta rendahnya ting-kat kesadaran masyarakatnya telah menciptakan mispersepsi di tengah masyarakat yang *notabe-ne* dipengaruhi oleh gestur dan kebijakan pemerintah itu sendiri.

Dalam konteks hukum, pe-nyembunyian data bisa dianggap sebagai tindak melanggar hukum sebab UU mengamanatkan kepa-da negara untuk memberikan in-formasi akurat kepada masyara-kat. Kalau tidak, pemerintah dapat dianggap telah lalai dalam men-jamin hak atas informasi masya-rakat dan dalam skala lebih luas dapat berpotensi melanggar hak atas kesehatan. Mengapa? Kare-na, tidak adanya transparansi itu menyebabkan jatuhnya korban jiwa. **emje**

Pandemi, Masyarakat Butuh Informasi

Penulis dan sejarawan Yuval Noah Harari di *times.com* menulis: "Pertahanan terbaik manusia terhadap virus bukanlah isolasi, melainkan informasi."

Yuval bercerita dalam artikelnya, ketika wabah hitam terjadi, orang-orang tetap pergi ke pasar, tetap berlayar, dan terus-menerus menularkan virus tiada henti. Bukan karena tidak patuh terhadap pemimpin tertinggi, tapi memang mereka punya keterbatasan informasi. Mereka tak mengenal musuh yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak tahu senjata apa yang harus mereka gunakan. Kuncinya adalah pada informasi.

Yuval mengatakan, "Begitu para ilmuwan memahami apa yang menyebabkan epidemi, menjadi lebih mudah untuk melawannya. Vaksinasi, antibiotik, peningkatan kebersihan, dan infrastruktur medis yang jauh lebih baik telah memungkinkan umat manusia untuk unggul dari predator yang tidak terlihat." **emje**



Membungkam Suara Kritis

"Kalau tidak ada kritik kebijakan, potensial tidak tepat lebar. Dan ini tidak sehat bagi demokrasi kita."

Muhammad Said Didu harus menerima kenyataan. Ia dilaporkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ini gara-gara Said mengunggah video yang mengkritisi kebijakan pemerintah, menyangkut penanganan wabah Covid-19.

Video yang diunggah di YouTube itu berjudul: "Luhut: Uang, Uang dan Uang" itu dianggap menyudutkan sang menteri. Sebab, ada satu bagian yang menyatakan Luhut mementingkan keuntungan pribadi saja tanpa memikirkan penanganan virus corona.

"Bila dalam dua kali 24 jam tidak minta maaf maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," ujar Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, melalui keterangan tertulis, Jumat (3/4).

Said Didu kemudian melayangkan surat klarifikasi. Menurut rutunya, video itu adalah ulasan analisis prioritas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi corona (Covid-19). "Pernyataan saya bahwa Pak Luhut hanya memikirkan uang, uang dan uang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari analisis tersebut," jelasnya.

Tentang Sapta Marga, Said mengatakan bahwa "Pernyataan saya terkait dengan Sapta Marga yang secara jelas saya katakan bahwa 'semoga terbesit kembali sapta marga' merupakan harapan kepada Bapak sebagai Purnawirawan TNI bahwa dengan jiwa sapta marga pasti akan memikirkan rakyat, bangsa, dan negara."

Tapi Luhut bergeming. Ia akan tetap melaporkan Said Didu ke kepolisian. "Pak Luhut sudah baca. Tidak ada komentar apa-apa. Saya tanyakan apakah dilanjut proses hukumnya, jawabnya iya," kata Jodi Mahardi, Rabu (8/4).

Sebelumnya kepolisian menangkap Ali Baharsyah, aktivis dakwah, karena mengunggah video di YouTube yang dianggap menghina Jokowi. Ali dilaporkan oleh pendukung Jokowi yakni Muannas Alaidid ke Bareskrim Polri pada Rabu (1/4) lalu. Ali Baharsyah dilaporkan atas tuduhan penyebaran ujaran kebencian dan hoaks soal kebijakan darurat sipil dalam penanganan virus corona (Covid-19). Dalam laporan itu Muannas melampirkan barang bukti 5 lembar tangkapan layar dan 1 unit USB berisi rekaman video Ali Baharsyah.

Menuju Represif?

Sementara itu Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Telegram (ST) terkait penanganan para penyebar hoaks dan penghina presiden saat pandemi virus corona atau Covid-19. Hal tersebut demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama menghadapi bencana non-alam tersebut.

Surat Telegram itu bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tanggal 4 April 2020. Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Beberapa poin dalam surat itu antara lain penyebaran berita bohong alias hoaks terkait virus corona Covid-19, penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah, dan penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara online.

"Laksanakan penegakan hukum secara tegas," bunyi kutipan surat telegram tersebut.

Penyebar hoaks terkait corona dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 akan dikenai Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kemudian untuk kasus

penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah dikenakan Pasal 207 KUHP. Sementara untuk penipuan penjualan alat kesehatan lewat online terancam Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Kepolisian mengaku telah menangani berita bohong alias hoaks terkait virus corona atau Covid-19 sebanyak 72 kasus hingga Jumat (3/4).

Sementara itu anggota Komnas HAM Choirul Anam meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto segera menyusun dasar hukum yang jelas bagi pelaksana teknis seperti Polri di lapangan.

Ia menyoroti, sejumlah tindakan Polri seringkali tidak berdasarkan hukum yang jelas, seperti menangkap orang yang melawan ketika dibubarkan saat berkerumun.

Selain itu, penjelasan PP tersebut juga harus merinci penghinaan presiden atau pejabat pemerintah yang semacam apa yang dianggap sebagai penghinaan sehingga tidak multitafsir ketika kritik dianggap menghina.

"Kritik kebijakan penting dalam situasi apapun, bahkan dalam kondisi darurat ini. Karena akan menguji apakah kebijakan yang telah diambil tepat atau tidak. Kalau tidak ada kritik kebijakan, potensial tidak tepat lebar. Dan ini tidak sehat bagi demokrasi kita," tulis Choirul.

Kritis

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto menyayangkan kebijakan rezim Jokowi yang berusaha membungkam kritik dari masyarakat. Menurutnya, pemerintah harusnya tetap fokus menangani wabah ini.

Ia berpandangan, kiritik harus dianggap sebagai sumbangsih publik terhadap kinerja pemerintah. Dengan kritik diharapkan

bisa memacu pemerintah bekerja lebih baik lagi. "Kalau kritisme dianggap sebagai kejahatan dan tidak ada lagi yang mengkritik pemerintah, sementara aparat di bawah takut menyampaikan apa yang sebenarnya, ABS, maka pemerintah tidak akan pernah tahu apa kekurangan, kelemahan dan kesalahan dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Ini sangat berbahaya," paparnya.

Ismail mengingatkan, wabah Covid-19 ini taruhannya sangat besar karena menyangkut

jiwa manusia. Pemerintah harus banyak mendengar, bahkan termasuk suara dari luar Indonesia. Misalnya suara seorang dokter dari Malaysia yang bilang Indonesia bisa menjadi bom waktu pandemi Covid-19 kalau penanganannya seperti sekarang.

Ismail juga mengingatkan, masyarakat jangan berhenti mengkritik karena kritik adalah bagian dari amar makruf nahi munkar. "Ini sesungguhnya sangat diperlukan," jelasnya. **emje**

Penguasa Anti Kritik

Islam telah mengajarkan bagaimana penguasa menghadapi rakyat. Seorang penguasa atau pemimpin tetaplah manusia biasa, bukan seperti seorang rasul yang maksum/bebas dari kesalahan. Sebagai manusia biasa, dia tetaplah punya potensi untuk berbuat salah. Apalagi kekuasaan termasuk godaan besar bagi manusia, yang bisa mendorong pemegangnya untuk berlaku korup bahkan lalim dan diktator.

Pemimpin dan penguasa dengan kesadaran seperti itu tidak akan memosisikan diri sebagai junjungan rakyat. Sebaliknya, akan mudah bagi dirinya untuk memosisikan diri sebagaimana yang dinyatakan di dalam riwayat Abu Nu'aim, yakni bahwa pemimpin satu kaum adalah pelayan mereka.

Dengan kesadaran itu pula, pemimpin dan penguasa itu tidak akan menganggap dirinya selalu benar. Sebaliknya, dia sadar betul mungkin saja berbuat buruk dan salah. Kesadaran demikian niscaya melahirkan sikap yang tampak dalam ucapan Abu Bakar ash-Shidiq selanjutnya, "Jika aku berbuat baik maka tolonglah aku. Jika aku berbuat buruk maka luruskan aku."

Kesadaran dan pernyataan demikian akan menjauhkan dukungan yang membabi buta dari para pendukung. Pemimpin dengan kesadaran ini justru akan mendorong para pendukungnya untuk tetap bersikap kritis kepada dirinya. Dengan kesadaran itu, tidak akan muncul sikap menikmati, membenarkan apalagi memfasilitasi bahkan membuat pasukan *buzzers* untuk membela dan mendukung apapun kebijakan dan tindakannya sekalipun dengan membuat dan menyebarkan hoaks.

Perlu diingat sabda Rasul SAW: *Sungguh akan ada sesudahku para pemimpin. Siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu mereka atas kezaliman mereka maka ia bukan golonganku dan aku pun bukan golongannya dan ia tidak akan masuk menemani di telaga. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka atas kezaliman mereka maka ia termasuk golonganku dan aku pun termasuk golongannya dan ia akan masuk ke telaga bersamaku.*" (HR an-Nasai, al-Baihaqi dan al-Hakim). **emje**



Muhammad Said Didu,
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN dan Pegiat Media Sosial

Rahasiakan Data, Langkah Pertama yang Salah

Disadari atau tidak, salah satu faktor mewabahnya pandemi corona di seluruh provinsi di Indonesia diawali dengan merahasiakan data corona dan kelalaian pemerintah mengantisipasinya. Itulah benang merah wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Berikut petikannya.

Tanggapan Anda dengan data corona yang tidak sinkron antara Kemenkes dan daerah bahkan BNPB juga tidak bisa mengakses data tersebut secara menyeluruh...

Kita masih ingat dulu (13 Maret) pernyataan Presiden Jokowi bahwa data sengaja dirahasiakan agar tidak membikin panik. Tapi hari ini (13 April) mengatakan agar data dibuka. Saya pikir anak buah Presiden masih berpegang pada arahan yang lama.

Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga data yang dimiliki tidak sesuai karena tidak cukup alat untuk melakukan tes. Ketiga, ada beberapa orang yang mengalami gejala corona tetapi tidak punya akses ke rumah sakit. Menurut saya tiga hal itu menjadi faktor penyebabnya.

Itu semua yang membuat corona semakin mengganas?

Kita ketahui pemberantasan pandemi corona ini hanya bisa dilakukan dengan memutus siklus. Karena sampai sekarang belum ditemukan obatnya, ya caranya hanya dengan memutus siklus.

Pemutusan siklus dapat dilakukan apabila *carier* (orang yang membawa virus corona) diketahui. Sehingga bisa diisolasi agar tidak menyebarkan ke orang lain.

Sehingga menurut saya langkah pertama yang salah adalah ketika data dirahasiakan. Yang kedua adalah pemeriksaan tidak masif, akhirnya penyebaran pandemi ini semakin meluas.

Di awal-awal pemerintah malah terkesan menganggap enteng wabah corona?

Di awal-awal itu kelihatannya ada optimisme

yang sangat tinggi dari pengambil kebijakan bahwa pandemi corona ini tidak akan menyebar (ke Indonesia). Dengan berbagai pernyataan bahkan kajian ilmiah (yang menunjukkan di Indonesia ada corona) pun dibantah pejabat-pejabat terkait mulai dari menteri sampai presiden.

Kita masih ingat pernyataan mereka-mereka, banyak sekali pernyataan mereka yang kita dengar yang intinya mengabaikan, menggampangkan.

Sehingga sekarang corona sudah menyebar sangat luas...

Menurut saya, kalau sedari awal diantisipasi dan tidak menggampangkan mungkin penyebaran tidak akan separah ini. Bila diumpamakan pada skala 1-10. Di awal kita hanya butuh *effort* (usaha) skala 3, kalau sekarang ya skala 9.

Kalau dulu tidak menggampangkan, sebenarnya *kan* dengan menutup Indonesia dulu dengan Cina dan negara lain. Kemudian yang dilakukan pengawasan sangat ketat hanya Bali dan Jakarta.

Kalau sekarang sudah semua provinsi terjangkiti corona.

Apa bahayanya kalau data tidak jelas?

Ya dampaknya. Kalau data tidak jelas ya bahaya sekali, karena kita tidak bisa mengidentifikasi penyebarannya seperti apa, siapa saja yang kena pandemi itu ada di mana, sehingga menentukan zona merah, kuning, dan hijauanya lebih presisi dan akurat.

Yang kedua adalah tenaga medis juga sangat kurang karena sudah menyebar luas. Termasuk

juga kebutuhan pokok semakin berat.

Yang ketiga, harusnya kelompok ekonomi hanya terjadi di beberapa tempat saja (Bali dan Jakarta) tapi karena tidak ditangani serius sedari awal, yang sekarang semua provinsi terancam mati ekonominya.

Mengapa angka corona di Indonesia sedikit...?

Karena keterbatasan alat tes. Alat tesnya tidak cukup. Saya teringat dengan pernyataan salah satu presiden di Afrika yang mengatakan "Negara kami tidak punya kasus corona karena kami tidak punya alat tes." Sama dengan beginilah, Anda punya kucing, dibilang tidak ada kutunya karena memang Anda tidak *nyari* kutu.

Yang jadi waspada saya adalah data itu tergantung dari jumlah yang diperiksa. Jadi kalau diperiksa seratus maka yang terkena corona maksimal seratus.

BNPB mengaku kesulitan mengakses data dari Kemenkes...

Ya itu yang membuat saya heran sekali. Karena BNPB *kan* sebenarnya komandan dalam penanggulangan ini. Bayangkan saja, jangankan rakyat, komandannya saja tidak dapat mengakses data.

Menurut saya sih Presiden sudah harus menegur betul menteri kesehatan karena kok komandan penanggulangan bencana saja tidak dapat mengakses data.

Mengapa pemerintah tidak transparan terkait data corona?

Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja Kemenkes berpegang pada arahan Presiden

yang sebelumnya, karena baru hari ini Presiden menginstruksikan data dibuka. Kedua, mungkin juga karena alat tes yang tidak cukup.

Apakah tidak termasuk kejahatan bila tidak transparan menyampaikan data wabah corona?

Selain agar publik tidak panik, dulu *kan* alasan merahasiakan untuk melindungi kerahasiaan data pasien. Itu *kan* alasan UU Kesehatan yang dipakai. Tapi kalau UU Kebebasan Informasi Publik ya tentunya harus transparan.

Rahasia kan dari sisi data pribadi pasien, tetapi untuk angka jumlah yang terkena dan sebarannya berdasarkan UU Kesehatan pun ya harus transparan...

Iya. Jadi memang alasan pemerintah tidak membuka data agar publik tidak panik memang menurut saya sih membuat akal sehat kita semua agak terganggu.

Apa yang harus dilakukan publik melihat rezim seperti ini?

Karena kebijakan-kebijakan yang diambil juga tidak terlalu membantu publik, ---contohnya: penyiapan masker juga enggak, sembako hanya di Jakarta--- maka publik sekarang selamatkanlah diri dulu, jangan terlalu berharap pada pemerintah.

Saya sih berharap RT, RW, lurah, ya sudahlah bergeraklah selamatkan warganya masing-masing. Jangan menunggu pemerintah, karena pemerintah tidak mendengar, urusannya juga ribetlah.

Contoh ribetnya?

Jakarta misalnya, ditetapkan sebagai PSBB. Salah satu aturannya ojol tidak boleh membawa penumpang manusia, hanya boleh membawa penumpang barang saja. Tetapi Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan boleh. Itu *kan* simpang siur semua.

Jadi menurut saya, karena ketidakonsistenan pengambilan kebijakan pemerintah pusat maka rakyat sekarang harus menyelamatkan diri sendiri.

Suara kritis terkait penanganan wabah corona juga malah berusaha dibungkam oleh rezim... salah satu contohnya ditimpakan kepada Anda dan Ali Baharsyah...

Bukan hanya corona, sejak lama sudah begitu. Selain membungkam, juga memelihara *buzzer* untuk menyerang siapa pun yang tidak selalu mendukung. Pernyataan saya *kan* kalau bagus, bagus saja, kalau salah, salah. Tapi siapa yang pernah mengatakan pemerintah salah, itu dianggap melawan pemerintah lalu diserang *buzzer*-nya.

Menurut saya, kami ini *kan* menyuarakan suara rakyat. Jadi kalau suara rakyat sudah mau dibungkam, itu benar-benar melanggar konstitusi.

Pandangan orang yang tidak berkuasa itu lebih bebas daripada yang dalam kekuasaan. Saya 32 tahun berada di dalam kekuasaan. Saya tahu dalam mengambil keputusan, ada variabel lain yaitu pemerintah tidak boleh dianggap salah dan pemerintah harus selalu benar. Padahal belum tentu benar. Jadi kita tetap harus mengoreksi penguasa.[]

Muhammad Ismail Yusanto,
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia

Pemerintah Lalai dan Berpotensi Melanggar Hak Kesehatan

BNPB mengakui Kemenkes tak terbuka menyampaikan data terkait kasus Covid-19 di Indonesia. Bahkan BNPB sendiri tak bisa mengakses data secara menyeluruh. Data pusat dan daerah juga berbeda. Pertanda apa ini? Apa pula bahayanya bila data kasus Covid-19 tidak jelas? Di seputar itulah wartawan tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai Jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.



Bagaimana tanggapan Anda atas pengakuan BNPB tersebut?

Ini problem besar. Bukankah semua berawal dari data? Berapa orang yang positif terkena Covid-19 dan berapa yang sudah meninggal, di daerah mana, kemungkinan didapat dari mana, ke mana saja orang itu bergerak selama ini dan ke mana kemungkinan penyebaran penyakit itu terjadi, semua itu adalah data. Lalu, mana daerah yang boleh disebut zona merah, atau menuju merah, juga berdasar data.

Bila data *gak* jelas, apa yang bisa kita lakukan? Bila sesama lembaga pemerintah, seperti antara Kemenkes dan BNPB yang notabene telah ditetapkan sebagai lembaga terdepan dalam perang melawan wabah ini saja tidak ada transparansi, bagaimana dengan pihak lain yang bukan lembaga pemerintah?

Apa bahayanya bila data *gak* jelas?

Bila data, utamanya data hasil tes, tidak jelas, menjadi tidak jelas juga bentuk, pola dan kecepatan tindakan yang harus dilakukan, serta menjadi tidak jelas juga perencanaan serta tingkat urgensi tindakan. Karena tidak ada data penderita Covid-19, orang-orang di suatu daerah misalnya, merasa tenang-tenang saja. Padahal kenyataannya di situ sudah bejibun. Gawat *kan*?

Berkaitan dengan tes, CNN memberitakan sejauh ini *performance test* kita termasuk paling rendah di dunia, yakni 52 orang per sejuta penduduk. Paling tinggi Singapura 11,1 ribu, berikutnya Korsel 9,1 ribu. Bila begini keadaannya, bagaimana kita tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi di tengah masyarakat kita?

Dari sini kita bisa mengerti kalau para kepala daerah banyak yang gamang dalam menghadapi wabah ini. Sri Sultan Hamengkubuwono X yang adalah Gubernur DIY, misalnya, sampai secara terbuka menyampaikan kebingungannya karena data daerah merah yang dia minta dari pemerintah pusat tak kunjung didapat. Maunya beliau barangkali, bila data daerah merah itu didapat, dia bisa lebih bisa mengantisipasi.

Data yang tidak jelas, juga membuat penyiapan kebutuhan alat bantu medis seperti masker medis, APD, termasuk tentu saja ketersediaan dokter, perawat dan kamar serta ranjang, menjadi tidak jelas.

Bagaimana bisa beberapa waktu lalu kita malah ekspor APD, bukankah itu alat sangat diperlukan saat nanti wabah datang? Dan betul, ketika pasien covid-19 makin banyak, tenaga medis kekurangan APD, sehingga tak sedikit yang terpaksa memakai jas hujan atau perangkat lain yang tidak selengkap. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka, termasuk dokter, yang malah menjadi korban Covid-19. Ini tragis sekali.

Prediksi IPB menyebut puncak Covid-19 di Jakarta akhir April ada 1,8 juta kasus...

Sangat mungkin terjadi. Para ahli di berbagai perguruan tinggi, seperti UI, juga memperkirakan hal kurang lebih sama. Bila tanpa tindakan serius, menurut mereka, penderita Covid-19 di Indonesia bisa mencapai lebih dari 2,5 juta orang. Bila FCR (*fatal case rate*) di Indonesia anggap sekitar 10 persen (sekarang 9 persen lebih), maka akan ada 250 ribu orang tewas. Mengerikan sekali.

Mengapa pemerintah pusat

tidak transparan terkait data Corona ini?

Saya juga tak paham, mengapa kok pemerintah enggan terbuka, terkesan seperti hendak menyembunyikan data. Di awal dulu mungkin ingin mencitrakan negeri ini aman dari Covid-19. Tapi itu tak lama, akhirnya terungkap juga bahwa ada penderita penyakit itu, bahkan makin ke sini makin banyak.

Apakah bila tidak didesak Australia dan Malaysia pada 2 Maret lalu Jokowi juga tak akan umumkan dua WNI positif corona?

Sebelum pemerintah mengumumkan kasus positif pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020 lalu, berbagai negara telah melaporkan lebih dulu temuan pasien positif Covid-19 berkaitan dengan Indonesia. Salah satunya, pada 13 Februari 2020, seorang turis asal Cina pulang ke negaranya setelah dari Bali. Lalu, ada warga negara Jepang yang juga dinyatakan positif terinfeksi virus Corona sehabis pelesir di Indonesia, juga dari Bali.

Sepanjang Februari itu, setidaknya ada tiga kasus penyebaran Covid-19 berkaitan dengan Indonesia. Dan Singapura adalah negara yang paling banyak melaporkan kasus yang terhubung dengan Indonesia.

Lihatlah, ada jeda kurang lebih sekitar 2 pekan dari temuan kasus-kasus tadi hingga saat Presiden Jokowi mengumumkan pasien 01 pada 02 Maret lalu. Dari situlah, muncul dugaan, jangan-jangan virus itu sebenarnya sudah lama lebih dulu masuk Indonesia sebelum menyusup ke tubuh pasien 01.

Apakah termasuk kejahatan bila menutup-nutupi data

Corona?

Dengan kurangnya transparansi informasi mengenai wilayah atau tempat mana saja yang terdampak atau terpapar dan berapa banyak jumlahnya, pemerintah memang dapat dianggap telah lalai dalam menjamin hak atas informasi masyarakat dan dalam skala lebih luas dapat berpotensi melanggar hak atas kesehatan.

Bila merujuk kepada Undang-Undang Kesehatan, di sana dikatakan bahwa pemerintah harus mengumumkan persebaran penyakit menular secara berkala, termasuk daerah yang berpotensi menjadi sumber penularan.

Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mewajibkan badan publik yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, termasuk informasi terkait epidemik dan wabah.

Tidak hanya itu, Pasal 154 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mewajibkan pemerintah untuk menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

Jadi, bila hal itu tidak dilakukan, atau menginformasikan secara tidak benar, maka jelas sekali, pemerintah bisa dianggap telah melanggar UU.

Termasuk hoaks ya? Benar kata Rocky Gerung ya 'pembuat hoaks terbaik adalah

penguasa'...?

Iya. Sekarang ini aparat sedang giat *bener ngejar* orang yang katanya menyebarkan hoaks. Lah, *gimana* kalau pembuat hoaks itu pemerintah sendiri karena menyebarkan informasi yang tidak sebenarnya?

Apa yang harus dilakukan publik melihat kenyataan seperti itu?

Publik harus terus mengkritisi pemerintah. Tidak boleh berhenti. Ini bagian dari kewajiban amar makruf nahi mungkar. Apalagi ini menyangkut keselamatan jiwa jutaan penduduk di negeri ini. Maka mengkritisi pemerintah untuk bisa bekerja lebih baik sangatlah penting. Karena di tangan pemerintahlah kunci keberhasilan penanganan wabah yang luar biasa ini. Lengah pemerintah dalam bertindak, taruhannya sangat mahal: jiwa dan kesehatan jutaan rakyat.

Tapi suara kritis terkait penanganan wabah Corona malah berusaha dibungkam oleh rezim. Salah satu contohnya ditimpakan kepada Said Didu dan Ali Baharsyah. Bagaimana dong?

Cara penanganan kritik dari publik, ini juga perkara yang harus dikritisi. Mestinya pemerintah fokus pada penanganan wabah. Kritik dari publik harus dianggap sebagai sumbangsih masyarakat agar pemerintah bisa bekerja lebih baik lagi.

Bayangkan kalau tidak ada kritik, sementara aparat di bawah semua memberikan laporan ABS (asal bapak senang), lantas darimana pemerintah tahu ada kekurangan, kelemahan atau kesalahan dalam kebijakannya?[]



Mereka Bicara

Gagap Data dan Penanganan Corona



Tengku Zulkarnaen,
Wasekjen MUI Pusat

Kritik Mesti Ditanggapi bukan Ditangkapi!

Data yang dikasih lihat selama ini oleh masyarakat hanya data persenan pemerintah saja, saya sudah tahu banyak yang dimanipulasi oleh pemerintah. Pemerintah itu sudah biasa tidak transparan dan terkesan menutup-nutupi data kasus Covid-19 ini, dengan jumlah penduduk yang banyak dan pemerintahan yang tidak efisien dilihat akan semakin parah dalam penanganan kasus Covid-19 ini.

Ditambah lagi dengan fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap pulau yang ada di negara ini. Beberapa pasien yang memiliki gejala sempat ditolak karena tidak memiliki fasilitas yang memadai, bahkan dari pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan bahwa ada 11 dokter yang meninggal karena terinfeksi Covid-19 hal ini juga disebabkan karena minimnya Alat Perlindungan Diri (APD) yang tersedia bahkan ada tenaga medis yang menggunakan jas hujan sebagai APD.

Kalau terkait kritikan, sungguh kritik sekeras apapun yang dialamatkan oleh para pengkritik kepada penguasa, mestinya ditanggapi bukan ditangkapi. Sekali lagi ditegaskan: "Kritik mesti ditanggapi bukan ditangkapi!"

Kritik dimaksudkan untuk membangun peradaban, dan muncul dari orang yang punya rasa tanggung jawab atas kemaslahatan negerinya. Bukan pengkhianat, penjual negara demi ambisi.[]



Abdul Choir Ramadhan,
Direktur HRS Center

Terkesan Menutupi Informasi Data

Sangat disayangkan, pemerintah terkesan menutup informasi data atau, perubahan status yang terjadi tanpa adanya penjelasan yang komprehensif. Pada awalnya dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kemudian status kedaruratan kesehatan masyarakat dan sekarang bencana nasional. Belum lagi opsi darurat sipil dalam posisi 'siap pakai', jika ternyata dalam pelaksanaan PSBB dianggap gagal.

Apakah ada korelasi deklarasi bencana nasional itu dengan opsi darurat sipil? Dengan lain kata, apakah status bencana nasional akan menjadi 'pintu masuk' keberlakuan kedaruratan negara dalam wujud darurat sipil? Semuanya, tergantung sang Presiden.

Presiden sendiri malah mendeklarasikan status bencana nasional, yang notabene mengacu kepada Undang-Undang Penanggulangan Bencana? Untuk menjawab hal ini tidaklah dapat dengan pendekatan yuridis semata, ada makna-makna 'simbolik' di balik penetapan tersebut. Asumsi saya, sepertinya terdapat agenda 'terselubung' di balik deklarasi tersebut.

Deklarasi tersebut bukan hanya dimaksudkan sebagai respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat sebab pademi COVID-19, namun juga berlaku terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu, dalam Keppres Nomor 12 tidak lagi mencantumkan Undang-Undang Kekarantina Kesehatan sebagai butir mengingat. Dengan deklarasi Presiden ini, maka keberadaan status ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem

keuangan dalam Perppu Nomor 1 semakin mendapat legitimasi.[]



Asyari Usman,
Pengamat Sosial Politik

Kenapa Ada Dua Jalur Informasi?

Pertama kita lihat dulu perbedaan angka-angka antara Satgas Covid-19 yang dipimpin oleh Doni Munardo, dengan informasi yang setiap hari diberikan oleh Kementerian Kesehatan, lewat juru bicaranya.

Ada fakta bahwa cara pengelompokan yang dilakukan oleh Satgas berbeda dengan Kemenkes, jadi artinya yang Kemenkes hanya akan menyebutkan angka-angka yang betul-betul sudah positif sudah melewati *rapid test*, yang tidak melewati tes itu walaupun dia positif bagi Kemenkes belum tentu itu positif sampai orang itu menjalani tes.

Nah, bagi Satgas Covid-19 yang dipimpin Doni Munardo, kalau sudah *rapid test* itu menunjukkan positif ya sudah positif, inilah sumber masalahnya. Jadi, misalnya Satgas ada 100 positif melewati tes baik itu *rapid test* atau PCR, kemudian di Kemenkes bisa jadi 74 oleh karena mereka yang sudah bisa terkonfirmasi baru 74, nah ini kan akan terus terjadi.

Satgas kemudian mengatakan mereka menggunakan data Kemenkes tetapi di belakang layar mereka tahu semua angka-angkanya, ini sangat aneh dalam pengelolaan pandemi ini menjadi masalah besar, kenapa ada dua jalur informasi?[]



Wahyudi al Maroky,
Direktur Pamong Institute

Perbedaan Data, Masalah Serius Sejak Lama

Ini memang menjadi polemik, di era digital saat ini publik bisa mendapatkan data dengan berbagai versi, bahkan ada yang melakukan investigasi sendiri, hingga melakukan survei sendiri, jadi data jauh bisa lebih valid.

Nah, kalau diadu dengan data pemerintah secara resmi kok datanya beda sekali, maka bisa kita uji mana yang lebih kredibel, di era saat ini orang akan lebih percaya kepada hasil riset yang dianggap independen dan tidak ada kepentingan politik, juga hasil kajian publik yang independen. Dibandingkan dengan data yang diambil oleh pemerintah yang di dalamnya ada orang-orang politik dan ada kepentingan politik.

Terkait dengan adanya perbedaan data seperti dengan Pemprov DKI Jakarta, BNPB, dan pemerintah pusat juga dengan beberapa provinsi lain, tampaknya ini merupakan persoalan serius sejak lama pemerintahan ini ada. Sekarang menjadi masalah yang lebih serius lagi karena terkait dengan pandemi corona ini, dan kalau kita lihat ini, tentu di era digital seharusnya tidak perlu terjadi, karena dengan zaman yang semakin canggih pendataan itu semestinya tidak menjadi persoalan.

Namun banyak mekanisme yang ada di tubuh birokrasi kita membuat kita terlambat untuk menggunakan fasilitas teknologi itu, sehingga kebanyakan pelaku birokrat kita itu masih menggunakan pola konvensional, sebagian besar pula masih menggunakan pola tersebut sehingga data sering berubah-ubah, dan ini dinikmati juga bagi

yang senang memainkan data dan angka-angka.[]



Ahmad Rusdan Handoyo Utomo,
Penasehat Perkumpulan Biologi Medik Indonesia (PBMI)

Puncak Gunung Es

Masalahnya di kita, setelah 2 bulan pertama, antara Februari dan Januari itu kan Indonesia sama sekali tidak menemukan yang positif, sementara kalau di periode yang sama negara-negara lain itu sudah ada yang positif.

Kenapa belum ada yang positif waktu itu? Karena beberapa faktor. *Pertama*, sistem *surveillance* kita kurang ketat. Contohnya kalau di Vietnam itu yang datang dari luar negeri diberikan informasi kalau ada apa-apa hubungi siapa, Singapura juga bagus ketat, dan lebih ketat, penerbangan sampai dikontrol, sehingga ada yang sakit demam saja langsung cepat diketahui dan segera di karantina, sedangkan di kita sistem itu belum siap.

Kedua, masalah di laboratorium. Indonesia hanya pakai satu laboratorium Litbangkes, dan kita juga tidak tahu persis, walaupun awal tes ini kenapa tidak ada yang positif, ada dugaan kami juga ini alat PCR yang bermasalah, PCR yang mereka gunakan itu sumbernya dari Amerika, Amerika sendiri sedang ada masalah.

Tapi kalau ada masalah, seharusnya antar lab itu harus ada komunikasi, mestinya bisa diselesaikan karena di Indonesia kan ada lembaga Eijkman, lembaga tersebut dekat dengan Litbangkes, tapi kita tidak tahu kenapa mereka tidak saling kontak, ini misteri besar.[]



Iwan Sumule,
Ketua Majelis Aktivis Pro Demokrasi (Prodem)

Yang Dilakukan Pemerintah Tak Signifikan

Kalau soal itu (data corona tidak jelas) memang sering terjadi. Pemerintah memang selalu salah dalam memberikan informasi kepada rakyat. Kalau saya berpikir sih apa yang dilakukan pemerintah saat ini belum maksimal. Terlihat lambat bahkan juga bisa dibilang lalai.

Karena saya cukup mengikuti soal Covid-19 ini. Kita lihat saja bagaimana pemerintah dalam menghadapi Covid-19, memang bisa dibilang lelet bahkan lalai.

Kita bandingkan dengan negara tetangga, Singapura misalnya. Singapura umumkan soal Covid-19 23 Januari, kita 2 Maret. Itu pun karena sudah banyak didesak dari berbagai negara. Dubes-dubes di Indonesia juga ikut menyuarakan, para ilmuwan juga mengomentari soal adanya Covid-19 di Indoseia.

Ini menurut saya memprihatinkan. Karena sangat lambat sekali mengantisipasi malah cenderung menganggap remeh bahkan jumawa. Sehingga begitu kejadian gagap karena belum ada kesiapan.

Saya sebagai Ketua Majelis Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) itu sudah sering mengkritisi soal kinerja pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 karena tidak ada yang signifikan yang dilakukan pemerintah.

Saya sih sudah berkesimpulan bahwa kita sudah tidak bisa lagi menaruh harapan terhadap apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Bagaimana kebijakan pemerintah mau benar, apa yang dia bikin saja dia langgar sendiri.[] **fatih-ghifari-joy**

Pengingkaran Orang Kafir terhadap Hari Kiamat dan Balasannya

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI



Mereka bertanya, "Kapankah Hari Pembalasan itu? (12); (Hari Pembalasan itu ialah) pada hari (ketika) mereka diazab di dalam api neraka (13); (Dikatakan kepada mereka), "Rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan." (14) (QS al-Dzariyat [51]: 12-14).



Dalam ayat sebelumnya Allah SWT menyampaikan ancaman yang sangat keras kepada *al-kharrâshûn* (orang-orang yang banyak berdusta). Dalam ayat itu mereka diancam dengan kata *qutila* yang menurut banyak mufassir bermakna *lu'ina* (dilaknat, dikutuk). Dijelaskan juga oleh para mufassir, mereka merekayasa kebohongan tentang Rasulullah SAW, Al-Qur'an, dan Hari Kiamat. Kebohongan mereka dapat diketahui dengan jelas pada ucapan di antara mereka yang kontradiktif satu sama lain. Pertentangan yang tidak terdamaikan itu menunjukkan bahwa tidak mungkin semuanya benar. Bahkan, semuanya dusta.

Kemudian ayat-ayat ini menggambarkan sikap mereka terhadap Hari Pembalasan beserta hukuman yang akan mereka terima pada hari itu.

Pertanyaan Olok-Olok

Allah SWT berfirman: *Yas'alûna ayyâna yawm al-dîn* (mereka bertanya, "Kapankah hari pembalasan itu?"). Ayat menerangkan tentang perbuatan *al-kharrâshûn* (orang yang banyak berdusta) dalam ayat sebelumnya. Diberitakan ayat ini, mereka bertanya tentang kapan terjadi

nya Hari Kiamat. Kata *ayyâna* adalah *ism istifhâm* (kata tanya) tentang waktu terjadinya sebuah peristiwa. Artinya, *matâ yawm al-dîn* (kapankah Hari Kiamat?). Ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: *Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Kiamat, "Kapan terjadi?"* (TQS al-A'raf [7]: 187).

Dikatakan Ibnu 'Adil, ini merupakan jawaban terhadap firman Allah SWT: *Dan sungguh, (Hari) Pembalasan pasti terjadi* (TQS al-Dzariyat [51]: 6). Seolah dikatakan, "Kapan itu terjadi?" sebagai olok-olok. Dijelaskan Ibnu Jarir al-Thabari, *al-kharrâshûn* yang telah digambarkan sifat-sifat mereka bertanya-tanya, "Kapankah perhitungan Hari Pembalasan dan Perhitungan serta hari saat Allah membalas hamba-hambanya dengan amal-amal mereka?"

Pertanyaan mereka itu bukan dalam rangka *thalab al-'ilm bi syay'* (meminta informasi tentang sesuatu), akan tetapi untuk mengolok-olok dan mengungkapkan keraguan serta pengingkaran. Sebagaimana dikatakan al-Qurthubi, mereka bertanya demikian dengan tujuan untuk memperolok-olok dan mengungkapkan keraguan tentang Hari Kiamat. Ini sebagaimana dalam disebutkan dalam firman-Nya: *Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar (hari*

kebangkitan), yang dalam hal itu mereka berselisih (TQS al-Naba' [78]: 1-3).

Hal senada juga dikatakan Ibnu Katsir. Menurutnya, sesungguhnya mereka menyampaikan pertanyaan itu semata-mata hanya karena ketidakpercayaan mereka dengan adanya hari pembalasan itu. Mereka mendustakan, mengingkari, meragukan, dan menganggapnya mustahil.

Dijelaskan al-Khazin bahwa mereka berkata, "Wahai Muhammad, kapankah hari pembalasan itu?" Maksudnya Hari Kiamat sebagai pendustaan dan olok-olok.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Abu Su'ud, Ibnu 'Adil, dan lain-lain. Selain dalam ayat ini, pertanyaan serupa juga disebutkan dalam banyak ayat lain, seperti dalam firman-Nya: *Dan mereka mengatakan, "Bilakah (datangnya) ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?"* (QS Yunus [10]: 48, al-Anbiya [21]: 38, al-Naml [27]: 71, Saba' [34]: 29, Yasin [36]: 48, al-Mulk [67]: 28).

Hari Mereka Disiksa

Kemudian dilanjutkan: *Yawma hum 'alâ al-nâr yuftanûn* ([hari pembalasan itu ialah] pada hari [ketika] mereka diazab di dalam api neraka). Ini merupakan jawaban atas pertanyaan orang-orang kafir itu. Artinya, hari pembalasan itu terjadi pada hari mereka dibakar di atas api neraka.

Dalam ayat ini digunakan kata *yuftanûn* (dibakar, diazab). Terdapat beberapa penjelasan tentang makna kata tersebut. Ada yang memaknainya dengan *yuhraqûn* (dibakar). Itu sebagaimana ungkapan mereka: *Fatanta al-dzahab* (engkau telah membakar emas). Artinya, *ahraqtuhu* (kamu telah membakarnya) dalam rangka untuk mengujinya. Sebab, pada asalnya *al-fitnah* bermakna *al-ikhtibâr* (pengujian). Ikrimah juga berkata, "Bukankah ketika emas dimasukkan ke dalam api disebut *futina*."

Penjelasan yang sama dikemukakan oleh Mujahid, Ikrimah, Ibrahim An-Nakha'i, Zaid bin Aslam, dan Sufyan al-Tsauri. Mereka mengatakan bahwa makna ayat ini adalah *yuhraqûn* (mereka dibakar).

Sebagian lainnya menafsirkannya dengan *yu'adzdzabûn* (mereka diazab). Ini sebagaimana

dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, dan al-Hasan serta banyak lainnya yang mengatakan bahwa makna *yuftanûn* adalah *yu'adzdzabûn* (mereka diazab), sebagaimana emas dibakar dalam api (ke-masan).

Ada juga menghimpun kedua penafsiran tersebut. Ibnu 'Asyur, *al-fatan* bermakna *al-ta'dzîb wa al-tahriq* (penyiksaan dan pembakaran). Hal yang sama juga dikatakan al-Syaukani yang menafsirkan ini dengan (dibakar dan disiksa).

Sesuai dengan Tindakan

Allah SWT berfirman: *Dzûqû fitnatakum* ([Dikatakan kepada mereka], "Rasakanlah azabmu ini). Inilah perkataan kepada orang-orang kafir itu pada Hari Kiamat. Ini menegaskan bahwa mereka benar-benar akan merasakan azab dan pembakaran itu.

Dijelaskan Mujahid, makna *fitnatakum* adalah *harikhakum* (pembakaran kalian). Demikian pula pendapat al-Farra'. Sedangkan Ibnu Zaid menafsirkannya *'adzaabakum* (azab kalian). Hal yang sama juga dikemukakan oleh al-Khazin, dan lain-lain.

Kemudian Allah SWT berfirman: *Hâdzâ al-ladzi kuntum bihi tasta'jilûn* (inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan). *Al-Isyârah* pada ayat ini, yakni kata *Hâdzâ* menunjuk kepada sesuatu yang nyata ada di depan mata mereka. Itulah siksa neraka yang mereka minta disegerakan pada saat di dunia.

Pengertian firman-Nya: *kuntum bihi tasta'jilûn* adalah *kuntum tathlubûna ta'jilûnahu* (yang dahulu kalian minta untuk disegerakan). Sehingga *al-sîn* dan *al-tâ'* menunjukkan makna *al-thalab* (permintaan, tuntutan).

Ini merupakan ungkapan yang menunjukkan kecaman, cemoohan, dan pelecehan terhadap mereka. Ungkapan itu sebagai balasan atas sikap mereka sewaktu di dunia yang mengolok-olok dan meremehkan Hari Kiamat. Itu mereka lakukan karena mereka menganggap Hari Kiamat adalah sesuatu yang mustahil dan tak mungkin terjadi. Sikap itu diungkapkan dalam bentuk pertanyaan mereka tentang Hari Kiamat dan permintaan agar disegerakan Hari Kiamat. Sebab, jika mereka meyakini, niscaya tidak akan mun-

IKHTISAR:

1. Orang-orang kafir mengingkari Hari Pembalasan dan mengolok-oloknya.
2. Orang kafir akan merasakan neraka yang membakar mereka.
3. Sebagaimana mereka telah melecehkan dan mengolok-olok Hari Pembalasan, mereka pun akan diberikan balasan serupa: dilecehkan dan diolok-olok.

cul pertanyaan dan tantangan seperti itu.

Maka, sebagai balasan atas sikap mereka yang mengolok-olok Hari Kiamat beserta semua siksanya, mereka pun diolok-olok dan dicemooh. Selain dalam ayat ini, hal serupa juga disebutkan dalam beberapa ayat lain. Di antaranya adalah firman-Nya: *Maka ketika mereka melihat azab (pada Hari Kiamat) sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan (kepada mereka), "Inilah (azab) yang dahulunya kamu minta."* (TQS al-Mulk [67]: 27).

Hal serupa juga ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakannya. Allah SWT berfirman: *Dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan."* (TQS al-Sajdah [32]: 20). Juga dalam firman-Nya: *Dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim, "Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan."* (TQS Saba [34]: 42).

Demikianlah. Orang-orang kafir itu telah mengingkari Al-Qur'an dan menganggapnya mustahil. Bahkan mereka melecehkan, merendahkan, dan menjadikannya sebagai bahan olok-olok. Ayat ini memastikan, akan tiba waktunya apa yang mereka ingkari. Mereka tidak hanya akan melihat neraka, namun akan merasakan pedihnya siksa neraka. Mereka akan dihinakan dan dicemooh sebagaimana mereka telah menghinakan dan mencemoohnya. Tak ada kerugian yang besar dari itu. Maka, selagi masih ada kesempatan, segeralah bertaubat.

Ingatlah, Hari Pembalasan tetap akan terjadi sekalipun manusia mengingkarinya. Bahkan, mereka mengingkari akan mendapatkan azab yang sangat pedih. *Wal-Lâha 'lambi al-shawâb*.[]

Diskusi Media Umat

Ismail Yusanto: Penanganan Wabah Corona Karut-Marut

"Buktinya sampai ini hari performance test (kemampuan melakukan tes corona) kita itu paling rendah di seluruh dunia."

Ada dua strategi efektif yang dilakukan untuk menghentikan wabah Corona yaitu dengan *lockdown* dan 3T (*trace, test, and treat*/lacak, uji, dan obati) secara masif namun sayangnya itu tidak dilakukan pemerintah.

"Jadi memang karut-marut," ujar Muhammad Ismail Yusanto dalam *Diskusi Media Umat Online: Karut-Marut Hadapi Wabah Corona*, Kamis (9/4/2020) malam di kanal Youtube *Media Umat*.

Padahal, strategi *lockdown* di Wuhan dan 3T secara masif di Korea Selatan terbukti efektif meredakan wabah Corona hanya dalam tiga bulan saja. "Kita ini hari itu tidak jelas. Kita mau strategi Wuhan atau Korea Selatan? *Lockdown* enggak tetapi melakukan 3T juga tidak," keluhnya.

Dalam acara yang disaksikan lebih dari 3.500 pemirsa dalam waktu yang bersamaan tersebut, Ismail juga menyatakan memang Indonesia melakukan tes tetapi sangat rendah dan tidak memadai.

"Buktinya sampai ini hari *performance test* (kemampuan melakukan tes corona) kita itu paling rendah di seluruh dunia. Kalau Singapura itu 11.200, Korea Selatan itu sembilan ribu sekian, Indonesia itu cuma

52 orang per satu juta penduduk. Nah ini problem besar," tegas Ismail.

Kalau dari tesnya sudah berantakan begitu bagaimana akan mendapatkan data? Padahal data ini kunci. Kalau mau mengatakan daerah itu masuk zona merah, itu berasal dari data. "Kalau data itu tidak ada lantas bagaimana daerah tersebut dikatakan zona merah?" ungkap Ismail.

Kemudian data itu diambil dari tes. Kalau tes tidak ada, data tidak ada. Maka bisa terjadi penduduk di suatu daerah itu tenang-tenang saja karena dikatakan tidak ada yang terinfeksi.

"Padahal tidak ada terinfeksi itu faktanya bukan tidak ada yang terinfeksi tetapi tidak ada tes di situ! Padahal sebenarnya sudah bejibun. Ini tentu sangat berbahaya," tegasnya.

Menurut Ismail, data tersebut sampai ini hari masih menjadi masalah besar karenanya akan membuat pemerintah kesulitan merancang suatu strategi. Terbukti, misalnya, sampai ini hari tidak jelas, berapa sih kebutuhan yang harus disediakan. Sehingga di lapangan kekurangan APD, kekurangan kamar, jangan lagi bicara ventilator pasti sudah sangat kekurangan.

Pada akhirnya, menjadi tidak jelas



juga skenarionya. Skenario untuk mengakhiri wabah ini seperti apa? "Kita jadi sulit membayangkan, wabah ini akan selesai berapa lama? Kalau Korea Selatan tiga bulan, Wuhan tiga bulan. Kita ini berapa lama?" tanyanya.

Sedangkan di Inggris yang fasilitas kesehatannya jauh lebih memadai, Bill Gate memperkirakan skenario di Inggris sampai satu tahun. "Nah, Indonesia berapa? Bagaimana skenarionya kalau betul-betul sampai satu tahun?" tanyanya kembali.

Ismail juga menjelaskan, dalam Islam, begitu mendengar di suatu daerah terkena

wabah. Maka daerah tersebut harus dikarantina/*lockdown*. Kemudian dicarikan solusi agar wabah tersebut segera berakhir.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut dihadiri pula pembicara lain, yakni Salamuddin Daeng (Pengamat Kebijakan Ekonomi Publik); Ahmad Rusdan Handoyo Utomo (ahli *molecular medicine*); Syaharudin P Lani (Direktur Healthcare Professionals for Sharia/HelpSharia); Fahmi Amhar (ahli geospasial); dan Chandra Purna Irawan (Sekjen LBH Pelita Umat). **joko prasetyo**

LBP, Menteri Segala Urusan?

"Apa pun bahaya yang telah ditimbulkan oleh sikap dan kebijakan LBP, maka sebagai pemimpin tertinggi, semua itu harus menjadi tanggung jawab Jokowi!"



■ Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Ekonom Faisal Basri mencuit keras di media sosialnya, Jumat (3/4). Cuitan ini ditujukan langsung ke Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi yang juga Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan.

Isinya: "Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari corona-virus COVID-19," kicau Faisal lewat Twitter, Jumat (3/4).

Ini membuat jagad media sosial ramai. Ditambah lagi video dari M Said Didu berjudul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'. Video itu berdurasi 22.44 menit.

Dalam video itu, Said Didu yang juga pengamat BUMN

menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dan menghubungkannya dengan penanganan Covid-19. Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental (*legacy*) berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.

Wartawan senior Edy Mulyadi ikut menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan LBP hanya memikirkan uang. "Kalau ditanya siapa si Luhut itu, yaitu menteri ASU (menteri atasi segala urusan) yang otaknya cuma duit-duit dan duit," ujarnya, Senin (13/4).

Menurutnya, masyarakat sudah banyak mengeluh soal kiprah kinerja Luhut di pemerintahan. Banyak menyebutkan sebagai menteri segala urusan. "Dia itu LBP itu sebenarnya siapa? Dan posisi dia sebagai apa? Kenapa semua dia yang atur?" celetuknya.

Edy menilai, bahkan terkait wabah virus sekarang ini saja Luhut menyepelekan. Malah ia terus membicarakan bagaimana pemindahan ibukota negara. Dalam pandangan Luhut, tak boleh ekonomi mandeg gara-gara corona karena dampaknya belum dikaji. Selain itu, Luhut yakin bahwa wabah ini bersifat sementara dan sebentar lagi mereka. Dan Luhut berharap para TKA China untuk segera bisa kembali masuk ke Indonesia.

Tidak aneh bila Luhut terkesan menganggap remeh virus tersebut, dengan mengatakan "virus corona tak tahan

dengan cuaca Indonesia". Pernyataan Luhut ini selalu kontroversial dan terlihat tidak berempati pada rakyat yang sedang ketakutan atas pandemi ini.

Bahkan warganet saja sudah geram, sampai membuat trending di sosial media, terkait LBP ini dengan hastag #LBPBrokerTKA sempat *trending*.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara juga menyampaikan kritikan pedas yang senada. "Kami setuju dan sangat mendukung pernyataan Faisal Basri bahwa LBP lebih berbahaya dari pada Covid-19," ucap Marwan.

Meski demikian, Marwan menilai kritikan Faisal Basri masih setengah matang. Sebabnya, Luhut masih memiliki atasan yakni Presiden Joko Widodo. "LBP itu punya bos yang namanya Jokowi. Apa pun bahaya yang telah ditimbulkan oleh sikap dan kebijakan LBP, maka sebagai pemimpin tertinggi, semua itu harus menjadi tanggung jawab Jokowi!" tegas Marwan.

Marwan menantang Faisal Basri tak hanya berani mengkritik Luhut, tetapi secara terbuka menunjukkan sikap kritisnya terhadap Presiden Joko Widodo. "Mari kita bersikap jantan, *fair* dan objektif. Mohon Faisal juga berani kritik Jokowi secara terbuka," ujarnya tantangan Marwan terhadap Faisal Basri. **ghifari**

Wahyu Setiawan Minta Rp 50 Juta Pengamat: Rakus Uang dan Kekuasaan

KPU yang harusnya independen, membentengi diri dari jalinan dengan politisi dan parpol, justru hura-hura.

Komisioner KPU Pusat periode 2017-2022 Wahyu Setiawan mengakui melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Arief Wibowo sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Atas pertemuan itu, ia meminta uang ganti biaya pertemuan sebesar Rp 50 juta. Sebelumnya saksi Agustiani Tio Fridelina menyebut uang itu untuk karaokean bareng politisi PDIP.

Wahyu Setiawan saat menjadi saksi untuk terdakwa Saeful Bahri yang merupakan kader PDIP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/4). Dalam persidangan, Wahyu Setiawan mengaku meminta kepada kader PDIP Agustiani Tio Fridelina untuk mentransfer sejumlah uang.

Permintaan itu dilakukan setelah KPU memutuskan untuk tidak dapat memenuhi permintaan DPP PDIP agar Harun Masiku menggantikan posisi Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

Menanggapi kasus tersebut pengamat politik dan sosial Iwan Januar menilai bahwa untuk kasus Wahyu ini jelas memalukan dan menciderai kode etik KPU. Apalagi dari pengakuan Wahyu di persidangan, ia sendiri yang meminta kepada Agustiani Tio Fridelina uang sebanyak itu, ini menunjukkan mental korup. "Ini menunjukkan mental korup," ujarnya saat wawancara dengan

Media Umat, Senin (13/4).

Menurutnya, perbuatan itu menunjukkan pemilu dan demokrasi Indonesia bermasalah. KPU yang harusnya independen, membentengi diri dari jalinan dengan politisi dan parpol, justru hura-hura. Maka, bagaimana kita bisa percaya pemilu kemarin itu jujur.

Iwan mengatakan bahwa kasus Wahyu ini disebabkan karena *greedy*. Rakus uang dan kekuasaan. Kalau sudah begitu tak ada lagi rasa malu. Kredibilitas KPU sering digembar-gemborkan jujur, adil dan terpercaya tercoreng sudah. Ia tak berpikir dua ratus juta lebih orang Indonesia menyandarkan harapan pada KPU. Belum selesai kasus Wahyu, publik dikecewakan lagi dengan kelakuan Evi Novida Ginting yang terlibat manipulasi suara caleg di Kalimantan Barat 6.

Kemudian, dampaknya membuat publik yang curiga makin percaya KPU tidak netral, tidak independen, dan diragukan kejujurannya. Komisioner yang harusnya netral, tegas dan menjaga jarak dengan elit parpol malah main-main.

Sementara itu buat parpol, kejadian ini membuat mereka semakin berani untuk melakukan negosiasi politik dengan KPU. "Toh, yang ini saja bisa, nanti yang lain juga bisa," sindirnya.

Iwan juga menjelaskan pemerintah itu lahir dari proses pemilu demokrasi. Dise-



■ Wahyu Setiawan (kiri) dan Arief Wibowo.

lenggarakan oleh KPU. Sekarang yang bermain justru KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Apa ada jaminan pemerintah bisa menindak? Bagaimana kalau seandainya oknum di KPU pegang kartu truf politik para elit parpol peserta pemilu? Jadi pemilu itu tersandera oleh parpol dan oknum KPU. Tapi memang begitulah demokrasi," tambahnya.

Dalam Islam pejabat negara atau aparat negara atau ASN termasuk orang yang dipekerjakan oleh negara, haram hukumnya menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Lalu, dalam Islam pemerintah itu dipilih oleh rakyat melalui baiat untuk melaksa-

nakan syariat Islam. Pemerintah juga akan terus diawasi oleh publik dan ada Mahkamah Mazhalim yang bisa memberhentikan pejabat negara.

Peluang untuk main mata antara elite parpol, atau pejabat negara dengan penyelenggara pemilu menjadi terbatas ruang gerak. Apalagi pijakan pelaksanaan pemerintahan adalah iman dan takwa, bukan untuk memenangkan kepentingan parpol atau kaum kapitalis.

"Maka demokrasi memungkinkan berbagai permainan kotor antar semua pihak yang terlibat dalam pemilu dan pemerintahan. Demokrasi memang tidak layak dipertahankan," pungkasnya. **ghifari**

Penangkapan dan Pembunuhan Karakter Aktivis Islam Kembali Terjadi

"Khilafah adalah ajaran Islam, mendakwahkan khilafah bukan makar, mendakwahkan khilafah bukanlah tindakan kriminal."



Aparat kembali mengkriminalisasi suara-suara kritis terhadap rezim. Kali ini menangkap aktivis Islam Ali Baharsyah dengan tuduhan pasal berlapis atas aktivitas membela saudara Muslim Uighur, mengkritik kebijakan darurat sipil Presiden Jokowi, mendakwahkan ajaran Islam Khilafah yang dituding makar menggunakan facebook dan tuduhan menghina pejabat umum.

Namun selain menangkap, tampaknya kepolisian berusaha untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Ali. Hal itu

diungkap oleh kuasa hukumnya, Chandra Purna Irawan. Alimuddin Baharsyah dituding menyimpan konten pornografi, padahal dalam penetapan status penetapan tersangka tidak ada yang berdasarkan konten pornografi.

"Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang didampingi oleh Tim hukum LBH Pelita Umat, tidak ada satu pun materi pertanyaannya terkait pornografi dan tidak ada satu pun bukti hukum baik berupa *file* atau penayangan video atau gambar yang memuat pornografi. Lalu kami tim hukum LBH Pelita Umat menjamin 100% bahwa Alimudin Baharsyah disidik dalam kasus yang sama sekali tidak terkait tindak pidana pornografi," jelas Chandra kepada *Media Umat*.

Menurut Chandra kepolisian telah melakukan pembunuhan karakter terhadap Alimuddin Baharsyah, seperti yang menimpa Habib Rizieq atas tuduhan *chat* mesum, dan sebelum ada bukti kepolisian telah melakukan pemberitaan di media massa seolah-olah tuduhan itu terbukti.

"Penyidik Mabes Polri diduga mema-

inkan opini publik tanpa dasar hukum yang jelas, keluar dari pasal pidana yang dijadikan dasar penyidikan, dan membangun opini publik untuk merontokkan moral klien kami, sekaligus menghakiminya melalui pemberitaan miring di berbagai media," ungkapnya.

Tindakan ini selain tidak berdasar hukum juga merupakan tindakan yang sangat jahat, tidak profesional, tidak bertanggung jawab dan justru berpotensi meruntuhkan wibawa dan kehormatan institusi Polri.

"Padahal, persoalan utama yang dihadapi saudara Alimudin Baharsyah justru ada pada tuduhan makar melalui Facebook berdasarkan pasal 107 KUHP. Berulang kali Penyidik memperlihatkan sejumlah *screen-shoot* berisi video tentang dakwah khilafah dalam proses pemeriksaan (BAP)," kata Chandra.

Chandra mengungkapkan bahwa faktor utama Ali ditangkap adalah karena dia konsisten mendakwahkan khilafah, sedangkan pasal lainnya hanyalah pasal ikutan. Ali rutin mengunggah video seruan untuk menerapkan khilafah melalui sosial

media termasuk Facebook.

"Karena itulah, saudara Alimudin Baharsyah ditetapkan sebagai tersangka makar melalui sosial media Facebook," jelasnya.

Chandra pun menghimbau agar segenap ulama, *habaib*, para tokoh, aktivis dan umat Islam memberi doa dan dukungan kepada Ali yang konsisten memperjuangkan syariah dan khilafah.

"Khilafah adalah ajaran Islam, mendakwahkan khilafah bukan makar, mendakwahkan khilafah bukanlah tindakan kriminal," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melalui Kasubdit II Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Himawan Bayu Aji, pada Senin (6/4/2020), memberikan keterangan hukum atas penangkapan dan penahanan Ali.

Dalam keterangannya, Mabes Polri pada pokoknya menjerat Ali dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal penghapusan diskriminasi ras dan etnis, kemudian juga Pasal 207 penghinaan terhadap penguasa dan ditambahkan pasal berlapis terkait UU Pornografi. **fs**

ILF: Tuduhan Makar Terhadap Dakwah Khilafah Adalah Kezaliman Besar

Mendakwahkan khilafah bagian dari mengamalkan ajaran agama yang dijamin konstitusi.

Delik makar melalui Facebook yang disematkan kepada aktivis Islam Ali Baharsyah karena mendakwahkan kewajiban menegakkan khilafah di medsos dinilai zalim dan mengganggu akal waras publik.

"Tuduhan makar atas dakwah khilafah merupakan suatu kezaliman yang besar. Apalagi tuduhan makar menggunakan sosmed (Fb), itu jelas sangat mengganggu akal waras publik," ujar Dewan Pembina LBH Pelita Umat Wahyudi al Maroky saat menjadi *keynote speaker* dalam *Islamic Lawyers Forum ILF edisi April 2020: Adakah Kriminalisasi Khilafah pada Kasus Baharsyah?* Ahad (12/4) dalam kanal Youtube *LBH Pelita Umat*.

Wahyudi mengatakan tentu para penegak hukum paham istilah makar itu. Apalagi para ahli hukum. "Namun jika tetap dipaksakan dakwah khilafah dikatakan makar, lalu apa kata dunia nanti?" tanyanya retorik.

Ia mengingatkan empat imam mazhab telah membahas wajibnya khilafah sebagai ajaran Islam. Apakah ada yang merasa lebih paham tentang khilafah daripada empat imam mazhab besar itu? Khilafah sebagaimana ajaran Islam yang lain seperti

shalat, puasa, zakat dan lain-lain.

"Menjelaskannya dan mendakwahkan di tengah-tengah umat merupakan amal shalih dan bagian dari ibadah. Ini sebagaimana menjelaskan hukum tentang shalat, puasa, zakat dan lain-lain. Ini bagian dari mengamalkan ajaran agama yang dijamin konstitusi," bebernya.

Wahyudi juga mengingatkan khilafah itu merupakan warisan Rasulullah SAW yang dilaksanakan oleh para khalifah setelah Rasulullah SAW wafat.

"Kalaupun saat ini belum bisa diterima dan dilaksanakan sebagaimana juga saat ini shalat dan puasa juga belum dilaksanakan oleh sebagian orang, maka bukan berarti ajaran shalatnya yang ditolak. Bukan pula, dikatakan shalat tertolak atau jadi tidak wajib," bebernya.

Selain itu, Ali juga dikenai delik SARA-Ras karena membela Muslim Uighur, dia dipersoalkan dengan pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 UU No 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Karena unggahan video yang mengkritik kebijakan zalim rezim komunis Cina



terhadap Muslim Uighur di Xinjiang yang dianiaya, ditindas, diintimidasi, dipaksa melepaskan akidahnya dan membandingkan dengan etnis Cina di negeri ini yang aman dan mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya, mendirikan rumah ibadah, menjadi pejabat bahkan menjadi orang paling kaya. Video ini dianggap Rasis dan Menebar Kebencian berdasarkan SARA.

"Padahal Menyampaikan pendapat dan memberikan pembelaan terhadap Muslim Uighur yang sedang dizalimi oleh rezim Cina merupakan amal shalih. Justru kalau diam atas kezaliman itu termasuk zalim. Mengapa justru dituduh menyebarkan kebencian dan SARA? Semestinya negara berterima kasih kepada warganya yang sudah menyampaikan pembelaan atas penindasan Muslim Uighur," kata Wahyudi.

Bukankah dalam konstitusi negara wajib ikut serta dalam melaksanakan keter-

tiban dan perdamaian dunia? Justru bukan malah diam dan mengkriminalisasi. Di tengah merebaknya wabah corona, semestinya setiap insan semakin hati-hati dan banyak doa minta perlindungan kepada Allah.

"Semakin banyak ibadah dan tinggalkan berbagai perbuatan maksiat dan kezaliman," jelas Wahyudi.

Siapa pun juga pastilah akan menghadapi sang Pencipta Alam semesta. Tak akan ada yang kebal dengan kematian. Jika sekarang ada yang kebal hukum maka itu sangat sebentar saja ketikan di dunia dan sedang berkuasa.

"Kelak setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dan pertanggungjawaban di akhirat akan menggunakan standar hukum Allah, bukan undang-undang atau KUHP saat ini, maka bersegeralah taat kepada hukum-hukum Allah," pungkasnya. **fs/joy**

MAJELIS BENGKEL PENGUSAHA

Apapun, Tetaplah Optimis Pada Rahmat Allah!

Abah, curhat nih...

Sejak wabah ini resmi menyerang negeri +62, kita sudah memasuki paruh ketiga, 14 hari *stay at home*. Satu bulan sudah resmi mendekam di rumah. Jagat bisnis berguncang. Bisnis *gak* bisa jalan atau bisa jalan tapi tersendat. Parah. Hotel sepi, akhirnya tutup. Rumah makan juga bernasib sama. Konsumen *gak* berani lagi datang langsung. Bisnis lain juga sama nasibnya. Semua harus pakai internet. Mabuk internet. Omset turun drastis. Sikap pun telanjur jadi skeptis.

Yang pekerja juga sama. Mendadak nganggur menjadi pemandangan hari-hari. Pilihan rasionalnya mudik. Di kampung masih ada harapan! Begitu pikirnya. Tapi tak mudah buat mudik. Transportasi sudah sangat dibatasi. Banyak kota sudah menolak didatangi demi mencegah perluasan wabah ini. Situasi jadi serba runyam. Hari esok pun terbungkam apalagi masa depan, buram.

Di rumah, tugas bertambah. Jadi guru dadakan! Membantu, mendampingi anandanya belajar. Tak mudah memang menggantikan posisi guru di sekolah. Guru sudah pasti harus bisa sabar. Orang tua? Sudah pusing tujuh keliling dengan bisnis dan pekerjaannya, sekarang ditambah lagi dengan tugas tambahan. Akhirnya 24 jam berkubang di tempat. Di luar hanya masalah yang dilihat. Di rumah juga sama, masalah. Futur. Lama-lama bisa hancur! Duh Abah, kapan penderitaan ini segera berakhir?

Trully Muslimpreneur,

Pertama, kita harus selalu berharap kepada rahmat Allah! Berbaik sangka kepada-Nya, selalu mengharapkan rahmat, jalan keluar, ampunan, dan pertolongan dari-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 218)

Dari Watsilah bin Asqa, ia berkata; berbahagialah karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman: *Aku tergantung prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Apabila ia berprasangka baik kepada-Ku, maka kebaikan baginya, dan bila berprasangka buruk maka keburukan baginya.* (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Kedua, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa (*al-qanut* dan *al-ya'su*) adalah lawan dari berharap (*roja*). Putus asa dari rahmat Allah dan karunia-Nya hukumnya haram.

Dari Habab dan Sawa bin Khalid, keduanya berkata; Kami masuk bertemu dengan Rasulullah saw. sedangkan beliau sedang menyelesaikan suatu perkara. Kemudian kami berdua membantunya, maka Rasulullah saw. bersabda: *Janganlah kamu berdua berputus asa dari rizqi selama kepalamu masih bisa bergerak. Karena manusia dilahirkan ibunya dalam keadaan merah tidak mempunyai baju, kemudian Allah memberikan rizqi kepadanya.* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban)

Trully Muslimpreneur,

Jadi super jelas banget. Kita kaum beriman ini punya dua senjata yg super istimewa, selalu berharap kepada Allah SWT dan tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah SWT! Gak ada yang lebih istimewa dari keduanya. Inilah kekuatan spiritual yg amat dahsyat! Kenapa? Karena

senjata ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman!

Karena sudah punya dua senjata ini, kita jangan sampai terperosok di jalan yg salah. Kok bisa? Ya, sebab seperti yang sudah sama kita pahami, sudah jelas wabah ini terjadi karena dosa maksiat yg kita lakukan. Ada pelanggaran syariah.

Padahal, sudah amat jelas Allah SWT memberi petunjuk buat kita semua. Takwa dulu, baru kemudian Allah SWT beri *problem solving* yang hakiki.

"...Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. (QS at Thalaq (65):2).

Demikianlah salah satu pembelajaran besar dari musibah global ini bagi hidup dan bisnis kita. Musibah ini seharusnya menggugah kesadaran akan panggilan keimanan dan kinerja ketakwaan kita bagi mewujudkan bisnis yang penuh 'berkat' (profit yang terus tumbuh dan sinambung), berkah dan pejuang, menjadi bagian dari perjuangan mengembalikan kehidupan Islam.

Ya, karena kapitalisme sekulerisme sudah berkali-kali membuat kita terjerebab dalam masalah! Mengapa masih menolak untuk kembali pada Islam yang kaffah yang telah terbukti memberi rahmat bagi sekalian alam!

Jadi, masihkah ada alasan untuk tidak semangat dan tidak optimis pada rahmat Allah SWT?

Barakallahu fikum...

@bah Salim. Bengkel Pengusaha

Melawan Covid-19 dengan Obral Surat Utang

Opsi pemanfaatan anggaran yang sudah ada semestinya terlebih dahulu dimaksimalkan ketimbang berutang.



Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tancap gas mencari utang baru untuk membiayai defisit APBN tahun ini. Salah satunya adalah menerbitkan *global bond* sebesar USD 4,3 miliar. Jumlah itu setara dengan Rp 68,8 triliun (kurs Rp 16.000). Sri Mulyani sendiri menargetkan penerbitan *Pandemic Bond* dapat mencapai Rp 449,9 triliun. Ini dilakukan sebab, berdasarkan regulasi teranyar, batas defisit APBN dapat lebih dari tiga persen PDB.

Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Per-

ppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Menurut Sri Mulyani, penerbitan obligasi tersebut merupakan strategi pembiayaan APBN 2020 untuk menopang pembiayaan pandemi Covid-19. Selain itu, pembiayaan tersebut bertujuan untuk menambah cadangan devisa BI yang tergerus akibat menahan pelemahan nilai tukar Rupiah yang sempat mendekati Rp17 ribu per dolar AS.

"Penerbitan USD bonds ini untuk menjaga pembiayaan aman sekaligus menambah cadangan devisa bagi Bank Indonesia. Pemanfaatan dari penerbitan ini sangat positif di tengah turbulensi pasar keuangan global," kata Sri Mulyani, Rabu (8/4).

Di tengah situasi yang penuh turbulensi akibat pandemi Covid-19, pemerintah terpaksa mengobral surat utang dengan tenor panjang dan suku bunga yang tinggi. Tingkat bunga atau yield surat utang tersebut bervariasi dari 3,90 persen hingga 4,50 persen. Di antara surat utang tersebut ada yang jatuh tempo pada tahun 2070, alias baru lunas 50 tahun yang akan datang. Padahal, semakin panjang jangka waktunya, maka bunga surat utang semakin mahal. Namun, Sri Mulyani bangga dengan hal itu.

"Penerbitan tenor 50 tahun yang pertama kali dilakukan Republik Indonesia juga merupakan tenor terpanjang yang dilakukan pemerintah. Ini secara implisit menunjukkan kepercayaan investor terhadap *track record* dari kondisi ekonomi dan pengelolaan keuangan negara," paparnya, Selasa (7/4/2020).

Mudaratnya Banyak

Meskipun Sri Mulyani bertepuk dada atas penerbitan obligasi dengan mata uang asing tersebut, sebagian kalangan justru mengkritik langkah itu.

Ekonom senior Indef Didin S Damanhuri menyatakan bahwa opsi pemanfaatan anggaran yang sudah ada semestinya terlebih dahulu dimaksimalkan ketimbang berutang. Ia merujuk kepada pernyataan pemerintah sebelumnya bahwa terdapat anggaran dari penghematan sebesar Rp190 triliun dari total kebutuhan dana yang mencapai Rp405,1 triliun. Apalagi menurutnya surat utang global ini berpotensi membebani negara.

"Menunda proyek-proyek kurang prioritas seperti ibu kota negara, kereta cepat, dan sebagainya," ucap Didin dalam siaran *live* di akun Youtube Indef, Senin (13/4).

Kritik senada dikemukakan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Ajib Hamdani. Menurut dia, meski saat ini pemerintah bisa mendapatkan dana segar dengan waktu singkat dalam rangka penanganan Covid-

19, penerbitan surat utang global itu lebih banyak potensi mudaratnya dalam jangka panjang.

"Dengan tambahan utang dan bunga yang tinggi dan *un-structured* ini, maka akan banyak *crowding out* dalam 50 tahun ke depan untuk pembayaran utang," ucap Ajib dalam keterangan tertulisnya, Ahad (12/4).

Adapun *crowding out* yang dimaksud Ajib berkaitan dengan situasi terbatasnya pendanaan yang tersedia di Indonesia. Dampaknya, pemerintah dan swasta berebut mencari pendanaan di pasar modal. Namun, obligasi pemerintah biasanya lebih menarik bagi investor karena relatif lebih aman. Akibatnya, swasta harus memberikan bunga yang lebih tinggi pada obligasi yang ditawarkan.

Selain itu, menurut Ajib, utang jangka panjang tersebut akan menambah defisit transaksi berjalan atau *Current Account Deficit* (karena pemerintah harus rutin membayar bunga). Terlebih lagi pungkas dia, utang itu nantinya bakal membebani dunia usaha sebab sumber uangnya mau tidak mau pasti berasal dari pajak.[]

muis

MUAMALAH

Jual-Beli Wadhi'ah

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Jual beli *wadhi'ah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah. Mengapa disebut jual beli amanah? Karena penjual adalah orang yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan harga belinya, yang digunakan membeli barang yang dijualnya.

Jual beli *wadhi'ah* adalah jual beli dengan harga tertentu, dengan mengurangi modalnya. Dengan kata lain, yaitu dengan rugi. Dengan kata lain, menjual dengan harga pertama, dengan mengurangi sedikit harganya. Misalnya, penjual tersebut mengatakan kepada pembeli, "Aku menjual kepadamu barang ini dengan harga yang aku gunakan untuk membelinya. Harganya segini. Saya kurangkan untuk Anda, segini."

Misalnya, Muhammad membeli motor seharga 5 juta. Kemudian, Muhammad menjual motornya yang dibeli dengan harga 5 juta itu kepada Shalih, dengan harga 4,5 juta. Dia mengatakan kepada Shalih, "Saya beli motor saya seharga Rp 5 juta. Karena saya membutuhkan uang, saya jual kepada Anda, Rp 4,5 juta saja." Jual beli seperti ini disebut jual beli *wadhi'ah*.

Wadhi'ah itu secara harfiah artinya menggugurkan. Karena, ada sebagian harga barang yang dibelinya itu

digugurkan, atau dikurangi, sehingga dia menjual kepada orang lain, dengan harga yang lebih murah dari pada harga belinya.

Kebalikan dari jual beli *wadhi'ah* ini adalah *murabahah*. Sebagaimana yang dijelaskan, oleh Syekh Yusuf as-Sabatin, dalam kitabnya, *al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu-*



'ashirah, bahwa jual-beli *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan, ketika seseorang menjual barang dengan harga beli dia sebelumnya, disertai dengan tambahan keuntungan yang dia sepakati dengan pembeli berikutnya.

Jual beli *wadhi'ah* maupun *murabahah* sama-sama diperbolehkan. Meski yang satu dengan menambahkan

keuntungan saat menjual barang, sedangkan yang satunya lagi dengan mengurangi harganya.

Harga awal, yang dimaksud dalam jual beli *wadhi'ah* ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, harga yang harus dibayar pembeli saat akad. Adapun biaya yang dikeluarkan setelah harga awal tidak termasuk dalam komponen harga awal. Maka, penjual bisa menyatakannya dengan tiga redaksi, sebagai berikut:

- "Saya beli dengan harga 100 Dinar." Atau, "Modalku 100 Dinar.", Atau, "Ia menjadi milikku, dengan 100 Dinar." Ini jika dia ingin memberitahukan harganya saja.
- "Aku membeli dengan harga 100 Dinar. Aku melakukan sesuatu untuknya setara dengan 10 Dinar." Jika dia ingin memberitahukan harga, sekaligus biaya lain yang dibutuhkan. Ini demi menghindari kebohongan untuk mendapatkan tujuan tertentu.
- "Barang itu berguna untuk saya, dengan 100 Dinar, dan 10 Dinar." Ini jika ingin memberitahukan harganya, dan bantuannya.

Jual beli seperti ini dibenarkan secara syar'i, jika memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana di atas. *Wallahu a'lam.*[]

Rezim Joko Widodo baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 dalam rangka menghadapi wabah corona. Apa saja yang ada di dalam Perppu itu dan siapa yang akan diuntungkan dari lahirnya Perppu tersebut? Fokus mengupasnya.

Telaah Kritis Perppu No 1 Tahun 2020

Perppu Covid-19 ini tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena memang tidak terjadi kekosongan hukum.

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (dalam tulisan ini cukup disebut dengan "Perppu Covid-19").

Dalam konsideran, Perppu Covid-19 menyebutkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Covid-19 juga disebutkan telah memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Selain itu, wabah virus Covid-19 juga ikut berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Pembentukan

Meskipun di antara alasan yang menjadi dasar terbitnya Perppu Covid-19 adalah adanya kondisi darurat kesehatan, kegawatdaruratan di bidang kesehatan ini tidak bisa dijadikan dasar terbitnya Perppu. Mengingat, dalam urusan kegawatdaruratan kesehatan, Indonesia telah memiliki UU No 1 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

UU ini telah mengatur sejumlah rincian tindakan kegawatdaruratan kesehatan dimulai dari karantina rumah, karantina pintu masuk, pembatasan sosial berskala besar dan pamungkasnya karantina wilayah.

Artinya, Perppu Covid-19 ini tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 (1) UUD 1945 disebutkan: "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, menyebut ada tiga syarat sebagai parameter adanya "kegentingan yang memaksa" bagi Presiden untuk menetapkan Perppu yaitu:

Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Perppu Covid-19 ini tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena memang tidak terjadi kekosongan hukum, karena pemerintah telah memiliki UU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Perppu Covid-19 ini cacat hukum sebagaimana Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang diterbitkan Presiden, padahal Indonesia telah memiliki UU Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Massa.

Berbagai sarana norma hukum di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 telah sangat cukup dan tersedia untuk diterapkan dalam rangka mengatasi musibah virus Covid-19. Antisipasi dan pencegahan transmisi penyebaran virus Covid-19 melalui mekanisme *lockdown* (karantina wilayah) juga telah tersedia.

Namun, meskipun *lockdown* telah disampaikan sejumlah ahli medis, ulama, bahkan menjadi aspirasi publik untuk menanggulangi virus Covid-19, pemerintah justru mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kuat dugaan, pemerintah tidak mau memberlakukan *lockdown* karena pemerintah enggan untuk menjamin kebutuhan dasar orang dan hewan ternak sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018.

Celakanya, selain cacat prosedur Perppu ini juga menganut model "Omnibus Law" dalam penyusunannya. Sebab, Perppu Covid-19 ini telah *me-review* paling tidak 12 UU sektoral yang terkait.

Bedanya dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mereview 81 UU sektoral terkait, Perppu Covid-19 ini dapat langsung diterbitkan Presiden tanpa melalui pembahasan di DPR. Saat Perppu ini dibawa ke DPR untuk sidang pertama, DPR hanya berwenang untuk menerima atau menolak, bukan membahas Perppu Covid-19.

Pemasukan APBN

Ekonom Rizal Ramli jauh hari telah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 akan mentok di angka 4 persen. Dengan merebaknya virus corona dampaknya sangat serius, ekonomi bisa turun lagi 1 persen. Angka pertumbuhan ekonomi maksimal hanya tumbuh di angka 3 persen saja.

Rizal melihat, pemerintah Indonesia terlalu juma-wa dalam mengambil setiap kebijakan. Padahal, menurutnya, pemerintah tidak benar-benar mengerti persoalan yang terjadi.

Kondisi keuangan Indonesia sebenarnya sudah sangat sulit sebelum datangnya wabah corona. Namun, tampaknya Covid-19 ini menjadi "berkah" tersendiri bagi pemerintah.

Berdalih wabah virus Covid-19, pemerintah mengubah batas defisit APBN terhadap PDB yang semula hanya diperkenankan maksimal 3 persen, kini diperkenankan melebihi 3 persen, berapapun nilainya (pasal 2 ayat 1 a angka 1).

Melalui perubahan ini, pemerintah diperbolehkan membiayai APBN melalui pinjaman (utang) tanpa mengaitkan dengan batasan defisit APBN. Realisasinya, belum lama ini Menkeu Sri Mulyani menerbitkan obligasi yang tenornya hingga jangka waktu 50 tahun.

Karena seretnya pertumbuhan yang pasti berdampak pada merosotnya penerimaan negara dari sektor pajak, melalui Perppu Covid-19 penganggaran dan Pembiayaan APBN akan menggunakan anggaran yang ditopang dari:

1. Sisa Anggaran Lebih (SAL);
2. Dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
3. Dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
4. Dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
5. Dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maknanya adalah melepas (menjual) sejumlah saham BUMN. Dalam situasi seperti ini, tentulah saham BUMN akan dijual dengan harga murah dan ini tentu berkonsekuensi pada penurunan nilai uang negara, yang berarti merugikan keuangan negara.

Bermodal Perppu ini, optimalisasi pemasukan APBN akan mengandalkan dari sumber utang, optimalisasi dana terparkir (termasuk dana abadi dan cadangan), dan menjual aset negara melalui pelepasan kepemilikan Saham Negara pada BUMN. **Ahmad Khozinudin, Direktur LBH Pelita Umat**



Siapa yang Diuntungkan?

Anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 T (jumlah terbesar) bukanlah anggaran yang langsung menyentuh nadi ekonomi rakyat

Bila dicermati secara mendalam, terbitnya Perppu No 1 tahun 2020 ternyata bukan diarahkan pada urusan kesehatan, penanggulangan kegawatdaruratan atas terjadinya pandemik Covid-19, atau sejumlah langkah dan tindakan taktis dan strategis untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia.

Perppu justru lebih mengarah pada pemberian sarana legitimasi, antisipasi, rencana strategi, terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, beralih untuk penanganan pandemi Covid-19.

Dari postur anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 405,1 triliun, alokasi untuk bidang kesehatan yang menjadi alasan utama terbitnya Perppu Covid-19 kecil sekali, yakni hanya sebesar Rp 75 triliun.

Kondisi ini berdampak pada buruknya strategi penanganan virus Covid-19, hingga soal urusan Alat Pelindung Diri (APD) bagi dokter dan petugas medis tidak tersedia secara cukup. Padahal, ibarat pergi ke medan perang, APD adalah peralatan tempur wajib yang harus tersedia untuk pada dokter dan petugas medis.

Belum lagi sarana, fasilitas, ketersediaan sumber informasi yang valid, koordinasi lintas sektor dan pelaksana, rujukan medis, dan banyak soal lainnya yang sebenarnya juga butuh dukungan anggaran maksimal. Namun, prioritas anggaran yang dirancang justru bukan di sektor atau lini Kesehatan.

Sementara, anggaran sebesar Rp 110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, Rp 150 T untuk pemulihan ekonomi nasional dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.

Anggaran sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR hanya akan dinikmati kalangan tertentu, khususnya para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor.

Di pasal 9 Perppu Covid-19 disebutkan Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk.

Implikasinya, akan terjadi sejumlah perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya. (Pasal 10).

Lebih rinci lagi, anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 T (jumlah terbesar) bukanlah anggaran yang langsung menyentuh nadi ekonomi rakyat. Anggaran ini akan dinikmati oleh kelompok cukong, para penguasa besar, sektor perbankan dan bursa saham, dan pelaku ekonomi elite lainnya.

Dalam pasal 11 Perppu Covid-19, anggaran sebesar Rp 150 T ini akan digunakan untuk program pemu-

lihan ekonomi nasional melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan/atau investasi pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh pemerintah.

Artinya, sektor perbankan dan pasar saham yang akan mendapatkan "Fasilitas Super Mewah" dari Perppu Covid-19. Padahal, diketahui secara umum justru bursa saham dan pasar finansial selama ini hanya menimbulkan ekonomi *bubble*, yang dapat meledak setiap saat.

Sektor ini juga dikuasai para kapitalis, para cukong, para pemain judi saham, para bos perbankan. Ada potensi, Perppu Covid-19 ini digunakan untuk "menyuntikkan dana besar" kepada para pengusaha besar agar bisnisnya tidak kolaps, dengan dalih untuk pemulihan ekonomi nasional.

Keadaan ini sangat berpotensi terjadinya korupsi politik, sebagaimana penulis tulis dalam artikel berjudul "Bahaya Korupsi Politik Dibalik Terbitnya Perppu No 1 tahun 2020". Peristiwa perampokan anggaran negara beralih pemulihan ekonomi seperti pada kasus BLBI dan Bank Century, bukan mustahil akan terulang kembali.

Apalagi, melalui ketentuan pasal 27 Perppu Covid-19, seluruh Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, dalam mengelola anggaran tidak dapat dipersoalkan secara hukum, baik secara pidana, perdata hingga secara tata usaha negara.

Persoalan Hukum

Beberapa persoalan hukum terkait norma pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020 ini, berupa:

Pertama, Pasal 27 Perppu Covid-19 ini berpotensi menjadi pasal "Bunker Hukum". Semua kebijakan atau keputusan Pejabat Penyelenggara Negara, baik berupa pengaturan (Regeling) Keputusan-Keputusan (Bashicking), atau tindakan administratif lainnya akan kebal hukum, tidak dapat dipersoalkan secara hukum beralih pasal 27 Perppu Covid-19 ini.

Kedua, potensi terjadinya korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara baik karena adanya perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor akan dikesampingkan.

Pada, dasar penyidikan perkara korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara baik karena adanya perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor adalah adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan tafsir adanya kerugian Keuangan Negara.

Lantas, bagaimana BPK bisa masuk dan mengaudit objek biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, jika semua objek dimaksud diklasifikasikan sebagai biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara?

Itu artinya, BPK tak akan bisa mengawasi secara utuh menyeluruh anggaran penanganan wabah COVID-19 yang mencapai Rp 405,1 triliun. Sebab, jika anggaran ini dikorupsi, sejak awal Perppu Covid-19 telah membuat klasifikasi bahwa anggaran ini adalah biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

KPK juga tidak bisa masuk untuk ikut mengawasi realisasi anggaran apakah telah sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kewenangannya, mematuhi hukum dan tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum, sebab meskipun ada temuan tetap saja tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena telah dikunci Perppu Covid-19 dengan pernyataan "biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara".

Ketiga, ada semacam "niat jahat" untuk melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan Perppu Covid-19. Pada ketentuan pasal 27 ayat (2) tegas dinyatakan bahwa Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu Covid-19, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktidat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, melalui penerbitan Perppu ini Pemerintah telah membuat serangkaian rencana dalam rangka menjalankan Perppu Covid-19 yang akan melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika demikian realitas arah dan kebijakan alokasi anggaran yang disasar oleh Perppu Covid-19, proteksi hukum bagi pejabat penyelenggara kebijakan melalui pengaktifan pasal 27 begitu utuh dan menyeluruh, maka sudah jelas Perppu ini hanya akan menguntungkan kalangan elite saja. Rakyat hanya dijadikan *address*, wabah virus Corona hanya dijadikan alasan, sementara arah kebijakan pemerintah hanya berorientasi untuk melindungi dan menyelamatkan ekonomi dan bisnis kelompok tertentu.[] **Ahmad Khozinudin, Direktur LBH Pelita Umat**

Perang Najd Hingga Perang Badar Kedua

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Dengan kemenangan yang diraih pada Perang Bani Nadhir tanpa jatuh korban, kekuasaan kaum Muslim di Madinah semakin kokoh. Otomatis kaum munafik mulai ciut nyalinya untuk melakukan tipu muslihat secara terang-terangan. Sementara itu, Nabi *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* bisa lebih leluasa menyusun rencana untuk menumpas orang-orang Arab Badui usai Perang Uhud yang sering menyakiti kaum Muslim, menyerang dan menghinakan dai-dai Rasulullah, bahkan pernah merencanakan penyerangan ke Madinah.

Sebelum Nabi *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* sempat memberikan pelajaran kepada para pengkhianat itu, prajurit sandi Madinah menginformasikan bahwa orang-orang Badui dan Arab pedalaman dari Bani Muharib dan Bani Ts'alabah dari Ghathafan sedang menyiapkan serangan. Segera saja Nabi *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* keluar ke dataran Najd, sekaligus menebarkan rasa gentar di hati orang-orang Badui yang keras kepala itu. Dengan begitu, mereka tidak akan berani mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara mereka terhadap kaum Muslim.

Rupanya orang-orang Arab Badui yang suka merampas dan merampok itu tidak mendengar kedatangan pasukan Islam. Itu sebabnya mereka langsung ketakutan dan kocar-kacir di puncak-puncak bukit. Intimidasi pasukan Islam membuahkan hasil. Mereka pun kembali ke Madinah dengan tenang.

Sehubungan dengan peristiwa itu, para pakar peperangan menyebutkan satu perang yang dilakukan oleh kaum Muslim di daerah Najd pada bulan Rabiul Akhir, atau Jumadil Ula 4 H. Mereka menamakannya Perang Dzatur Riqa'. Terjadinya peperangan saat itu dipicu oleh beberapa hal yang terjadi di Madinah. Perang Badar yang dijanjikan bersama Abu Sufyan sekembalinya dari Uhud kian dekat. Mengosongkan Madinah untuk berperang, dengan membuka kesempatan kepada orang-orang Badui dan Arab pedalaman untuk melakukan pemberontakan, tentu amat berbahaya bagi kepentingan politik dan strategi perang. Jadi, orang-orang Badui itu mesti bungkam lebih dahulu sebelum kaum Muslim menyongsong Perang Badar kedua.

Adapun pendapat bahwa perang yang dipimpin oleh Rasulullah *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* pada bulan Rabiul Akhir, atau Jumadil Ula 4 H adalah Perang Dzatur Riqa' tidak benar. Perang Dzatur Riqa' diikuti oleh Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari, padahal Abu Hurairah masuk Islam beberapa hari sebelum Perang Khaibar. Bukti lain bahwa perang ini terjadi setelah 4 H adalah karena dalam perang tersebut Nabi *Shalla-*

Llahu 'alaihi wa Sallama melakukan shalat Khauf.

Shalat Khauf disyariatkan para Perang Usfan, dan semua sepakat bahwa Perang Usfan terjadi setelah Perang Khandak, sementara Perang Khandak pada penghujung tahun 5 H.

Perang Badar Kedua

Pada akhir Perang Uhud yang mengakibatkan banyak kaum Muslim gugur sebagai *syahid*, panglima Perang Quraisy,

Abu Sufyan merasa berat untuk mendatangi tempat yang telah disepakati itu dan dia berharap Nabi Muhammad *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* tidak memenuhi janjinya.

Meski demikian, Abu Sufyan tetap ingin melancarkan *psywar* untuk melemahkan mental kaum Muslim. Dia terus menunjukkan sikap yang seakan-akan ingin sekali menyerang Rasulullah *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* dengan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar. Sikap ini terus ditunjukkan di hadapan publik, sehingga kabar ini sampai juga ke Madinah. Bahkan dia rela

Madinah, Nu'aim melaksanakan misinya di tengah kaum Muslim. Dia berusaha menyebar berita ini ke tengah kaum Muslim, sehingga di antara mereka ada yang terpengaruh.

Kondisi ini tentu sangat menggembirkan kaum munafik. Sampai akhirnya, kabar ini terdengar oleh Rasulullah *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama*, sehingga baginda *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* khawatir tidak ada sahabat yang mau dimobilisasi ke Badar. Meski demikian, baginda *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* tetap bertekad untuk memenuhi janjinya, walaupun harus berangkat seorang diri.

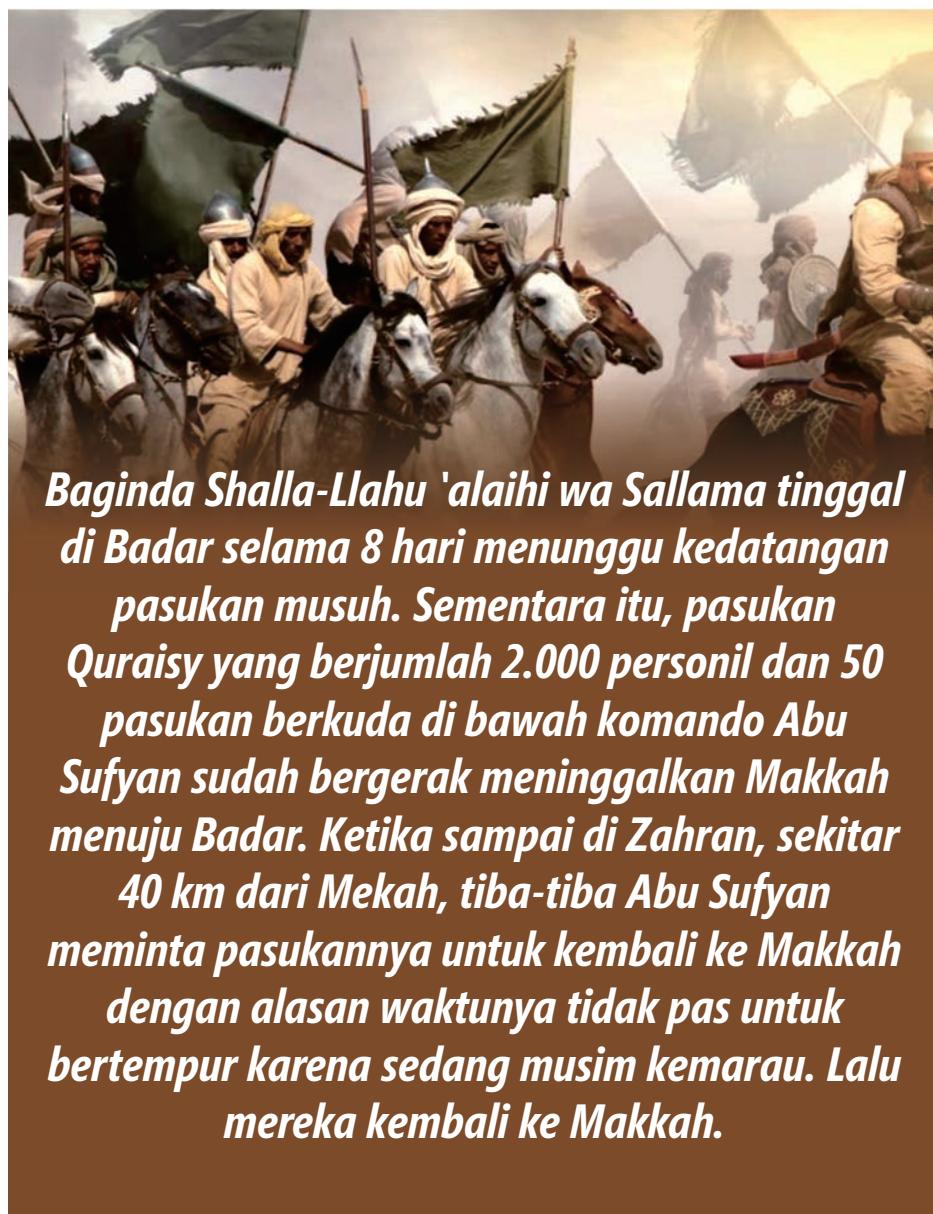
Namun akhirnya, Allah menghilangkan rasa takut ini dari hati kaum Muslim dan siap menghadapi pasukan Quraisy.

Menuju Badar

Janji dan tantangan inilah yang mendorong Rasulullah *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* untuk memobilisasi pasukan dan berangkat menuju Badar pada bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriyah. Baginda *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* berangkat bersama 1500 personil dengan 10 pasukan berkuda. Bendera perang diserahkan kepada 'Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu anhu* dan baginda *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* menempatkan 'Abdullah bin Rawahah *Radhiyallahu anhu* sebagai wakil baginda *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* di Madinah selama baginda *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* di medan pertempuran.

Baginda *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* tinggal di Badar selama 8 hari menunggu kedatangan pasukan musuh. Sementara itu, pasukan Quraisy yang berjumlah 2.000 personil dan 50 pasukan berkuda di bawah komando Abu Sufyan sudah bergerak meninggalkan Makkah menuju Badar. Ketika sampai di Zahran, sekitar 40 km dari Makkah, tiba-tiba Abu Sufyan meminta pasukannya untuk kembali ke Makkah dengan alasan waktunya tidak pas untuk bertempur karena sedang musim kemarau. Lalu mereka kembali ke Makkah.

Sehingga akhirnya, dalam peristiwa ini tidak terjadi kontak senjata. Setelah 8 hari berlalu, Rasulullah *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* dan pasukan kembali ke Madinah. Peristiwa mangkirnya pasukan Quraisy dari janji mereka mempunyai pengaruh besar dalam mengembalikan jiwa besar kaum Muslimin setelah mengalami peristiwa pahit dalam Perang Uhud tahun sebelumnya. Peristiwa ini dikenal dengan beberapa nama, yaitu Badar al-Mau'id (Badar tempat yang direncanakan sebagai arena perang), Perang Badar kedua, Perang Badar terakhir dan Perang Badar Shugra (Kecil).[]

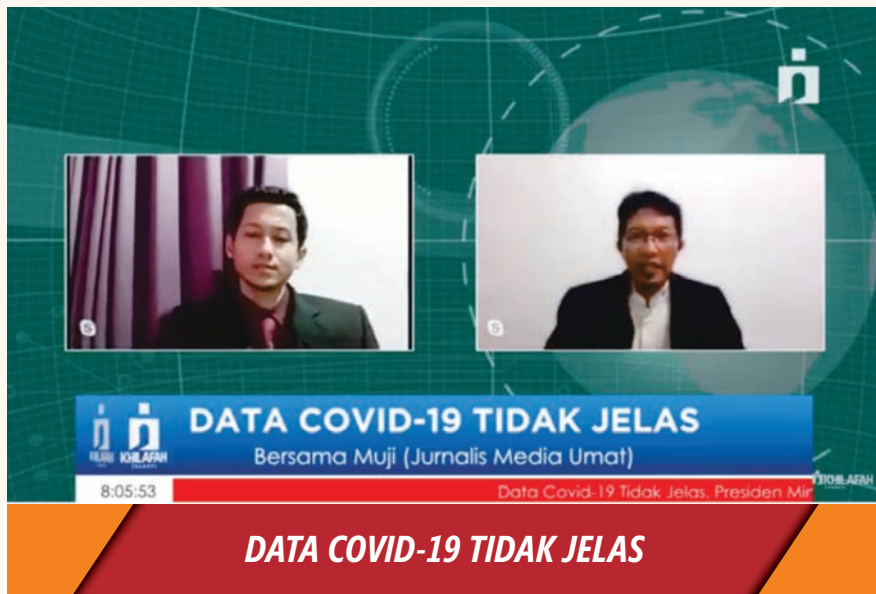


yaitu Abu Sufyan sebelum meninggalkan arena pertempuran, ia sempat berkoar-koar dan melontarkan tantangan, "*Tahun depan kita bertempur (lagi) di Badar (Shafra)!*" Mendengar tantangan ini, Rasulullah *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama* menyuruh salah seorang sahabat untuk menjawab tantangan tersebut dan menyanggupinya.

Badr Shafra' adalah sebuah tempat pasar musiman yang biasanya berlangsung sejak awal Dzulqadah sampai tanggal 8. Ketika masa yang dijanjikan hampir tiba,

membayar Nu'aim bin Mas'ud al-Asyja'i yang sedang umrah ke Mekah dengan 20 ekor unta untuk menebar berita persiapan kaum Quraisy dalam rangka menyerang kaum Muslim.

Tujuan mereka tentu untuk menjatuhkan mental kaum Muslim, sehingga mereka enggan berangkat berperang bersama Rasulullah *Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallama*. Jika Rasulullah dan para sahabat tidak keluar, berarti kaum Quraisy punya alasan untuk tidak keluar juga. Ketika kembali ke



Salah satu faktor semakin karut marutnya penanganan wabah corona karena ketidakjelasan data, hal itu diungkap Muji (Redpel Tabloid Media Umat) dalam acara *Kabar Malam: Data Covid-19 Tidak Jelas*, Selasa (14/4) malam di kanal Youtube *Khilafah Channel*.[]



Yang berwenang dan berkewajiban mengadopsi hukum syara' sebagai UUD dan UU adalah khalifah, begitu ungkap Ustadz Syamsudin Ramadhan dalam *Kajian Kitab Muqaddimah Dustur: Pasal 3*, Selasa (14/4) siang di *Khilafah Channel*.[]



Karut-marutnya penanganan wabah corona di Indonesia dan dunia dikupas Iwan Januar (pengamat politik dan sosial) dalam *Kabar Malam: Update Covid-19 Dunia dan Nasional*, Senin (13/4) malam di kanal Youtube *Khilafah Channel*.[]



Analisa Henry Kissinger akan perubahan tata dunia pasca wabah corona dikupas tuntas Ustadz Muhammad Ismail Yusanto dalam *Fokus: Masa Depan Indonesia dan Dunia Pasca Wabah Corona*, Senin (13/4) siang di kanal Youtube *Khilafah Channel*.[]



Ustadz Rokhmah S. Labib membahas wabah corona dari sudut pandang akidah dan syariah Islam, dalam tausiah *Melihat Covid-19 Harus Selalu dari Sudut Pandang Akidah dan Syariah Islam*, Jumat (10/4) di kanal Youtube *Khilafah Channel*.[]



LBH Pelita Umat menggelar *Islamic Lawyers Forum: Adakah Kriminalisasi Khilafah pada Kasus Ali Baharsyah?* Ahad (12/4) di kanal Youtube *LBH Pelita Umat*. Diskusi hukum tersebut mengundang pembicara: Eka Jaya (Ketua LBH Pejabat); Abdul Chair Ramadhan (Ahli Pidana, Direktur HRS Center); Azam Khan (Advokat, Aktivis Hukum); Chandra Purna Irawan (Sekjen LBH Pelita Umat).[]

Hari Kiamat Kelak, Rakyatmu Akan Menuntutmu

Tahun 67 H, Sulaiman bin 'Abdul Malik, khalifah saat itu, menunaikan ibadah haji bersama saudara sepupunya, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Ketika itu, Amirul Mukminin sedang wukuf, melihat dan takjub terhadap ribuan orang yang berada di atas Jabal Rahmah.

Ia berkata kepada 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, "Apakah kamu tidak melihat orang-orang itu? Jumlah mereka tidak bisa dihitung, kecuali oleh Allah. Rezekinya pun tak ada yang bisa melapangkan, kecuali Dia."

'Umar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mereka hari ini adalah rakyatmu. Tetapi, esok mereka akan menuntutmu di sisi Allah." Amirul Mukminin menjawab, "Semoga Allah mengujimu dengan mereka."

Dalam kendaraan yang penuh berwibawa, Amirul Mukminin tiba di Madinah. Berkumpullah di sekelilingnya para pemuka, pembesar dan orang-orang kaya Madinah. Ia memberikan kepada mereka harta dan hadiah yang banyak sekali.

Amirul Mukminin bertanya kepada 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, "Bagaimana menurut pendapatmu, apa yang aku lakukan ini?" "Umar menjawab, "Menurutku, Andajustru menjadikan yang kaya semakin kaya, dan membiarkan yang miskin tetap miskin."

Ketika 'Umar bin 'Abdul 'Aziz menjadi khalifah, kalimat yang dia ucapkan kepada Sulaiman bin 'Abdul Malik itulah

yang terngiang-ngiang di telinganya.

Suatu malam, Amirul Mukminin, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz duduk, setelah mengerjakan shalat dua rakaat. Sambil meletakkan kepalanya di atas tangannya. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Sambil menangis ter-



sedu-sedu. Istrinya, Fatimah, berkata, "Dia menangis tersedu-sedu. Dia terus begitu hingga sepanjang malam. Setelah masuk Subuh, dia puasa."

Sang permaisuri bertanya, "Wahai Amirul Mukminin,

apakah Anda menangis karena sesuatu yang terjadi sebelum malam ini?" Ia menjawab, "Tentu saja. Biarkanlah aku dengan urusanku, dan Engkau dengan urusanmu." Fatimah berkata, "Aku ingin tahu saja."

'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata, "Kalau begitu, aku akan memberitahumu.. Aku melihat diriku, tiba-tiba aku mendapati aku telah mendapatkan amanah untuk mengurus urusan umat ini. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang hitam hingga yang putih. Aku mengingat yang jauh dan hilang dari penglihatan, dan orang fakir yang membutuhkan, tawanan yang lenyap di telan bumi. Orang-orang seperti mereka, di negeri yang nun jauh dan di ujung bumi ini.

Aku tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyaiku tentang mereka. Nabi Muhammad Shalla-Llahu 'Alaihi wa Sallama akan menuntutku tentang ihwal mereka. Aku takut akan diri setakut-takutnya, sehingga kedua mataku mengalirkan air mata. Hatiku bergetar. Ketika aku mengingat ini, aku semakin gemetar. Aku sudah menceritakan ini kepadamu. Sekarang nasihatilah aku, atau tinggalkan aku."

Ya Rabb. Begitu luar biasanya, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Khalifah yang wara', zuhud, ahli ibadah dan adil ini. Iya, "Rakyatmu hari ini, kelak akan menuntutmu di hadapan Allah." **har**

KRISTOLOGI

Maksud Hati Membantah, Malah Dapat Hidayah



Gary R Miller

Dengan maksud mengangkat derajat Kristen di mata kaum Muslimin, Gary R Miller, misionaris Kristen asal Kanada, berencana mencari celah-celah kesalahan Alquran. Menurutnya kesalahan sejarah dan ilmiah yang bakal ditemukan dapat bermanfaat bagi dirinya atau pun misionaris lain untuk mengajak orang Islam masuk Kristen.

"Mulai hari itu, saya membaca Alquran untuk mencari celah-celah kesalahan kitab ini. Melalui usaha ini, saya berharap dapat meng-

angkat derajat pemeluk agama Kristen di hadapan umat Islam," ujarnya mengenang peristiwa tahun 1977 saat dirinya menjadi anggota dewan ahli matematika dan logika Universitas Toronto, Kanada.

Dengan optimis, Gary yakin akan menemukan yang dicarinya. "Karena Alquran diturunkan 14 abad yang lalu di padang pasir, saya berpikir bahwa kitab ini sangat terbelakang serta dipenuhi dengan kekurangan," katanya.

Namun temuan fakta berbicara lain. Ia pun mulai menyadari bahwa Alquran ternyata membahas berbagai masalah yang sama sekali tak ditemukan di kitab samawi lainnya.

Kitab ini membuat Gary semakin penasaran untuk mempelajari lebih mendalam lagi. Ketika membaca sura An-Nisa', ayat 82, ia sangat terkejut. Ayat tersebut menyebutkan; "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Alquran? Kalau kiranya Alquran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."

Sebagai seorang ilmuwan, Gary memahami bahwa mengenali dan membandingkan berbagai pendapat adalah salah satu metode ilmiah dalam rangka membuktikan kebenaran. Dia juga mengatakan, "Alquran dengan ayat-ayat yang sangat lugas mengajak manusia untuk berpikir. Di dunia ini, tak ada seorang penulis pun yang menulis sebuah buku, kemudian dengan penuh keyakinan meminta semua pihak untuk membuktikan kesalahan-kesa-

lahannya."

Setiap membaca halaman demi halaman hati Gary berdebar-debar menanti ayat yang menyinggung peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, seperti wafatnya Sayidah Khadijah atau kehidupan anak-anaknya. Namun, ia malah dikejutkan oleh surat yang bernama Maryam. Sedangkan dalam kitab Injil dan Taurat, tak ada satu pun surat khusus dengan nama Maryam. Selain itu, Alquran menyebut nama Isa Al-Masih sebanyak 25 kali, sedangkan kitab ini hanya menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW sebanyak 5 kali.

"Bahkan, tak ada surat yang menyebutkan nama putri atau istri Rasulullah SAW!" simpulnya penuh kekaguman.

Namun, Gary masih belum mantap dengan apa yang didupakannya. Ia pun kembali melanjutkan mencari kesalahan-kesalahan Alquran. Kali ini, ia dikejutkan oleh ayat lainnya, yaitu Surat Al Anbiya ayat 30, yang berbunyi: "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup..."

Ayat tersebut benar-benar menggunakan intelektualitas Gary. "Ayat ini menyinggung masalah ilmiah yang penemunya mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1973. Ayat ini menjelaskan teori "Big Bang"

yang menghasilkan penciptaan dunia, langit, dan bintang-bintang."

Bagian akhir ayat tersebut membuat Gary berdecak kagum tak habis pikir. Pasalnya, bagian akhir ayat tersebut menyebutkan bahwa "air adalah sumber kehidupan" merupakan salah satu keajaiban penciptaan alam yang baru dipahami oleh sains modern. Ilmuwan modern membuktikan bahwa sel hidup terbentuk dari sitoplasma atau zat separuh cairan lekat, sedangkan bagian inti sitoplasma bersumber dari air.

"Dengan mempelajari ayat ini, saya sama sekali tidak lagi mempercayai klaim-klaim bohong yang menyebut Alquran sebagai buatan Muhammad SAW semata. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW yang tak bisa menulis dan membaca sebelum diturunkannya Alquran, 1400 tahun yang lalu, tiba-tiba dapat berbicara soal materi dan gas yang membentuk dunia?"

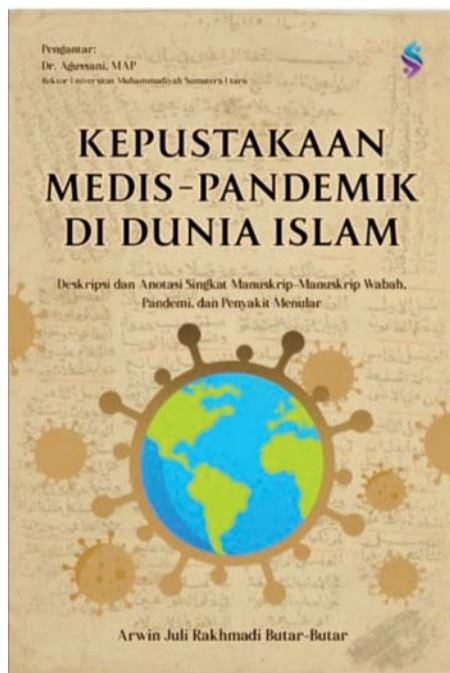
Tak cukup dengan meneliti Alqurannya secara langsung, Gary pun berdebat dengan pakar kristologi dunia Ahmed Deedad. Meski tidak bisa membantah, Gary tidak langsung masuk Islam. Semuanya ia renungkan dalam-dalam.

Setelah perenungan yang dalam tepatnya pada 1978, Gary memutuskan menerima hidayah dengan memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ahad Omar. **joy dari berbagai sumber**



Oleh: **Prof Dr Ing Fahmi Amhar**

Pandemi Covid-19 dan keputusan stay@home menjadi tren di seluruh dunia. Siswa belajar di rumah. Mahasiswa kuliah di rumah. Bahkan ada



■ Buku Kepustakaan Medis Pandemi di Dunia Islam.

kampus menyediakan PLC (*programmable logic controller*) di laboratorium sehingga bahkan mahasiswa teknik kimia bisa praktikum dari rumah! Maka ujian skripsi pun kini dilakukan *online*. Dan ada kampus di Jepang yang sudah mewisuda lulusannya secara *online*.

Profesional yang pekerjaannya lebih banyak terkait data, bisa bekerja dari rumah (*working from home*). Belanja juga makin banyak dilakukan secara *online*. Bahkan sidang kabinet pemerintahan yang dilakukan dari tempat masing-masing terbukti efektif. Setidaknya bisa dimulai dan diakhiri *on time*. Tidak menguras waktu di perjalanan yang kadang macet. Jadi timbul pertanyaan, kalau seperti ini, masihkah diperlukan pembangunan ibukota negara yang baru dan akan menguras dana ratusan trilyun? Tidak cukupkah ibu kota virtual saja?

Dunia mengalami percepatan dalam memasuki peradaban baru. Era industri 4.0. *Internet of things*, *bigdata* dan *artificial intelligence* (AI) digunakan sebagai alat baru menghadapi pandemi, selama pandemi dan bahkan pasca pandemi.

Sejarah Islam meninggalkan banyak catatan tentang bagaimana para ilmuwan pada masa itu mengalahkan pandemi. Tidak hanya sekadar dalil umum dari Nabi tentang mengisolir wilayah yang terkena wabah, namun lebih detail lagi.

Ibnu Sina (980-1037), menemukan bahwa untuk mencegah penularan penyakit antar manusia, diperlukan isolasi selama 40 hari. Ia menyebut metode ini al-

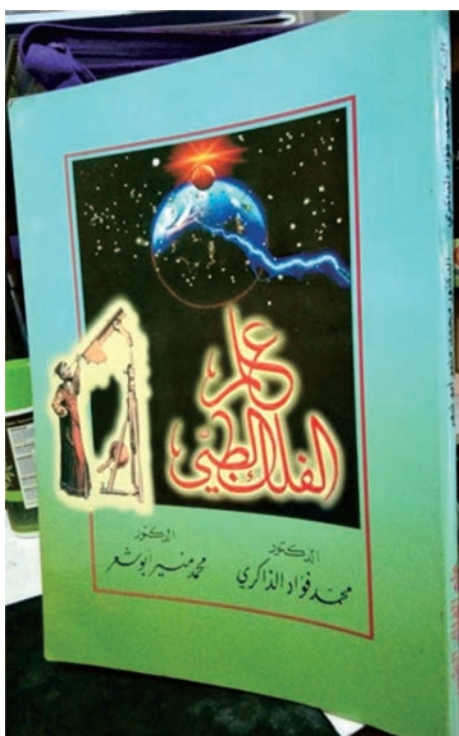
Arba'iniya ("empat puluh"). Pelajar dari Venesia (Italia) mendengar suksesnya metode ini dan membawa pengetahuan ini ke Italia. Mereka menyebutnya "quaranta" (40 dalam bahasa Italia) atau "quadraginta" (bahasa Latin). Dari sinilah kata "karantina" berasal.

Dr Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) memanfaatkan momentum corona ini untuk mengumpulkan kepustakaan medis pandemik di dunia Islam dalam sebuah buku.

Sementara buku ini dapat diunduh secara cuma-cuma dari tautan http://www.umsu.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/buku_KEPUSTAKAAN-MEDIS-PANDEMIK.pdf

Secara umum, buku ini berisi informasi sejumlah manuskrip yang membahas tentang wabah penyakit, khususnya yang dikenal dalam sejarah dengan "tha'un". Melalui informasi yang pernah ditulis para ulama dan dokter Muslim ini, tampak bahwa fenomena pandemi sejatinya telah berulang kali terjadi sepanjang sejarah. Selain itu, berbagai literatur ini juga memberi kearifan bahwa setiap fenomena wabah senantiasa terkait dengan aspek sosial, medis, dan syariat.

Bahkan perjuangan melawan pandemi juga dilakukan oleh para astronom, yang sehari-hari tampak tak terlalu berhubungan dengan dunia medis. Buku "Ilm al-Falak al-Thibby" ini jika



■ Buku "Ilm al-Falak al-Thibby".

diterjemah kira-kira menjadi "Astro-Medika". Buku ini adalah analisis filologi dan kajian (tahqiq dan dirasah) atas naskah berjudul "Risalah Fima Yahtajuhu

ath-Thabib Min 'Ilm al-Falak" (catatan tentang apa-apa yang dibutuhkan seorang dokter dari ilmu astronomi) karya Abu Nashr Adnan bin Nashr bin Manshur (wafat tahun 548 H/1153 M). Naskah ini diteliti oleh dua orang peneliti asal Suriah: Dr. Muhammad Fuad adz-Dzakiry & Dr. Muhammad Munir Abu Syi'r.

Dalam buku ini, ilmu falak (astronomi) menggunakan istilah "ilm an-nujum" (ilmu bintang). Istilah ini di masa lalu meliputi astronomi dan astrologi sekaligus, yang dalam perkembangannya dibedakan. Menurut kedua muhaqqiq naskah ini, tokoh-tokoh dahulu (*qudama'*) telah sepakat bahwa ilmu-ilmu pra-Islam



■ Hampir semua kapal induk Amerika sandar karena ribuan awaknya terinfeksi virus Corona.

(*al-'ulum al-awwaliyah al-asasiyah*) yang seyogianya dikuasai seorang dokter di antaranya adalah astronomi yang hubungannya dengan kedokteran dikatakan sangat erat.

Hubungannya adalah, astronomi memberikan letak, posisi, dan konstelasi benda langit yang terkait dengan keadaan di bumi seperti sinar matahari, udara, waktu, musim dan perubahannya, dan lain-lain. Maka hal ini berkorelasi dengan kesehatan, jenis penyakit, periode mengambil tindakan medis, mengonsumsi obat, dan lain-lain. Untuk membaca utuh buku ini diperlukan penguasaan sejarah sosio-intelektual, terminologi astronomi dan medis zaman itu dan di dunia Islam secara umum. Sebab lazimnya sebuah karya peradaban, ia muncul sebagai respon kondisi saat itu, tidak di ruang hampa.

Sejarah Perubahan Peradaban

Peradaban bisa berubah dengan revolusi, perang besar, bencana alam besar dan wabah penyakit.

Contoh sejarah wabah dalam mengubah peradaban yang telak adalah Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Romawi Byzantium. Umat Islam memerlukan waktu lebih dari 800 tahun untuk membuka kota ini. Salah satu faktor yang akhirnya mendukung Muhammad al-

Fatih berhasil mengalahkan kota ini adalah kenyataan bahwa Eropa belum pulih benar pasca pandemi pes yang disebut dengan "Black death". Diperkirakan saat itu 200 juta orang di Eurasia mati. Itu hampir setengah populasi benua itu. Selama periode 1347-1453, total 61 laporan wabah dicatat di Byzantium. Terjadi dalam sembilan gelombang epidemi utama, 11 wabah lokal dan 16 periode bebas penyakit.

Hampir seabad kena gelombang wabah, Byzantium dan kerajaan-kerajaan Kristen bawahannya jelas melemah. Pola yang terjadi adalah wabah menyerang, penduduk musnah. Akibatnya lahan

pertanian tak tergarap dan terjadilah krisis pangan dan ekonomi. Militer pun akhirnya sulit dibangun maupun dibiayai.

Apakah wabah corona saat ini akan melemahkan seluruh negara adidaya yang saat ini secara tak langsung menjajah negeri-negeri Islam? Yang jelas baik Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, India bahkan sekarang mengalami kesulitan. Di Israel, Perdana Menteriya bahkan terkena Covid-19 sehingga diisolasi.

Bisa jadi dampak corona menjadi titik balik bagi perjuangan umat Islam. Para penguasa sekuler yang selama ini kokoh berkuasa dengan sokongan adidaya kafir sedang diuji. Bisakah mereka mengendalikan situasi di tengah wabah, tanpa dukungan kuat seperti yang biasa mereka dapatkan dari majikan-majikan asing mereka?

Wabah corona memang berpotensi menyerang semua orang. Tetapi virus itu adalah makhluk Allah Yang Maha Kuasa. Jika Dia mau, Allah bisa saja menjadikan corona sebagai berkah bagi umat Islam dan musibah bagi musuh Islam. Kepada Allah kita berserah diri dan berharap pertolongan-Nya, Dialah sebaik-baik pemberi pertolongan dan sebaik-baik pemimpin.[]

Reaksi Dunia Islam atas Penghapusan Khilafah

Mereka tetap menentang penghapusan Khilafah meskipun setiap protes dapat ditindak dengan hukuman mati sesuai dengan Hukum Pengkhianatan yang Diamandemen.

Penghapusan khilafah Islam memberikan dampak signifikan bagi Turki dan dunia Islam. Terlepas dari sejarahnya yang dinamis, khilafah, baik sebagai institusi atau sebagai sesuatu yang dibayangkan masyarakat, telah lama terkait dengan persepsi keyakinan sebagai Muslim dan tatanan dunianya.

Bahkan sebelum Majelis Nasional Agung Turki (*Grand National Assembly/GNA*) menyatakan keputusan penghapusan, masa depan yang tidak pasti dari Khilafah Utsmani telah memancing reaksi keras dari para ulama Islam dan tokoh masyarakat.

Penghapusan simbol persatuan pada 3 Maret 1924 itu tidak hanya membuat marah para pendukung Khilafah di Turki, tetapi juga memicu reaksi internasional

l, dan dikenal sangat setia kepada Khilafah, melakukan pemberontakan di bawah kepemimpinan seorang ulama, Syeikh Said.

Perdebatan seputar faktor pemicu pemberontakan dan sejauh mana peran motivasi religius (bukan nasionalis) memang mengemuka. Namun, tidak diragukan lagi, runtuhnya Khilafah menimbulkan reaksi yang berbeda. Bahkan, kepala pengadilan militer turut menentang para pemimpin pada tahun 1925 dengan berargumen bahwa beberapa dari mereka "membela Khilafah" sebagai alibi bagi tindakan mereka.

Di Luar Turki

Di luar Turki, konsekuensi penghapusan Khalifah bersifat multidimensi. Keputusan itu

menyampaikan khutbah yang mengumandangkan Khilafah Utsmani sebagai pembela kehormatan umat Islam di dunia dan jawaban atas harapan kaum Muslim akan pembebasan.

Dalam sebuah pesan kepada Republik Turki yang diterbitkan di *Pioneer Mail* pada 14 Maret 1924, Khilafat Movement mendesak Mustafa Kemal untuk "menegakkan Khilafah dan Islam" dan memperingatkan bahwa "penghapusan secara tiba-tiba ini merupakan tindakan menentang agama Islam."

Mohammad Ali dari Universitas Aligarh menyatakan bahwa Khilafah adalah esensi Islam, dan Muslim adalah "musuh dari mereka yang menghancurkan Khilafah, apakah itu Inggris atau Turki."

Kemal menjawab bahwa Khalifah

mayoritas Muslim, pandangan Mustafa Kemal Pasha ini keliru dan muncul dari ambisinya meniru bangsa Eropa."

Percobaan Suksesi

Setelah penghapusan Khilafah muncul semacam perebutan suksesi posisi khalifah. Episode paling penting yang melibatkan Raja Hussain dari Hijaz (sebelumnya Syarif Mekah; d. 1931), dan Raja Fuad I dari Mesir. Hussain, yang sebelumnya mengklaim sebagai khalifah, kembali ke aliansinya dengan Inggris melawan Utsmani selama Perang Dunia Pertama, menerima berita tentang resolusi Turki saat mengunjungi putranya Abdullah, Amir Trans-Jordan (Meninggal 1951).

Abdullah mendorong ayahnya untuk memanfaatkan momen itu dan mengajukan tawaran untuk gelar bergengsi itu. Di Suriah, Abdullah mendorong elemen pro-Hashemite untuk mengorganisir kampanye dukungan untuk Hussain, meminta dia untuk mengambil posisi yang kosong dan menyatakan kesetiaan mereka kepadanya sebagai khalifah.

Pada saat yang sama, pejabat Hijazi dipanggil ke gedung pemerintah di Jeddah, wakil Raja memberi tahu mereka bahwa Yang Mulia telah menerima tanggung jawab kekhalifahan. Namun di Irak, pengakuan kekhalifahan Hussain ditunda sampai pertengahan Maret atas perintah putranya yang lain, yang lebih berhati-hati, Raja Faysal I (wafat 1933).

Meskipun begitu, faktanya citra Hussain di dunia Muslim telah ternoda karena aliansinya dengan Inggris, pengkhianatan terhadap pemerintahan Khilafah Utsmani, dan kegagalan untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan Arab. Tawarannya untuk kekhalifahan oleh karena itu lebih banyak mendapatkan kritik, terutama di Mesir dan India, daripada dukungan.

Kembali di Hijaz, Hussain mencoba untuk memperkuat posisinya dengan menunjuk dewan penasihat kekhalifahan sebanyak 31 anggota, dan menyerukan kongres kekhalifahan yang akan diadakan di Makkah.

Kongres itu akhirnya bertemu selama musim haji pada bulan Juli 1924, tetapi, tidak mendapat dukungan umat Islam yang luas dan penuh dengan perdebatan. Tidak lebih dari satu tahun kemudian, karena ia terbukti tidak dapat bertahan dari ekspansi Saudi, Hussain menyerah dan meninggalkan Hijaz untuk pengasingan. Tawarannya untuk khalifah itu kemudian dipadamkan, sekali dan untuk selamanya.[] **Septian AW, sejarawan**



■ Khilafah Movement di India mengecam penghapusan khilafah dan mendesak penegakkan kembali khilafah.

berupa ketidakpercayaan dan kemarahan para pihak yang sebelumnya meragukan gerakan Kemalis. Selama beberapa tahun setelah runtuhnya reaksi terhadap keputusan tersebut dimanifestasikan dalam berbagai ekspresi, politik dan lainnya.

Di Turki

Di Turki, pergolakan rakyat merebak di Istanbul, dan Anatolia bagian barat laut, selatan, dan tenggara. Mereka tetap menentang penghapusan Khilafah meskipun setiap protes dapat ditindak dengan hukuman mati sesuai dengan Hukum Pengkhianatan yang Diamandemen.

Pada periode yang sama, penduduk Kurdi yang merespon positif seruan jihad oleh Khilafah Utsmani dalam Perang Dunia

membangkitkan kemarahan dan kekecewaan, yang diungkapkan secara vokal dari Albania hingga ke Libya.

Kantor Kementerian Luar Negeri mengirimkan catatan koran Albania yang menyesalkan langkah penghapusan Khilafah, yang telah menyingkirkan "pusat agama" umat Islam dari Turki.

Di Jeddah, para penduduk merasa kecewa terhadap penghapusan Khilafah, yang semula diharapkan dapat membebaskan mereka dari "mimpi buruk" kekuasaan Sharif Hussain.

Para 'ulama' di Tripoli, Libya menulis surat terbuka kepada Mustafa Kemal yang mengungkapkan penentangan mereka dan menggambarkan Khilafah sebagai "esensi kehidupan" Islam, sebagaimana jiwa bagi tubuh.

Dari mimbar Masjid Umayyah di Damaskus, Syeikh Abdul-Qadir al-Muzaffar,

telah dilengserkan, dan karena makna Khilafah itu telah tercakupi dalam makna pemerintah dan republik, maka jabatan khalifah tidak lagi diperlukan. Ia juga menekankan bahwa keberadaan jabatan khalifah di Republik Turki terbukti mengganggu persatuan politik di dalam dan di luar Turki.

Penulis salah satu karya di jurnal *Aman-i-Afghani* itu tidak sepakat. Ali mengklaim bahwa "bagi mayoritas umat Islam dan para pemikir Islam, khilafah merupakan salah satu institusi Islam yang terpenting, sarana terbaik untuk menjamin persatuan Islam, dan instrumen terpenting untuk mengakhiri aliansi politik."

Ia menyesalkan pandangan Kemal yang menyatakan bahwa "persatuan Islam hanyalah isapan jempol yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah terwujud." Ali menyatakan bahwa "menurut pendapat



Oleh: Dr M Kusman Sadik

Penanganan Corona Makin Mengkhawatirkan

Wabah virus Corona di Indonesia kini berkembang semakin cepat. Makin hari jumlah kasus yang terkonfirmasi dan yang meninggal terus bertambah. Sebarannya juga makin merata dan meluas hingga ke pelosok negeri. *Updated* data hingga 13 April, kasus positif corona di Indonesia sudah mencapai 4.241 orang, yang meninggal sebanyak 373 orang (8,8 persen) dan yang sembuh 359 orang (8,5 persen).

Sangat riskan karena jumlah pasien yang meninggal melebihi jumlah pasien yang sembuh. Itu pun dari angka kasus yang konfirmasi, belum terhitung yang meninggal dari kasus PDP. Berdasarkan data ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus corona terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan angka persentase kematian akibat corona (*mortality rate*) Indonesia kini tertinggi kedua di dunia setelah Italia.

Kondisi tersebut makin mengkhawatirkan karena penanganan terhadap wabah ini terlihat menyimpan banyak masalah. *Pertama*, data tidak akurat yang tercermin dari tidak sinkronnya data pemerintah pusat dan daerah. BNPB sendiri selaku Tim Gugus Tugas penanganan corona membenarkan ketidaksinkronan data tersebut.

Kepada *Tempo* (5/4) BNPB juga menyatakan bahwa sumber data dari Kemenkes sangat terbatas yang mengakibatkan BNPB tidak mempunyai data yang lengkap dan akurat. Data kasus corona di Indonesia memang jadi perdebatan di dalam dan luar negeri. Ini berangkat dari kekhawatiran terhadap data corona Indonesia yang disinyalir *under reported*.

Semestinya pemerintah memiliki data akurat jumlah yang terpapar virus corona, jumlah ODP, jumlah PDP, termasuk jumlah pasien yang berada pada kondisi kritis di seluruh Indonesia. Akurasi data ini sangat pen-

ting agar terhindar dari sikap seakan-akan mampu, seakan-akan terkendali, dan sebagainya.

Kedua, sebagai konsekuensi dari ketidakakuratan data tersebut adalah semakin tidak jelasnya perencanaan penanganan wabah corona ini. Ketidakefektifan inilah yang mendorong Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI pada Jumat (10/4).

Intinya PDUI sangat mengkhawatirkan penanganan corona ini yang seakan negara tidak hadir. Misalnya APD yang dibutuhkan para tenaga medis sangat langka di pasaran. Kalaupun ada dikuasai oleh sindikat tertentu sehingga harganya melambung tinggi jauh di atas harga normal. Hal ini terlihat berjalan begitu saja padahal negara memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah APD ini.

Padahal ketidaktersediaan APD telah terbukti berdampak

fatal. Para dokter yang menangani corona sudah lebih dari 30 orang yang meninggal dunia. Menurut PDUI kondisi ini telah menyebabkan ratusan ribu dokter dan tenaga kesehatan resah, susah, gundah, gelisah dan marah. Sementara nurani mereka terusik, tidak tega menyaksikan pasiennya penuh harap dalam penderitaan terinfeksi virus corona yang mematikan itu.

Ketiga, kebijakan pemerintah menghadapi wabah ini dinilai justru lebih cenderung menyelamatkan ekonomi ketimbang menyelamatkan nyawa warganya. Salah satunya adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Perppu ini menuai kritik karena dianggap cenderung menyelamatkan stabilitas keuangan pemerintah ketimbang menyelamatkan nyawa rakyat.

Pada Perppu ini yang menonjol upaya mengamankan perekonomian dan keuangan negara dari kegoncangan. Ada pun isu pandemi corona cenderung hanya sebagai legalitas un-

tuk mengeluarkan Perppu ini. Misalnya pada sisi postur anggaran, Perppu ini menyebutkan akan digelontorkan sebesar Rp 405,1 triliun. Namun anehnya dari total dana tersebut yang dianggarkan untuk bidang kesehatan, yang secara langsung berhadapan dengan wabah corona, hanya Rp 75 triliun.

Dana untuk bidang kesehatan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun, untuk pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun dan sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Padahal alasan utama bagi keluarnya Perppu ini adalah untuk menghadapi ancaman pandemi corona.

Sungguh, negeri ini membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah, seperti Khalifah Umar bin al-Khattab.[]



Ramadhan Sudah di Depan Mata Lakukan Tiga Hal Ini Yuk!

Oleh: Ihsan Tampubolon, Aktivis Dakwah dan Youtuber Ideologis

Bro en Sis, pandemi corona ini betul-betul telah menyita seluruh perhatian dunia, sehingga banyak yang *ngga* nyadar bulan suci Ramadhan *insya Allah* tiba sekitar satu minggu ke depan. Padahal, kalau kita melihat bagaimana sikap Rasulullah dan para sahabat terkait bulan yang satu ini, so pasti kita akan terkejut terkagum-kagum.

Mu'alla bin al-Fadhl, salah satu ulama tabi' tabiin berkata, "Dulu para sahabat, selama enam bulan sebelum datang Ramadhan, mereka berdoa agar Allah memperemukan mereka dengan bulan Ramadhan. Kemudian, selama enam bulan sesudah Ramadhan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadhan." (*Lathaif al-Ma'arif*, hlm. 264)

Kalau mau dibandingin, sibuk mana antara Rasulullah dan para sahabat dengan kita? Aktivitas Rasulullah dan para sahabat yang begitu padat, merintis daulah Islam di tengah ancaman koalisi Quraisy-Yahudi serta sekutunya, bekerja keras menyatukan umat hingga mengutus delegasi untuk berdakwah dari Bahrain hingga Romawi; tapi tidak pernah kehilangan rasa rindu pada bulan Ramadhan.

Nah, untuk mempersiapkan Ramadhan yang tinggal sepekan lagi, ada tiga tips yang bisa kamu lakukan. Apa saja ya itu?

Pertama, tingkatkan ibadah-ibadah sunnah. Apa yang terjadi jika kamu menyalakan kendaraan kamu yang

selama 11 bulan tidak pernah dihidupkan? Pasti mesinnya akan susah banget bekerja, bukan? Mungkin businya berkarat, kabelnya digigit tikus, bensinnya habis.

Begitupula dengan tubuh kita. Jika kita termasuk sebagian besar Muslim yang pada umumnya hanya meningkatkan ibadah di bulan Ramadhan, tentu akan kaget saat kita memasuki bulan Ramadhan tanpa persiapan. Oleh karena itu, kita butuh 'pemanasan'.

Apalagi buat kamu para siswa dan mahasiswa, *ngga* ada alesan lagi 'cape sekolah' atau 'cape kuliah' di Ramadhan ini, *insya Allah*. Sehingga betul-betul bisa memaksimalkan waktu selama Ramadhan untuk meningkatkan amal ibadah kamu sekalian.

Kedua, sabar dan persiapkan kondisi fisik. Para peneliti mengamati bahwa puncak pandemik corona di Indonesia jatuh pada bulan Mei. Artinya, yang terjadi saat ini barulah di awal pandemik dengan laju pertambahan kasus yang semakin hari semakin meningkat. Tidak menutup kemungkinan saat Ramadhan nanti, pandemik corona masih tetap ada dan bisa jadi semakin besar.

Tentu mudah bagi rezim untuk berkata "tenang, jangan panik" sementara mereka tidak mengalami apa yang menimpa sebagian besar rakyat yang menyambung hidup dari hari ke hari. Kita pun sadar bahwa bodoh jika bergantung pada rezim yang pro kapitalis, bukan pro rakyat ini. Makanya, menjelang bulan Ramadhan ini, betul-

betul kita siapkan kondisi fisik, dan juga finansial, serta meningkatkan kesabaran agar selama Ramadhan kita bisa mendekatkan diri pada Allah lebih banyak lagi.

Ketiga, agendakan kajian-kajian online. Kalau Ramadhan tahun lalu kita masih bisa bergerilya menghadirkan kajian-kajian Ramadhan di masjid sekitar rumah kita, maka tahun ini kita mesti beradaptasi dengan mengagendakan kajian-kajian Islam melalui daring. *Masya Allah*, antusiasme ini terlihat hanya dalam waktu 5 minggu sejak kasus corona ini menimpa Indonesia, para aktivis dakwah sudah banyak belajar cara membuat kajian-kajian interaktif secara online menggunakan berbagai media. Yang tadinya buka aplikasi *whatsapp* saja kebingungan, kini mahir membuat *online meeting room*, *live streaming*, serta mengundang ummat untuk mengikuti kajian-kajian mereka.

Hal ini tidak terlepas dari dorongan *ghirah* para pendakwah yang terus berjuang sebagaimana Rasulullah dan para sahabat tak pernah berhenti berdakwah walau apa pun yang menimpa mereka. Apalagi di bulan Ramadhan, dengan banjir pahala dari Allah Azza wa Jalla, sudah sepatutnya bagi kita untuk tetap menghadirkan kajian Islam yang dibutuhkan ummat di bulan Ramadhan 1441 Hijriyah ini. *Wallahu 'alam*.[]



Ada lagi stres yang dialami ibu-ibu karena keberadaan anak-anaknya selama 24 jam sehari di rumah.

Dunia tiba-tiba melambat. Wabah virus corona melumpuhkan hampir semua sektor kehidupan. Sekolah-sekolah sepi dari hiruk pikuk anak-anak. Mobil pribadi terparkir di garasi rumah-rumah tanpa bergerak. Lokasi piknik ditinggalkan para wisatawan. Mal-mal kehilangan para pembelanjanya.

Di antara yang merasakan dampak pandemi ini adalah kaum perempuan. Para istri, ibu dan juga gadis lajang. Baik di sektor domestik maupun publik, perempuan mengalami nestapa di balik wabah pandemi corona. Memang kaum pria juga, namun inilah potret perempuan terdampak corona, baik secara langsung maupun tak langsung.

Sektor Domestik

Laporan kantor berita BBC menyebutkan, korban meninggal wabah corona kebanyakan dari kaum pria. Di AS, misalnya, pria dua kali lebih banyak meninggal karena virus corona daripada perempuan. Demikian pula di Eropa Barat, 69 persen dari semua kematian akibat virus corona adalah laki-laki. Pola serupa telah terlihat di Cina dan di tempat lain.

Tentu saja para korban itu meninggalkan janda-janda beserta anak-anaknya. Siapkah sistem mengayomi dan mencukupi kebutuhan para janda dan anak-anaknya ini? Dalam sistem Islam, mereka akan dijamin negara. Tetapi dalam sistem sekuler kapitalis saat ini, sulit mengharapkan negara ikut menjamin kebutuhan mereka. Sedangkan saat ini saja, masyarakat bergotong-royong sendiri, saling membantu yang membutuhkan. Para janda inipun, kelak akan dibiarkan menghidupi diri mereka sendiri. Sungguh malang.

Tak hanya itu, korban PHK yang meluas dari kalangan laki-laki, juga bisa berdampak pada perempuan. Di AS, 1,4 juta orang menjadi pengangguran pada bulan Maret, lonjakan terbesar sejak 1975. Perempuan lebih naik 0,9 persen dalam pengangguran, dibandingkan dengan kenaikan 0,7 persen untuk pria.

Masih "mending" jika perempuan

yang di-PHK memiliki suami. Masih ada yang menanggung hidupnya. Tetapi suami yang di -PHK, dia memberi dampak pada keluarganya. Tanpa subsidi atau bantuan pemerintah, istri ikut menderita. Apalagi dalam situasi *stay at home*, otomatis belanja istri meningkat tajam untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum seluruh anggota keluarga. Sudahlah pemasukan berkurang, kini terancam kelaparan. Lagi-lagi nestapa menimpa perempuan.

Belum lagi bagi laki-laki yang bekerja di sektor informal dan tak bisa mengandalkan gaji bulanan. Sopir, pedagang asongan, usaha kuliner dan katering, tukang ojek, tukang bangunan dan masih banyak lagi. Tak adanya pendapatan akan mengganggu penyaluran nafkah pada istri. Akibatnya, istri stres. Bahkan jadi korban kekerasan dalam rumah tangga akibat percekocokan gara-gara uang.

Ada lagi stres yang dialami ibu-ibu karena keberadaan anak-anaknya selama 24 jam sehari di rumah. Sebagaimana diketahui, sekolah adalah tempat terbaik bagi anak-anak untuk menyalurkan energinya yang tak terbatas. Bermain, bercengkerama dan belajar bersama teman-temannya adalah aktivitas terbaik mereka. Namun kini tak bisa dilakukan. Ibu-ibu harus memutar otak selama kebersamaan mereka. Mengatur energi dan waktu agar tugas keibuan dalam mengelola rumah tangga tidak ikut keteteran. Masya Allah, luar biasa ujian para ibu di masa pandemi wabah.

Sektor Publik

Di sektor publik, kaum perempuan rawan terdampak corona. Terutama mereka yang selama ini terpaksa atau dipaksa menghidupi dirinya sendiri. Seperti kita ketahui, banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah. Dan, pekerjaan perempuan yang terbanyak adalah di sektor-sektor yang justru rawan terpapar virus mematikan ini. Misalnya, sektor kesehatan dan sektor pariwisata.

Lebih-lebih lagi, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan itu dari rumah. Penelitian Institute for Fiscal Studies UK

menggambarkan, perempuan Inggris sepertiga kali lebih besar kemungkinannya untuk bekerja di sektor yang ditutup karena pandemi, seperti industri ritel dan perhotelan (BBC, idem). Sementara penelitian Tertilt mengamati pasangan heteroseksual, 8-12 persen di antaranya terpaksa melakukan peran gender terbalik ketika *lockdown*. Misal, istri adalah dokter medis di garis depan, dan suami pekerja kantor yang bisa *work at home*.

Suami akhirnya menjadi pengasuh utama anak. Mengingat di AS 60 persen pengasuhan anak dilakukan oleh perempuan, menurut Tertilt, kondisi terbalik ini, di masa mendatang dapat menyebabkan perubahan signifikan. Apakah perubahan baik? Bisa, jika suami mampu melibatkan diri dalam tumbuh kembang anak secara maksimal. Jika, tidak, tentu sebaliknya.

Di Indonesia kondisinya pun sama. Perempuan rata-rata bekerja di sektor pariwisata, restoran, hotel dan bahkan dunia hiburan. Seperti gedung bioskop, karaoke, tempat bermain, dll. Selain itu, banyak yang digaji secara *freelance* sebagai *sales girl* produk *fashion*, *make up*, otomotif dan rokok. Kini, mereka kehilangan pendapatan dari itu semua tanpa pihak yang menanggungnya.

Kabar buruknya lagi, bisa saja perempuan ini menjadi pihak yang rawan terpapar virus corona. Sebab, tempat kerja seperti sektor kesehatan, hotel, dunia hiburan, tempat wisata dan restoran adalah lokasi penularan virus yang potensial. Sungguh malang.

Sementara itu, pekerja rumahtangga tak kalah nelangsa. Mereka banyak yang tidak terlindungi dari pandemi. Misalnya para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Diperkirakan terdapat 400 ribu perempuan yang bekerja sebagai PRT di Hong Kong yang kebanyakan dari Filipina dan Indonesia (BBC).

Beban mereka kian berat selama wabah, karena ketidakpastian. Pasalnya, imbauan *stay at home* menyebabkan hari libur akhir pekan mereka terampas. Terpaksa mereka tetap bekerja di rumah majikan tanpa bisa ke mana-mana. Seperti memasak, mengasuh anak atau merawat

orang tua majikan, tanpa kompensasi. Jika mengambil hari libur diancam akan dipecat.

Padahal, ada jutaan orang di Filipina dan Indonesia yang bergantung hidup pada transferan para pekerja migran. Demikianlah nasib perempuan sebagai tulang punggung perekonomian. Jika saat ini sistem Islam yang menaungi, perempuan bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab atas pemenuhan ekonomi keluarganya. Justru, dengan dominasi kaum perempuan di seluruh dunia kerja, kaum laki-laki kehilangan peluangnya untuk meraih pekerjaan. Akibatnya, tetap berdampak pada kaum perempuan.

Ujian untuk Bertahan

Tidak ada yang senang dengan situasi pandemi. Semua merasakan dampaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Baik orang dewasa maupun anak-anak. Sebab, demikianlah Allah SWT menurunkan ujian bagi semua hamba-Nya. Tak terkecuali kaum perempuan.

Dalam situasi pelik saat wabah corona seperti saat ini, perempuan benar-benar sedang diuji. Kaum ibu yang biasanya hidup normal, kini harus bisa mengencangkan ikat pinggang. Kalau perlu terpaksa menurunkan standar hidup, demi bisa bertahan.

Kaum ibu juga harus bersadar, jika mendapati suaminya terdampak. Baik terkena sakit, kehilangan pendapatan atau tak mampu membawa pulang uang nafkah. Kebersamaan sehari-hari dengan suami, bahkan juga ujian. Mampukah ia melewati nestapa, bersabar dan tidak menyerah pada keadaan.

Tentu saja, selain berdoa dan ikhtiar, tidak lupa untuk terus mengupayakan sistem Islam agar ditegakkan. Sebab, jika sistem ini diterapkan, perempuan memiliki peran terbaik yang boleh jadi minim potensi terdampak pandemi. Terlebih, sistem Islam memiliki mekanisme mencegah wabah, tak hanya secara kuratif, tapi preventif. Sehingga, mestinya kaum perempuan terdampak minimal dalam pusaran pandemi. *Wallahu a'lam.* **kholda**

Mengapa Istri Minta Cerai?

Seorang suami bingung. Tiba-tiba istrinya minta cerai. Entah ke berapa kali permintaan ini dilakukan. Alasannya, sang istri merasa tak lagi bisa bahagia. Bahkan merasa sudah tak punya rasa cinta. Sebuah WA diterimanya: "Umi sudah mencoba bahagia, tapi tidak bisa." Suami hanya membacanya. Tidak dibalas. Dia diam dalam bingung. Apa salahnya?

Bagaimana istri yang telah diberinya anak-anak yang lucu, tiba-tiba merasa tidak bahagia? Apa ukuran bahagia istri, sehingga merasa sulit bahagia? Bukankah segalanya sudah punya? Suami, anak-anak, rumah, perabotan, dan bahkan kendaraan meski roda dua. Mengapa masih saja kurang bahagia?

Ya, saat ini angka perceraian begitu tinggi. Yang memprihatinkan, kebanyakan datang dari gugatan para istri. Alasannya, kebanyakan faktor ekonomi atau ketidakharmonisan. Padahal jika ditilik standar ekonominya, mereka, para istri ini, tidak miskin-miskin amat. Tapi mengapa banyak istri yang merasa tidak tenteram hidupnya?

Wahai para suami, jika istrimu minta cerai, diamkan saja dulu. Jangan langsung kau terima tantangannya dengan penuh emosi. Walau talak di tanganmu, jangan sembarangan kau kabulkan. Upayakan dulu perbaikan. Analisa dulu, kira-kira apa penyebab tidak bahagianya istrimu. Ada banyak kemungkinan. Antara lain berikut:

1. Istri menyandarkan bahagia pada suami

Padahal, bahagia letaknya di hati. Bahagia itu adalah ridha Allah, bukan yang lain. Ketika kita berumah tangga dan mengikuti syariat Allah, menjalankan hak dan kewajiban dengan makruf, itulah bahagia. Jadi, rasa bahagia itu harus ditumbuhkan sendiri, bukan bergantung pada suami. Bukan pula karena ukuran

materi. Maka, bahagia itu saat ridha atas takdir yang menyimpannya. Termasuk qadha' atas kepemilikan suami atas dirinya.

2. Istri stres atau bahkan depresi

Istri yang minta pisah, sesungguhnya sedang mengalami tekanan jiwa akibat lelah fisik dan jiwanya. Ia merasa suami tidak membantu meringankan beban fisiknya atau membesarkan hatinya. Menghibur di kala lelah. Ia merasa menderita sendiri, tetapi tidak berani meminta pertolongan. Ia merasa butuh bantuan, tetapi bingung harus bagaimana. Ia terlalu banyak pikiran, tapi tak mampu menguraikan akar masalahnya.

3. Jenuh menjalani rutinitas

Ada kejenuhan menjalani hidup bersama suami yang mungkin kian gersang. Bayangkan saja, tiap hari ia melakukan kegiatan yang sama. Rutinitas yang sama. Menghadapi tembok dan ruang yang sama. Terkadang, ada rindu terpendam yang sulit diekspresikan. Ada harapan ingin diselamatkan suami. Apalagi jika suami kurang memperhatikan hal-hal kecil, seperti memberikan senyuman, pelukan, belaian, ucapan terima kasih, dan mendengarkan curhatnya. Jenuh pun melanda.

4. Rindu akan eksistensi dirinya

Seorang istri adalah pasangan suami, tetapi dia juga seorang individu wanita yang butuh akan eksistensi dirinya. Banyak istri yang sebenarnya memendam obsesi akan cita-cita dirinya yang tak kesampaian setelah menikah. Istri kurang waktu untuk mengembangkan potensi dirinya, hingga ia kecewa dan merasa kurang berharga. Coba tanyakan, apakah ada obsesi istri yang belum kesampaian. Berikan dia *me time* yang cukup untuk

menyenangkan dirinya. Memanjakan diri dengan melejitkan potensinya. Siapa tahu itu menjadi jalan bahagianya. Misal, ada istri yang dulu bercita-cita jadi desainer busana, lalu setelah menikah tidak tersalurkan. Mengapa tidak diasah lagi? Tentunya setelah kerepotan istri teratasi.

5. Merasa hidup dalam sunyi

Banyak suami-istri yang tidak mampu menjalin persahabatan dengan akrab. Di antara keduanya masih ada jurang rasa malu, segan/sungkan dan bahkan takut dalam segala interaksinya. Tidak ada komunikasi yang cair, penuh keakraban dan canda tawa. Yang ada masing-masing jaim (jaga imej). Suasana rumah menjadi tegang, terlalu ketat aturan, dingin dan kaku. Anggota keluarga tidak menyatu dan larut dalam suasana ceria. Masing-masing hidup dalam dunia bekunya.

6. Istri ingin perbaikan suami

Istri minta cerai, artinya istri minta perbaikan suami dalam memperlakukannya. Ia hanya butuh perhatian lebih. Andai suami lebih peduli, lebih peka, lebih mesra, lebih royal memberi dan lebih banyak memuji, niscaya ia akan berubah pikiran.

7. Tumbuhkan kembali cinta kasihnya

Bukankah dulu kalian khitbah dengan getaran rasa? Bukankah di awal menikah ada gairah cinta yang tak terlukiskan? Hadirkan itu kembali. Demi menyelamatkan ikatan suci yang telah setengah jalan dilalui. Toh tinggal setengah jalan lagi. Tak lama. Sebentar lagi kalian berdua sama-sama menua. Tidakkah ingin kebersamaan anak-anak sampai mereka dewasa? **kholda**



Mendorong Anak Shalat Tepat Waktu

KONSULTASI

Diasuh oleh:
Dra (Psi) Zulia Ilmawati

Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Ibu Pengasuh Rubrik Konsultasi Keluarga yang saya hormati, saya seorang ibu memiliki anak usia SMP. Dari apa yang disampaikan guru-gurunya, perkembangan anak saya di sekolah selama ini cukup bagus. Belajar semangat, ibadahnya juga rajin. Hanya saja, kalau sudah di rumah apalagi beberapa pekan ini, saat anak harus belajar di rumah, semangat beribadahnya tidak seperti saat di sekolah. Lebih sering berlama-lambat shalat dari pada tepat waktu. Apa yang sebaiknya saya lakukan, untuk mendorong agar anak tetap semangat beribadah, sesemangat saat di sekolah? Mohon saran.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

WT

Wa'alaikumsalam Wr Wb.

Ibu WT yang baik,
Sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya taat pada perintah Allah SWT. Shalat merupakan ibadah yang harus dikerjakan dalam kondisi apa pun, kecuali karena ada alasan syar'i untuk meninggalkan. Seperti saat haid dan nifas misalnya. Jadi, walaupun sakit, dalam perjalanan bahkan dalam kondisi perang pun sha-

lat tetap harus dilaksanakan. Shalat adalah tiang agama, pembeda antara orang Muslim dan kafir, ibadah yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak, dan shalat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar.

Ibu WT yang baik,

Betapa bahagianya jika kita memiliki anak-anak yang rajin shalat. Selalu tepat waktu dalam mengerjakannya, khusyu, dan berjamaah.

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan shalat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu." (TQS Thaha: 132)

"Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat pada usia tujuh tahun dan pukullah mereka pada usia sepuluh tahun jika mereka meninggalkannya." (HR. Ahmad)

Ibu WT yang baik,

Contoh atau keteladanan dari orang tua sangatlah penting, jika ingin anak-anak memperhatikan waktu shalat. Orang tua adalah cermin hidup bagi anak-anak. Jangan

kita menyuruh anak untuk shalat tepat waktu, tapi kita masih asyik di depan TV misalnya, masih sibuk dengan tugas-tugas lain yang menjadi rutinitas. Apa yang dilakukan orang tua, dilihat oleh anak. Anak-anak belajar banyak hal dengan melihat dan meniru bagaimana kebiasaan orang tuanya.

Ibu WT yang baik,

Jika Anda sebagai orang tua merasa sudah memberi contoh dan keteladanan, lanjutkan dengan memberikan nasihat. Nasihat sebaiknya jangan ditunda, khawatir anak keburu lupa. Nasihat sebaiknya disampaikan ketika melihat anak melakukan kesalahan. Karena kesalahan-kesalahan yang didiamkan bisa menjadi kebiasaan. Nasihat orang tua yang baik merupakan sarana ampuh untuk menghubungkan keinginan orang tua dan kemauan anak dengan cepat. Agar nasihat membawa perbaikan, lakukan dengan bahasa kalimat yang menyenangkan, tidak memojokkan agar lebih mudah di terima anak, dan anak tidak bosan.

Ibu WT yang baik,

Ada pepatah mengatakan alah bisa karena biasa. Ketika keteladanan dan nasihat sudah diberikan, tahap berikutnya adalah mela-

kukan pembiasaan. Lakukan kontrol dan pengawasan terus menerus tanpa henti, agar semua kebaikan dan sifat-sifat terpuji yang sudah ditanamkan, khususnya shalat ini efektif. Ketika anak mulai mengendur, ajak bicara saat suasana memungkinkan. Cari tahu masalahnya. Buat kesepakatan bersama untuk saling mengingatkan. Sekali waktu, lakukan evaluasi bersama. Berilah motivasi, perkuat dengan penghargaan.

Ibu WT yang baik,

Jika ada pelanggaran yang Ananda lakukan, boleh diberikan hukuman yang sifatnya konstruktif dan mendidik. Apalagi, Ananda sudah baligh. Sering-seringlah mengajak Ananda berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi perintah shalat. Ingatkan pula bahwa hanya anak yang shalih lah yang bisa menjadi penolong bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak dan betapa Allah SWT sangat mencintai hambaNya yang mendirikan shalat. Mumpung Ananda sedang lebih banyak waktu bersama Anda di rumah, evaluasi dan perbarui pemahamannya tentang kewajiban menjalankan shalat ini. Semoga Allah SWT memudahkan segala upaya yang Anda lakukan. Aamiin.[]

Hukum Jual Beli Lebah Kelulut



Diasuh Oleh: **Ustaz M Shiddiq Al Jawi**

Tanya:

Ustadz, saya mau tanya. Bagaimana hukumnya jual beli lebah? Dan apakah lebah termasuk binatang yang haram dimakan? Kalau ya, apakah memperjualbelikannya juga haram, Ustadz? Sebagai contoh, saat ini banyak dilakukan transaksi jual beli lebah kelulut dengan sarangnya untuk ditenak, kemudian dipanen madunya. Jadi lebah kelulut itu dijual bersamaan dengan sarangnya (koloninya) karena di dalam sarangnya ada ratu lebah yang diikuti oleh lebah-lebah yang lain sebagaimana halnya lebah hutan liar, Ustadz. (Nofri, Bukittinggi)

Jawab:

Memang benar, lebah (*an nahl*) termasuk binatang yang haram dimakan. Karena terdapat kaidah fiqih: "*Kullu hayawānin nuhiya 'an qatlihi harāmūn*" (setiap-tiap binatang yang dilarang untuk dibunuh, haram dimakan). (Imam Syaukani, *Nailul Authar*, hlm. 1686).

Dalam hal ini telah terdapat dalil yang melarang membunuh lebah. Dari Ibnu 'Abbas ra, "Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang untuk membunuh empat macam binatang, yaitu semut (*an namlah*), lebah (*an nahlah*), burung Hudhud, dan burung Shurad." (HR Abu Dawud, no. 5267, Ibnu Majah, no. 3224, Ahmad, 1/332).

Lalu, jika memakan lebah haram, apakah menjualbelikan lebah hukumnya haram? Jawabannya, menjualbelikannya boleh. Mengapa? Karena khusus untuk binatang yang

haram dimakan, hukumnya boleh dijualbelikan jika memenuhi dua syarat; pertama, binatangnya harus suci (tidak najis). Kedua, binatangnya mempunyai manfaat yang mubah bagi manusia. (Yusuf As Sabātin, *Al Buyū' Al Qadimah wa Al Mu'āshirah*, hlm. 49).

Mengenai bolehnya menjualbelikan binatang yang haram dimakan asalkan tidak najis, dasarnya kaidah ushul fiqih: *Al 'ām ba'da at takhshish hujjah fi al bâqi* (dalil umum setelah dikecualikan/dikhususkan, tetap menjadi dalil bagi sisanya yang tidak dikecualikan). (Imam Syaukani, *Irsyādul Fuhūl*, hlm. 144; Syekh Abdul Qādir Ad Dimasyqi, *Nuzhatul Khāthir Al 'Āthir*, 2/131; Wahbah Az Zuhaili, *Ushūl Al Fiqh Al Islāmī*, 1/264).

Dalam hal ini telah terdapat dalil umum (QS Al Baqarah : 29) yang membolehkan memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi. Kemudian ada sebagian benda yang pemanfaatannya diharamkan berdasarkan dalil *takhshish* (pengecualian), di antaranya lebah untuk dimakan. Maka, pemanfaatan lebah selain untuk dimakan, misalnya untuk ditenakkan dan dijualbelikan, hukumnya tetap boleh berdasarkan dalil umum yang ada tersebut (QS Al Baqarah : 29).

Mengenai syarat pertama bahwa binatangnya harus suci (tidak najis), karena terdapat dalil umum yang melarang memanfaatkan segala sesuatu yang najis (*rijsun/na-jisun*). (lihat QS Al Mā'idah : 90). Kaidah fiqih menyebutkan: *Lā yajūzu al intifā' bi an najis muthlaqan* (tidak boleh

memanfaatkan sesuatu yang najis secara mutlak). (Muhammad Shidqi Al Burnu, *Mausū'ah Al Qawā'id Al Fiqhiyyah*, 8/978).

Adapun syarat yang kedua, yaitu binatangnya harus mempunyai manfaat yang mubah bagi manusia (*yuntafa'u bihi*), karena hal ini merupakan salah satu syarat untuk barang dagangan (*al mabī'*) dalam akad jual beli. (Muhammad Taqī Al 'Utsmanī, *Fiqh Al Buyū'*, 1/289). Khusus untuk jual beli *al hasyarāt* (binatang-binatang melata yang kecil), seperti ulat, lebah, dan sebagainya, Imam Al Hashkafi (dari mazhab Hanafi) membolehkan asalkan ada manfaat yang mubah, sesuai patokan fiqih (*dhawabith*) rumusan beliau: *inna jawāz al bai' yadūru ma'a hill al intifā'* (sesungguhnya bolehnya jual beli *al hasyarāt*, bergantung pada adanya pemanfaatan yang bersifat mubah). (*Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 17/281).

Kesimpulannya, menjualbelikan lebah kelulut beserta sarangnya yang ditanyakan di atas, hukumnya boleh. Namun disyaratkan, lebah kelulut yang dijual itu dapat diserahkan (*taslim*) kepada pembeli, jumlahnya diketahui dengan jelas, dan ratu lebahnya dipastikan keberadaannya dalam sarang lebah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam masalah ini. (*Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 42/317-318). Wallahu a'lam.[]

Di tengah-tengah kehidupan sekuler saat ini, media informasi begitu dikuasai oleh kalangan kapitalis dan liberal yang opininya selalu menyudutkan perjuangan Islam.

Sudah sangat jarang kita temukan media informasi yang teguh dan konsisten memperjuangkan keadilan, peduli dengan problematika dan membela kepentingan umat.

Kini **Media Umat** terus hadir untuk teguh dan konsisten memperjuangkan kehidupan Islam dan melawan opini negatif terhadap perjuangan Islam.

Untuk meningkatkan kekuatan **Media Umat** sudah pasti membutuhkan dukungan umat.

Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan, mengajak atau berdonasi untuk orang lain agar memiliki dan membaca **Media Umat**, jangan sampai media ini hanya berhenti ditangan Anda.

Bagi Anda yang ingin berlangganan untuk diri dan orang lain silakan isi formulir di samping.

Kirim ke Agen daerah kami
atau SMS berlangganan ke:

0857 1104 4000

FORMULIR BERLANGGANAN

Bismillah...

Saya ingin berlangganan

MediaUmat
mediaumat.news | Memberjuangkan Kehidupan Islam

**TERBIT
1 BULAN
2 KALI**

Nama Pelanggan :
Alamat Pengiriman 1 :
Alamat Pengiriman 2 :
Telpon/ No. Hp-WA :
Jumlah Langganan : eksemplar
Dikirim Mulai edisi :
Sistem Pembayaran :



Harga : Jawa Rp 8.000/eks
Luar Jawa Rp 11.000/eks



Oleh: **dr. Muh. Amin**, Direktur Poverty Care

Nasihat Buat Para Pemimpin

Berbicara tentang kepemimpinan, sesungguhnya berbicara tentang dua hal: sosok pemimpin dan sistem kepemimpinan. Dalam konteks Islam, dua-duanya penting. Karena itu, selain umat Islam wajib memilih sosok pemimpin yang memenuhi syarat-syarat formal sesuai tuntutan syariah; penting dan wajib pula sosok pemimpin tersebut menerapkan sistem kepemimpinan yang juga sesuai syariah.

Seorang pemimpin yang bertakwa akan selalu menyadari bahwa Allah SWT senantiasa memonitor dirinya dan dia akan selalu takut kepada-Nya. Dengan demikian dia akan menjauhkan diri dari sikap sewenang-wenang (zalim) kepada rakyat maupun abai terhadap urusan mereka.

Khalifah Umar ra, kepala negara khilafah yang luas wilayahnya meliputi Jazirah Arab, Persia, Irak, Syam (meliputi Syria, Yordania, Libanon, Israel, dan Palestina), serta Mesir pernah berkata, "Andaikan ada seekor hewan di Irak terpeleceh di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku mengapa tidak mempersiapkan jalan tersebut (menjadi jalan yang rata dan bagus)."

Nabi Ibrahim as berhadapan dengan Namrudz, seorang Raja Babilon yang mengangkat dirinya menjadi tuhan. Dia memaksa rakyat menyembahnya. Ibrahim menentangnya. Dengan kekuasaannya Namrudz menghukum Ibrahim. Ibrahim pun dibakar di dalam tumpukan kayu bakar yang apinya menjilat-jilat hingga setinggi 40 meter.

Allah SWT menolong Nabi-Nya. "Wahai api jadilahujuk dan menyelamatkan atas Ibrahim". Ibrahim selamat tanpa kurang satu apa pun. Kepada Namrudz, Allah SWT me-

ngirim seekor lalat. Sehari dia kelelahan mengusir lalat yang menggagunya. Hingga akhirnya lalat masuk ke dalam hidungnya. Hal sepele ini menyebabkan raja lalim yang mengaku tuhan ini tewas.

Nabi Musa as berhadapan dengan Fir'aun, raja Mesir yang diktator. Dia pun mengangkat dirinya sendiri sebagai tuhan. Mengerahkan para ahli sihirnya menghadapi Nabi Musa as. Para penyihir Fir'aun kalah oleh mukjizat Nabi Musa as. Mereka beriman dan menjadi pengikut Nabi Musa as. Fir'aun berang. Mereka pun dihukum mati.

Nabi Musa as dikejar hendak ditangkap dan dihukum. Justru pengejaran inilah yang menghantarkan kematian Fir'aun. Nabi Musa as dan pengikutnya berlari hingga ke laut. Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa as dan pengikutnya. Sedang Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah SWT. Raja yang lalim dan diktator ini pun tewas mengenaskan. Allah mengawetkan jasadnya untuk menjadi peringatan bagi generasi berikutnya: kita semua.

Saudaraku, jika sekarang kalian sedang berkuasa, jadilah penguasa yang baik, yang adil. Yang menjalankan syariah Allah SWT. Janganlah setiap nasihat yang diberikan oleh rakyat dianggap kriminal, sehingga kalian menghukum rakyat, atau mencari-cari kesalahan rakyat agar dapat melampiaskan kemarahan kepada mereka.

Ingatlah bahwa kekuasaan itu sementara. Kehidupan di dunia juga sementara. Akan tetapi kezaliman yang kalian timpakan kepada rakyat akan menghadapi pengadilan di akhirat kelak. Pengadilan yang tidak mempan disogok. Pengadilan yang tidak mempan diancam dengan kasus yang

tersandera. Pengadilan yang menjadikan tersangkanya bangkrut dan diazab dengan azab yang pedih.

Bayangkan jika rakyat yang terzalimi ini menuntut di hadapan Allah yang Mahaadil. Kebaikanmu akan digerogeti satu demi satu untuk diberikan kepada mereka. Jika kebaikanku sudah habis, maka dosa mereka yang terzalimi akan ditimpakan kepadamu. Azab yang pedih menunggu.

Saudaraku, janganlah berbuat zalim. Dengarlah nasihat rakyat. Mereka tidak akan menyusahkanmu. Mereka menginginkan kebaikan atas dirimu, keluargamu, dan negaraku ini.

Semoga kita bukan termasuk yang diancam Allah SWT di dalam Alquran Surah al-Buruj:

"Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang Mukmin itu melainkan karena orang-orang Mukmin itu beriman kepada Allah yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang Mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.[]"



Oleh: **Aminudin Syuhadak**, Direktur Lembaga Analisis dan Kajian Politik (Lanskap)

Rekam Jejak Kekejian Negara Cina terhadap Muslim Uighur

Rezim Cina beserta semua kekuatan ekonominya yang disombongkan, pengertakannya dan pencaplokan tanah dan ambisi perebutan laut dengan beberapa negara di wilayah regionalnya, serta kefanatikan nasionalismenya yang membahana di dalam negeri, faktanya pemerintah totaliter Cina masih harus menghancurkan orang-orang yang ditaklukkan paksa dari Turkistan Timur (Xinjiang).

Cina terbukti mendiskriminasi hingga menindas kaum Muslimin di Xinjiang yang tak berdosa, baik laki-laki, wanita, anak-anak, bahkan kalangan orang tua, tidak ada yang luput dari kezaliman rezim fasis tersebut.

Satu-satunya 'kejahatan kaum Muslimin' versi rezim fasis tersebut adalah karena mereka menyembah Allah SWT, dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Jika memang gaya hidup komunis mereka 'dengan karakteristik Cina' begitu superior dan kokoh sebagaimana klaim mereka, mengapa mereka mencekik kaum Muslim di Turkistan Timur?

Kekejaman Cina di Turkistan Timur bersaing dengan Stalin, Hitler dan Assad. Bahkan rezim Cina tampaknya telah bersaing dengan penyiksaan tahanan Muslim dari Abu Ghraib, Guantanamo dan buku pegangan CIA tentang teknik penyiksaan tahanan. Daripada menggunakan teknik pemerkosaan wanita Muslim seperti selama perang Bosnia, Cina menggantinya dengan 'pernikahan' para wanita Muslim Uighur dengan para laki-laki Cina Han. (aljazeera.com)

Cina telah melanggar hak-hak asasi masyarakat Muslim Uighur selama bertahun-tahun. Muslim Uighur banyak yang telah dieksekusi di luar kerangka hukum dan lainnya dieksekusi melalui operasi rahasia oleh pasukan

keamanan Cina. Kebijakan represif Cina terhadap bangsa Uighur khususnya, melalui pencabutan hak untuk menyampaikan pendapat mereka secara damai, memiliki konsekuensi bencana.

Begitulah Cina hari ini yang menyandarkan prinsip dan gaya hidup dari ideologi *pick-n-mix* (comotan dan campuran) Cina—campuran antara komunisme Marxis-Leninisme dan sentuhan Cina, menggenggam kuat ajaran Mao, dosis berlebihan kapitalisme "yang ditransplantasikan", dan infus Xi—tampaknya tidak membuat kaum Muslim di Turkistan Timur untuk murtad dan menyerahkan agama kepada rezim diktator Cina, budaya atau kezaliman mereka.

Rezim Cina sama dengan rezim fasis di mana pun. Mereka tidak memiliki validitas intelektual, mereka dipoles dengan kekuatan. Sistem Cina tidak membela kebenaran, kehormatan, integritas. Sistem Cina tidak memedulikan hak-hak manusia atau menghormati kepercayaan sakral mereka. Sayangnya, dalam kasus kaum Muslim di Turkistan Timur, orang-orang Cina tampaknya tidak belajar dari sejarah pemerintahan penjajahan Jepang.

Ingat! Tindakan-tindakan permusuhan terhadap kaum Muslim di Turkistan Timur yang diduduki oleh Cina mencerminkan sejauh mana kebencian rezim komunis terhadap Islam, juga merupakan ketakutan negara Cina akan pengaruh Islam yang besar pada masyarakat Cina. Ini menunjukkan sisa-sisa doktrin komunis yang represif dan memiliki warisan sejarah penganiayaan agama minoritas masih tetap berakar kuat dalam negara.

Meski ideologi komunisme di dunia telah runtuh, kaum Muslimin Uighur khususnya Muslimah merasakan tekanan dalam kehidupan mereka dari segala penjuru. Bukan hanya hak mereka untuk mengenakan busana

Muslimah yang dirampas secara sistematis dan keji, namun juga hak mereka untuk berkeluarga dan memiliki keturunan!

Partai komunis yang berkuasa telah berupaya secara berkala untuk memusnahkan busana Muslimah sejak mengambil kekuasaan di tahun 1949, pertama kali melancarkan upaya-upaya ateisme dan kemudian melarang kerudung sama sekali di tahun 1960-an dan 70-an.

Kaum Muslim Uighur bukan hanya harus berhadapan dengan kebijakan represif yang mengancam identitas mereka, namun juga harus dihadapkan dengan kebijakan brutal yang merusak rahim-rahim Muslimah mereka dengan program aborsi dan sterilisasi massal. Program brutal yang lahir dari penguasa kriminal Cina yang membenci Islam dan ketakutan akan lahirnya generasi para mujtahid dan mujahid Islam yang mampu mengembalikan kejayaan Islam di Turkistan Timur dan seluruh penjuru dunia Islam. Karena dari rahim-rahim mulia kaum Muslimah di Uighur dan Muslimah di seluruh dunia akan lahir generasi pemimpin umat yang akan membawa umat ini dari kegelapan menuju cahaya.

Inilah salah satu realitas penderitaan kaum Muslimin yang menyayat hati, di timur dunia Islam. Mereka adalah korban tak berdaya dari monster penguasa kafir harbi yang dibiarkan eksis oleh sistem dunia yang diskriminatif terhadap umat Islam.[]



Kirimkan opini Anda terkait isu aktual dengan perspektif Islam ke email: pembaca.tabloidmu@gmail.com
Panjang tulisan sekitar 3500 karakter.
Sertakan pula foto diri dan biodata singkat.

Henry Kissinger: Perubahan Tatahan Dunia Pasca Corona

Bencana paling besar dari kegagalan kapitalisme menangani wabah ini, yaitu masalah privatisasi sektor kesehatan



■ Henry Kissinger

Politisi senior Amerika Serikat Henry Kissinger menyatakan, pandemi corona akan mengubah tatanan dunia global selamanya. Sebagaimana yang dikutip kantor berita *al Jazeera* (4/4) dari *Wall Street Journal*, mantan menteri luar negeri Amerika ini menyatakan kerusakan akibat pandemi virus corona baru (Sars Cov-2) mungkin bersifat sementara, akan tetapi kekacauan politik dan ekonomi yang disebabkan dapat berlanjut beberapa generasi.

Untuk itu Kissinger mendesak pemerintah AS untuk fokus pada tiga bidang utama dalam menghadapi dampak pandemi secara lokal dan global. *Pertama*, meningkatkan kemampuan dunia untuk memerangi penyakit menular, dan hal itu dilakukan melalui pengembangan penelitian ilmiah. *Kedua*, berupaya tanpa henti untuk

mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh ekonomi global akibat pandemi yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya dalam hal kecepatan dan luasnya cakupan. Dia juga mendesak pemerintah Amerika untuk melindungi prinsip-prinsip sistem liberal global termasuk karakteristiknya.

Ketiga, hal yang tidak kalah penting menurutnya, adalah adalah pemerintah Amerika agar fokus pada besarnya penolakan rakyat terhadap sistem kapitalis ini. Selama ini kebijakan penyelamatan ekonomi berakhir dengan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Kissinger menutup artikelnya dengan mengatakan bahwa tantangan historis yang dihadapi para pemimpin dunia pada saat ini adalah mengelola krisis dan membangun masa depan pada saat yang bersamaan. Dan kegagalan dalam tantangan ini benar-benar dapat mengobarkan dunia.

Dampak virus corona, disamping korban jiwa, sudah dipastikan akan memukul ekonomi dunia lebih parah lagi. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memperingatkan bahwa pandemi corona (Covid-19) dapat merugikan ekonomi global hingga US\$ 4,1 triliun (Rp 67.759 triliun) atau 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bahkan dalam laporan Asian Development Outlook, ADB mengatakan kerugian akibat pandemi merupakan yang "terburuk dalam satu abad" terakhir. Apalagi jika penguncian wilayah (*lockdown*) baik sepenuhnya atau parsial, berlangsung lama.

ADB pada Jumat (3/4) juga memperingatkan bahwa pandemi virus corona dapat mengurangi separuh pertumbuhan PDB di negara berkembang Asia. Pertumbuhan ekonomi Asia yang sudah melambat akan terus melemah bahkan jauh lebih dalam di tahun ini akibat dampak dari virus corona.

Kegagalan Tragis Kapitalisme

Menanggapi guncangan dunia akibat pandemi Covid-19, pengamat politik internasional Ahmad Al-Khuthwani dalam Surat Kabar *Ar-Rayah*, Edisi 281 (15 Sya'ban 1441 H/8 April 2020 M) menegaskan kegagalan tragis Amerika dalam menangani virus corona adalah bukti konkrit atas kegagalan kapitalisme, sistem dan langkah solutifnya.

Menurutnya, meskipun Amerika memiliki kapasitas fisik yang mumpuni, hanya saja ia begitu lemah selemah-lemahnya dalam menghadapi sebuah penyakit. Pernyataan tersebut terlihat dari langkah penanganannya terhadap corona, layaknya negara bagian ketiga di dunia (negara berkembang).

Amerika selama ini, menurutnya, dikenal memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang kesehatan. Amerika memiliki sejumlah rumah sakit terbaik di dunia, yang banyak dituju oleh konglomerat mancanegara. Berbagai teknologi maju kedokteran digunakan di sana. Ia sangat maju di bidang penelitian ilmiah kedokteran dan memiliki peluang meraih Nobel penghargaan di bidang kedokteran tanpa pesaing. Amerika juga menggelontorkan sebanyak 3,6 miliar USD untuk sektor pengelolaan kesehatan. Jumlah yang begitu fantastis ini senilai 17 persen pendapatan bersih Amerika dan setara lima kali lipat dana yang telah dialokasikan pada angkatan militernya.

Lantas kenapa gagal? Khuthwani menyatakan, kegagalan Amerika dalam menangani virus corona tidaklah muncul dari masalah minimnya dana dan kapasitas, akan tetapi muncul karena permasalahan pendistribusian dana—secara khusus—, serta buruknya pengurusan masyarakat yang bersandar pada ideologi kapitalisme secara umum.

Lebih lanjut, dipaparkan, Amerika mengalokasikan lebih dari 53 persen dari anggaran belanja sektor kesehatan pada perusahaan asuransi yang telah menguras porsi besar dari anggaran belanja. Sedangkan perusahaan farmasi mendapat porsi 15 persen dari anggaran belanja. Bisa dikatakan lebih dari 75 persen anggaran belanja ini dikuasai oleh perusahaan yang hanya mencari keuntungan.

Amerika, lanjutnya, telah memperjualbelikan kesehatan manusia melalui spekulasi anggaran belanja di pasar modal, juga melalui kepemilikan hak cipta produksi obat dan berakibat pada lonjakan harga obat serta biaya berobat. Perusahaan-perusahaan asuransi dan farmasi telah mengambil keuntungan atas dana pemerintahan dan penduduk ini. Amerika pun tidak memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan karena tujuannya hanyalah mengumpulkan pundi-pundi uang dengan memberikan pelayanan kesehatan terendah bagi mereka yang memiliki asuransi.

Dengan porsinya yang begitu besar atas dana tersebut, Amerika memiliki kesempatan untuk melipatgandakan hartanya melalui perjudian dalam bursa saham. Maka, tidak mengejutkan apabila sejumlah rumah sakit di Amerika—dalam menangani virus corona— justru kekurangan peralatan dasar medis yang tidak membutuhkan teknologi tingkat tinggi—dalam produksinya—, seperti alat bantu pernafasan, masker, alat pelindung diri (APD) dan sarung tangan medis.

"Akar permasalahan ini dalam sistem kapitalis bukan muncul dari minimnya dana atau kurangnya tenaga ahli, akan tetapi akar masalahnya adalah tidak adanya tanggung jawab negara dalam pengelolaan. Kesehatan yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara dialihka ke perusahaan asuransi kesehatan dan farmasi yang hanya mengambil keuntungan," tegasnya.

Ditegaskan Khuthwani dari sinilah bencana paling besar dari kegagalan kapitalisme menangani wabah ini, yaitu masalah privatisasi sektor kesehatan. Karena privatisasi tersebut menyebabkan penggelapan dana khusus dan penyalahgunaannya.

Menurutnya, solusi tuntas dari masalah ini sangatlah mudah, yaitu dengan mengembalikan peran bagian tersebut kepada negara dan pencabutan privatisasi secara keseluruhan. Ini berarti penghapusan sistem kapitalisme dan pelengseran penguasanya.

"Pengganti yang tepat dari sistem buruk kapitalisme ini, tidak lain adalah Islam, yang melarang privatisasi dan membatasi pengelolaan urusan masyarakat hanya di tangan yang dipimpin seorang khalifah," tegasnya. ■ af

Tanggung Jawab Negara

Khalifah adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Tidak ada celah bagi bagian khusus dalam pengelolaan kenegaraan. Bagaimana tidak, sedangkan Rasulullah SAW telah memberikan dokter khusus untuk melayani setiap masyarakat Muslim. Rasulullah SAW juga mengirimkan dokter pada Ubay bin Kaab ketika ia sakit untuk membedah penyakitnya.

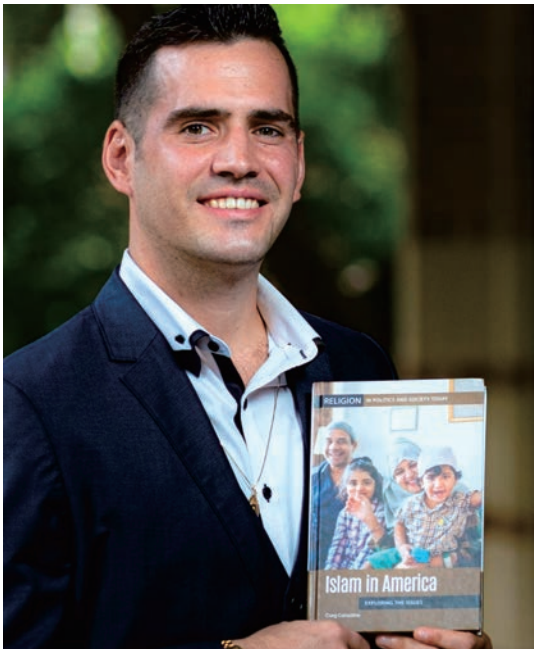
Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya ia berkata, "Aku pernah sakit di zaman Khalifah Umar bin al-Khattab ra kemudian ia memanggilkan untukku seorang dokter yang kemudian merawatku".

Negara dalam Islam melakukan pengelolaan kesehatan secara langsung dan tidak mengizinkan bagian khusus lain untuk ikut campur dalam pengurusan kenegaraan. Maka, pengobatan dalam negara pun digratiskan, begitupula pendidikan, dan tidak diizinkan adanya privatisasi di dalamnya.

Negara juga tidak memberikan individu kesempatan untuk menggantikan posisi negara sebagaimana yang dilakukan oleh sistem kapitalisme. Dengan ini, maka kemampuan negara sangat tinggi, pelayanan sangat baik dengan tanggungan biaya yang begitu ringan.

Hanya dengan Islam saja, kita dapat menuntaskan bermacam permasalahan, di antaranya masalah pengelolaan kesehatan dengan kapasitas yang mumpuni. Hanya dengan negara Islam saja kita bisa menyelamatkan kembali masyarakat dari kebrutalan kapitalisme, eksploitasi dan hegemoninya. ■ **Ar-Rayah**, Edisi 281 (15 Sya'ban 1441 H/8 April 2020 M)

Media Barat Ungkap Bagaimana Rasulullah SAW Tangani Wabah



■ Craig Considine.

Ajaran Rasulullah SAW yang yang berusia 14 abad, yang menganjurkan tindakan sanitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah menarik perhatian media internasional di tengah krisis virus corona yang baru. Sering mencuci tangan, mengasingkan diri, dan menghindari kontak fisik, yang sekarang direkomendasikan sebagai tindakan pencegahan terhadap virus corona adalah beberapa prinsip inti Islam dalam menghadapi wabah. Ajaran Rasulullah ini dianggap sejalan dengan apa yang dianjurkan para ahli kesehatan saat ini.

Surat Kabar Spanyol ABC (3/4), menulis artikel dengan judul "Tip Luar Biasa Nabi Muhammad untuk Selamat dari Pandemi". Tulisan ini memaparkan bagaimana rekomendasi berulang dari para ahli kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan membandingkannya dengan ajaran Islam awal oleh Nabi Muhammad. Meskipun tidak dengan tepat menyebut Islam dengan mengatakan sebagai agama yang didirikan Rasulullah, media ini memuji bagaimana Rasulullah SAW menghadapi wabah.

"Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa, 1.300 tahun yang lalu, seorang buta huruf ... tanpa pelatihan ilmiah apa pun, sudah diketahui, langkah demi langkah, apa yang harus dilakukan selama pandemi. Nama [nya] adalah Muhammad, ia mendirikan Islam dan mencerminkan ... rekomendasinya untuk menghindari pandemi," demikian bunyi artikel tersebut.

Dalam artikel lain yang diterbitkan oleh majalah Amerika *Newsweek* (17/3) Profesor Craig Considine menyajikan dan menjelaskan perintah-perintah Nabi Muhammad untuk menghindari penularan. "Apakah Anda tahu siapa lagi yang menyarankan untuk menjaga kebersihan dan karantina selama pandemi? Muhammad SAW, nabi umat Islam, lebih dari 1.300 tahun yang lalu," demikian tulis Craig Considine, seorang profesor di Rice University Amerika, di opini *Newsweek* (17/3).

"Meskipun dia (Muhammad) sama sekali bukan ahli 'tradisional' dalam hal penyakit mematikan, Muhammad tetap memiliki saran yang bagus untuk mencegah dan memerangi perkembangan seperti Covid-19," tulisnya.

Considine pun mengutip perkataan Rasulullah SAW, yang memerintahkan untuk meng-

isolasi (karantina) daerah yang menjadi sumber wabah. "Jika Anda mendengar wabah penyakit di suatu negeri, jangan memasukinya; tetapi jika wabah itu pecah di suatu tempat ketika Anda berada di dalamnya, jangan tinggalkan tempat itu," kutip Considine. Menurutnya, hadits Rasulullah ini mewakili salah satu bentuk karantina yang paling awal.

Kebersihan juga penting dalam ritual Islam, paparnya. Considine menjelaskan bagaimana umat Islam harus melakukan wudhu beberapa kali sehari sebelum shalat. Considine mengutip hadits lain: "Kebersihan adalah bagian dari iman." Untuk menggambarkan demikian pentingnya kebersihan dalam Islam.

Sementara ajaran 'cuci tangan', lanjutnya, sesuatu yang berulang ditegaskan Rasulullah SAW sebagai suatu 'habit' (kebiasaan). Seperti cuci tangan setelah tidur, karena saat tidur seseorang tidak tahu ke mana tangannya bergerak. Rasulullah pun mengajarkan untuk cuci tangan sebelum makan karena berkat makanan itu terletak pada mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.

Pada akhir tulisannya, Considine mengkritik mereka yang beriman dan doa, namun mengabaikan diri dari penyakit. Padahal, paparnya, Rasulullah memerintahkan untuk menghindari penyakit dan berobat saat sakit. Profesor itu pun mengutip ajaran Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk memanfaatkan perawatan medis, karena Tuhan tidak membuat penyakit tanpa menurunkan obatnya, dengan pengecualian satu penyakit, yaitu usia tua.

Lebih lanjut dia menyebutkan Rasulullah memerintahkan agar memenuhi kaedah kausalitas, tidak fatalis, tidak cukup hanya berdoa tanpa melakukan tindakan nyata. Dia pun mengutip ajaran Rasulullah yang pernah menegur seseorang yang tidak mengikatkan unta dengan alasan tawakal (menyerahkan diri) sepenuhnya kepada Allah. Rasulullah justru menegur orang tadi dan memerintahkan mengikat untanya dan bertawakal kepada Allah SWT.



Namun patut diperhatikan mengapa *Newsweek* dan Dr Craig Considine tidak memperhatikan ideologi yang dibawa oleh Muhammad SAW yaitu Islam. Kenapa hanya peduli pada bagaimana beliau mengatasi pandemi dan epidemi, dengan mengatakan bahwa Muhammad adalah orang pertama yang melakukan karantina kesehatan (*lockdown*)?! Mengapa mereka tidak berbicara tentang kegagalan ideologi kapitalisme dalam menangani masalah-masalah modern, dan sebaliknya bahwa ideologi Islam adalah satu-satunya yang mampu menyelesaikan semua masalah?! Ini sesungguhnya mencerminkan ketakutan mereka Islam akan menggantikan ideologi kapitalisme yang sekarang sedang sekarat. **[af]**

KRONIK MANCANEGERA

Bepergian ke Eropa, 150 Pangeran Saudi Kena Corona

Banyak di antara keluarga Kerajaan Arab Saudi bepergian secara reguler ke Eropa dan beberapa di antaranya diyakini tertular virus di luar negeri lalu membawanya ke Arab, sehingga dalam beberapa pekan terakhir sebanyak 150 di antaranya dilaporkan terinfeksi virus corona.

Terkait itu, operator fasilitas elite Rumah Sakit Spesialis Raja Faisal, melalui "peringatan tinggi" yang dikirim secara elektronik pada Selasa (7/4/2020) ke para dokter senior menginstruksikan "semua pasien kronis untuk dipindahkan secepatnya, dan hanya kasus mendesak yang akan diterima."

Peringatan itu pun menambahkan setiap anggota staf yang terinfeksi sekarang akan dirawat di rumah sakit yang kurang elite, untuk memberi ruang bagi bangsawan. Keluarga kerajaan diperkirakan memiliki 15.000 anggota, sedangkan Pangeran Saudi berjumlah ribuan.

Aljazeera, sebagaimana dikutip *kompas.com* mengabarkan, Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al-Saud (70 tahun) yang juga merupakan Gubernur Riyadh, sedang dalam perawatan intensif akibat terinfeksi Covid-19. **[j]**

Modi Ajak Bersatu Lawan Covid-19, Tapi Tetap Diskriminasi



Perdana Menteri India Narendra Modi telah mengajukan permohonan untuk berjuang bersatu melawan Covid-19. "Tetapi belum menyerukan persatuan dalam perang melawan kekerasan dan diskriminasi anti-Muslim," ujar Meenakshi Ganguly, Direktur Asia Selatan di Human Rights Watch, dalam sebuah laporan seperti diberitakan *republika.co.id*, Sabtu (11/4/2020).

Menurut Ganguly, undang-undang kewarganegaraan baru India yang disahkan rezim Modi merupakan wujud diskriminasi. Diterbitkannya UU tersebut telah membuka pintu bagi kekerasan massa.

Pemerintah juga tidak menindak perbuatan polisi yang telah menanamkan rasa takut di kalangan umat Islam dan komunitas minoritas lainnya di seluruh negeri. Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan India itu dinilai sebagai ancaman bagi jutaan Muslim India.

Laporan yang disusun Human Rights Watch setebal 82 halaman berjudul 'Menembak Pengkhianat: Diskriminasi Terhadap Muslim di Bawah Kebijakan Kewarganegaraan Baru India'. Laporan ini menyebut polisi dan pejabat lain telah berulang kali gagal mengintervensi saat para pendukung pemerintah menyerang pihak yang memprotes kebijakan tersebut.

"Namun, polisi dengan cepat menangkap kritik terhadap kebijakan tersebut dan membubarkan demonstrasi damai mereka, termasuk dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dan mematikan," demikian kata laporan itu.

Laporan Human Rights Watch didasarkan pada lebih dari 100 wawancara kepada korban pelecehan dan keluarga mereka yang berasal dari New Delhi dan negara bagian Assam dan Uttar Pradesh. Laporan juga dibuat berdasarkan wawancara dengan para pakar hukum, akademisi, aktivis, dan pejabat polisi.

Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa menolak mengomentari laporan itu. "Ini masalah sensitif dan kami tak bisa berkomentar saat ini," kata juru bicara partai, Shah Nawaz Hussain, kepada *Anadolu Agency*. **[j]**

Cina Jual Alat Medis ke 70 Negara

Sejumlah perusahaan berbasis di Cina telah menandatangani kontrak penjualan alat kebutuhan rumah sakit dengan sekitar 70 negara dalam memerangi wabah virus corona.

Juru bicara Kementerian Perdagangan Cina, Gao Feng, mengatakan kerja sama itu melibatkan 70 negara dan wilayah serta 10 lembaga internasional.

"Cina mengeksport sekitar US\$1.44 miliar alat pencegahan epidemi," begitu dilansir Bea Cukai Cina untuk periode 1 Maret hingga 4 April 2020 seperti dilansir CNN pada Kamis, 9 April 2020 dan dikutip *tempo.co* esoknya.

Alat medis ini seperti 3.8 miliar masker wajah berbagai jenis, 37.5 juta pakaian pelindung medis, 16 ribu alat bantu pernapasan atau ventilator, dan 2.8 juta alat tes corona.

Sejumlah negara berebut membeli alat medis untuk menangani penyebaran virus corona sehingga memunculkan persaingan kurang sehat.

Pada Jumat pekan lalu misalnya, pejabat Jerman mengatakan pengapalan masker wajah untuk negaranya dibajak dan dialihkan ke Amerika Serikat. **[jy dari berbagai sumber]**

Wabah Baru Akibat Tersebaranya *Fahisyah*

Wahai kaum Muhajirin, lima perkara jika kalian ditimpanya dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menjumpainya. Tidaklah fâhisyah-zina-nampak di suatu kaum hingga mereka melakukannya terang-terangan kecuali akan menyebar di tengah mereka penyakit Tha'un dan berbagai penyakit yang belum terjadi di generasi-generasi yang sudah berlalu sebelum mereka... ” (HR. Ibnu Majah, al-Bazar, al-Hakim, al-Bayhaqi, ath-Thabarani dan Abu Nu'aim).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan* dan al-Bazar di dalam *Musnad*-nya. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'a'im di dalam *Hilyah al-Awliyâ'*; ath-Thabarani dalam *Mu'jam al-Awsath* dan *Musnad asy-Syamiyin*; al-Bayhaqi di dalam *Su'ab al-Îmân*; dan Abu Amru Utsman bin Sa'id al-Muqri' ad-Dani di dalam *as-Sunan al-Wâridah fî al-Fitan*.

Al-Hakim meriwayatkannya di dalam *al-Mustadrak 'alâ ash-Shahihayn* dari jalur Abdullah bin Umar. Al-Hakim berkata: "Hadits ini sanadnya shahih meski al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya";

Hadits tersebut termasuk hadits *tarhib wa tarhib*, yakni dorongan untuk merealisasikan sesuatu atau melakukan sesuatu dan menakut-nakuti dari sesuatu agar terdorong untuk meninggalkan sesuatu itu. Dalam hal ini, adalah *tarhib wa tarhib* untuk menjauhi zina dan men-

cegahnya supaya tidak tampak atau menyebar di tengah masyarakat.

Hadits ini memperingatkan akibat jika *fahisyah* —zina— tampak menyebar luas dan dilakukan terang-terangan di suatu kaum. Sabda Rasul SAW: Tidaklah *fāhīsyah* -zina- nampak di suatu kaum hingga mereka melakukannya terang-terangan.

Fāḥisyah secara bahasa adalah perbuatan keji dan tercela. Atau sebagai semua bentuk perbuatan dosa. Secara lebih khusus *fāḥisyah* menunjuk kepada dosa besar. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai zina, dan bisa juga mencakup homoseksual dan lesbianisme. Lafazh *tazhhar* maknanya *fasyā aw tantasyir*—tersebar luas. *Hattā yu'linū bihā* yakni *fāḥisyah* itu dilakukan secara terang-terangan dan terbuka. Ini bukan berarti, perzinahan itu dilakukan di depan khalayak. Tetapi bisa dalam bentuk, prostitusi merebak dan dilegalkan. Atau orang tidak lagi risih kumpul kebo, hidup serumah layaknya suami istri tanpa ikatan nikah. Atau banyaknya anak hasil hubungan seksual di luar ikatan pernikahan.

Sabda Rasul SAW ini sekaligus mengisyaratkan, bahwa amar makruf nahi munkar tidak lagi dilakukan oleh kaum itu atau minim sekali. Juga mengisyaratkan bahwa sistem atau rezim tidak mencegah *fahisyah* itu atau malah memfasilitasinya. Sebab jika tidak demikian, niscaya *fahisyah* itu tidak akan menyebar dan dilakukan terang-terangan.

Jika perbuatan *fâhiysah* ini tampak dan dilakukan secara terang-terangan, sesuai hadits tersebut, masya-

rakat akan ditimpa wabah *tha'ûn* (pes) dan muncul penyakit yang belum terjadi pada generasi sebelumnya. Di dalam hadits lainnya, disebutkan *katsura fihim al-mawtu*— banyak kematian. Ini mengisyaratkan penyakit baru itu bersifat mematikan dan menular. Di dalam hadits di atas digunakan lafazh umum, *al-awjâ'*. Ini mengisyaratkan bahwa penyakit baru yang muncul itu tidak mesti penyakit menular seksual, tetapi bisa jenis penyakit mematikan dan menular apa saja.

Konotasi hadits di atas, bahwa tersebarnya tha'un atau munculnya penyakit menular dan mematikan yang baru itu merupakan akibat tersebarnya zina dan dilakukan terang-terangan di tengah masyarakat. Namun dalam hadits lain, hadits edisi sebelumnya, dinyatakan bahwa tha'un merupakan rahmat untuk kaum Muslim. Maka dalam hal ini bukan hal penting menentukan atau memastikan apakah tha'un atau mewabahnya penyakit menular mematikan yang baru itu, termasuk Covid-19 saat ini, merupakan hukuman/azab atas suatu kaum atau bukan.

Hadits tersebut lebih merupakan *targhib wa tarhib* untuk mencegah tersebarnya *fahisyah*, terutama zina, dan dilakukannya *fâhisyah* itu secara terang-terangan. Di sini menegaskan pentingnya amar makruf nahi mungkar. Juga mengingatkan akan pentingnya penerapan syariah secara kaffah. *WaLlâh a'lam bi ash-shawâb.*[] **yahya abdurrahman**



KAJIAN ONLINE

STAY & WORK AT HOME BERSAMA KHILAFAH CHANNEL LIVE

Setiap Senin "Fokus" bersama Ust. Ismail Yusanto	Setiap Selasa "Kajian Kitab Muqaddimah ad Dustur" bersama Ust. Syamsudin R.	Setiap Rabu "Kajian Hadits Politik" bersama Ust. Yuana Ryan T.	Setiap Kamis "Sirah Nabawiyah" bersama KH. Hafidz Abdurrahman
Setiap Jum'at "Fiqh Mu'amalah & Siyasah" bersama KH. Siddiq Al Jawi	Setiap Sabtu "Tafsir Al-waie'" bersama KH. Rokhmat S. Labib	Setiap Ahad "Tarikhul Khulafa" bersama KH. Yasin Muthohar	



Live Streaming

youtube.com/khilafahchannel

SETIAP HARI PUKUL

13.30 WIB





Ma'had Al Ikhlas

Sekolah Pencetak SANG PEMIMPIN

**YAYASAN PONDOK
PESANTREN AL-IKHLAS**

Menyuarakan Kehidupan Islam

VISI

Mencetak Santri yang Unggul dalam Pembelajaran, Tahfidz Al Quran, Riset & Teknologi, Leadership, Bertsaqofah Islam.

Menerima Pendaftaran Santri Baru Tahun Ajaran 2020-2021

Jenjang Pendidikan

PAUD meliputi :

- Pendidikan Pesantren :
 - Day Care
 - Pre School
 - PG/TK
 - Tahfidz
- SETINGKAT MI
- SETINGKAT MTS
- SETINGKAT MA

MISI

- Menyelenggarakan Pendidikan terintegrasi sesuai kurikulum Nasional dan Pesantren
- Mendidik santri untuk memiliki pemahaman yang benar terhadap Islam sebagai Jalan Hidup sesuai Tuntunan Al Quran dan Assunah
- Mendidik dan membina santri menjadi Tahfidzul Quran, Tafaqquh Fiddin, dan mempunyai jiwa Leadership

Syarat Pendaftaran

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Foto berwarna 3x4 = 4 lembar
3. Fotocopy Ijazah Legalisir/Surat Keterangan Lulus
4. Fotocopy Kartu Keluarga & Akta Lahir
5. Mengikuti Tes dan wawancara

Alamat :
 Yayasan Ponpes Al Ikhlas
 Jl Pandawa RT 2 RW 2 Kebonsari Candi-Sidoarjo
 (Belakang POLSEK Candi 300M Lingkar Timur)

Contact & Info : **0858 5013 9550** (Ust Abu Faruq)
0813 1453 1990 (Gus Furaon Azizi)

LIVE ON AIR
DaktaFM

**Secretan
Dunia Islam**

 BERSAMA:
UST MUJIYANTO
(REDAKTUR MEDIA UMAT)

ACARA INI DAPAT DINIKMATI SECARA LIVE
MELALUI AUDIO STREAMING DI WWW.DAKTA.COM
SETIAP SENIN JAM 07.30-08.00 WIB

ACARA INI TERSELENGGARA ATAS KERJASAMA:

 **Dakta**
107 FM
bijak • cerdas

 **Media** tabloid **umat**
www.mediaumat.com Memperjuangkan Kehidupan Islam

MediaUmat
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam



Ketentuan Iklan

- ☒ Materi iklan dikirimkan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum terbit ke email: **iklan.tabloidmu@gmail.com**
- ☒ Materi iklan dalam bentuk softcopy dengan format CDR/JPG/TIF resolusi 300 dpi, CMYK.
- ☒ Desain iklan menjadi tanggung jawab pihak pemasang iklan.
- ☒ Materi iklan tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam, serta tidak menyinggung hak cipta orang lain dan tidak memuat hal-hal yang dianggap fitnah, penghinaan, atau merugikan nama baik pihak lain.
- ☒ Pihak pemasang bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terjadi gugatan oleh pihak lain atas isi materi iklan tersebut.
- ☒ Pembayaran dilakukan maksimal 1 minggu sebelum terbit.
- ☒ Pembayaran di transfer ke Rekening:
BNI Syariah: 0245 8009 73 atau
BSM: 7000 5898 47
An. Budi Darmawan.

Tarif Iklan

URAIAN	UKURAN	HARGA
1 Halaman Back Cover	255 X 350 mm	Rp 16,000,000
1 Halaman Dalam	255 X 340 mm	Rp 12,000,000
½ Halaman Dalam	255 X 170 mm	Rp 8,000,000
¼ Halaman Dalam	125 X 170 mm	Rp 4,000,000
1/8 Halaman Dalam	125 X 85 mm	Rp 2,000,000
1/16 Halaman Dalam	125 X 43 mm	Rp 1,000,000
Advetorial 1 Halaman	520 X 340 mm	Rp 11,000,000
Center Spread (2 Halaman)	520 X 340 mm	Rp 36,000,000

**DAPATKAN
DISCOUNT
SPECIAL**

Informasi :
0857.1713.5759

Ikuti channel resmi media sosial Mediaumat di :

mediaumat.news
Media Umat
@MediaUmat
@mediaumat.news
t.me/MediaUmatNews

DAPATKAN UPDATE TERBARU SEPUTAR BERITA ISLAM DARI MEDIA UMAT

Media Umat Online atau MU Online hadir di tengah-tengah hiruk pikuk keterbukaan informasi yang luar biasa. Begitu derasnya informasi terkadang tidak tahu lagi mana informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. MU Online hadir dengan berita-berita yang aktual, tajam, akurat, dapat dipercaya, dan mencerdaskan umat. Sesuai dengan motto kami "Melanjutkan Kehidupan Islam" tampil dengan warna berita yang berbeda dan melihat berbagai peristiwa dengan kaca mata khas Islam serta memihak kepada kaum Muslim. Selamat membaca!



www.mediaumat.news

Memperjuangkan Kehidupan Islam